



RPJMD PERUBAHAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2016-2021**



**KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2018**



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyusunan Perubahan RPJM Daerah, dimaksudkan:
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu:
 - a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan 6 indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
 - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi OPD dalam menyusun RENSTRA OPD;
 - b. pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. bahan evaluasi pencapaian kinerja RPJPD tahun 2005-2025.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyusunan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, meliputi:
1. Bab I : Pendahuluan
 2. Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
 3. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah
 4. Bab IV : Permasalahan dan Isu – Isu Starategis Daerah
 5. Bab V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
 6. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 7. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
 8. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah
 9. Bab IX : Penutup

- (2) Uraian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian dari RPJM Daerah dan lingkup BAB masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Bappeda menyusun perubahan RPJM Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Daerah dengan memperhatikan masukan dari OPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10)/(2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPJMD bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPJMD Kapuas Hulu merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk didalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi.

Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling *update*.

Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. perbaikan sistematika dan substansi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu dan kabupaten/kota sekitar.
4. memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
5. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2016-2021;
6. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
7. menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



		Halaman
	DAFTAR ISI	1
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan	I-9
	1.5 Maksud dan Tujuan	I-11
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
	2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-23
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-47
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-14
	3.3 Kerangka Pendanaan	III-14
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
	4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.2 Isu-Isu Strategis	IV-14
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
	5.1 Visi	V-1
	5.2 Misi	V-3
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V-4
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
	6.1 Strategi	VI-3
	6.2 Arah Kebijakan	VI-12
	6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	VI-21
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII – 1
BAB XI	PENUTUP	IX-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kapuas Hulu yang sejak tahun 1953 resmi menjadi salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat, dibentuk dengan Undang-Undang darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat. Gagasan dan konsep pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi semenjak tahun 2003 memiliki arti yang cukup penting, dimana sekitar 55,61 persen wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah konservasi yang memegang peranan penting sebagai wilayah yang berfungsi melindungi wilayah lainnya. Oleh karena itu perlunya perencanaan pembangunan yang matang dan komperhensif agar pembangunan kelak tidak hanya mementingkan ekonomi jangka pendek semata tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak hasil-hasil pembangunan yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu menurun. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Kabupaten Kapuas Hulu kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Kabupaten Kapuas Hulu pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat di masa yang akan datang. Pemahaman yang demikian dijamin melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk pelibatan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat.

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten



Kapuas Hulu sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus menyusun RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

Sejak ditetapkan pada Tanggal 16 Agustus 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan 2017. RPJMD juga akan memasuki perencanaan tahun ke-kedua (RKPD 2018) yang segera akan dilaksanakan melalui APBD tahun 2018 untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV 2016 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021.

Alasan utama perlunya dilakukan perubahan RPJMD adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dengan kebijakan pembangunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis. Disamping itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diamanatkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hal tersebut perlunya adanya penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Sesuai pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
- b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;



- c) Terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional); dan atau
- d) Merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional).

Secara ringkas, Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021

BAB PERDA No. 4 Tahun 2016	PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS HULU 2016-2021
BAB I	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan PERUBAHAN
	<ul style="list-style-type: none">• Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk
BAB II	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2015 dan/atau 2016
BAB III	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2018-2021
BAB IV	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Menganalisis/memasukkan RPJMN 2015-2019
	<ul style="list-style-type: none">• Menyelaraskan dengan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu
	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui isu strategis
BAB V	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan indikator tujuan yang menjadi indikator IKU daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD
	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan keterkaitan IKU Perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
BAB VI	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman arah kebijakan tahun 2018 - 2021
	<ul style="list-style-type: none">• Menambahkan keterkaitan antara nawacita dan prioritas pembangunan daerah
BAB VII	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman program pembangunan daerah tahun 2018 - 2021
	<ul style="list-style-type: none">• Perbaikan indikator dan target program RPJMD



BAB PERDA No. 4 Tahun 2016	PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS HULU 2016-2021
	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui program, indikator, target dan pagu tahun 2018 - 2021
BAB VIII	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan program prioritas perangkat daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui indikator dan target kinerja daerah

Penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu kini dan masa yang akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten pada sisa periode RPJMD. Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memerhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2017 dimana masih tersisa empat periode RKPD didalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2018 – 2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);



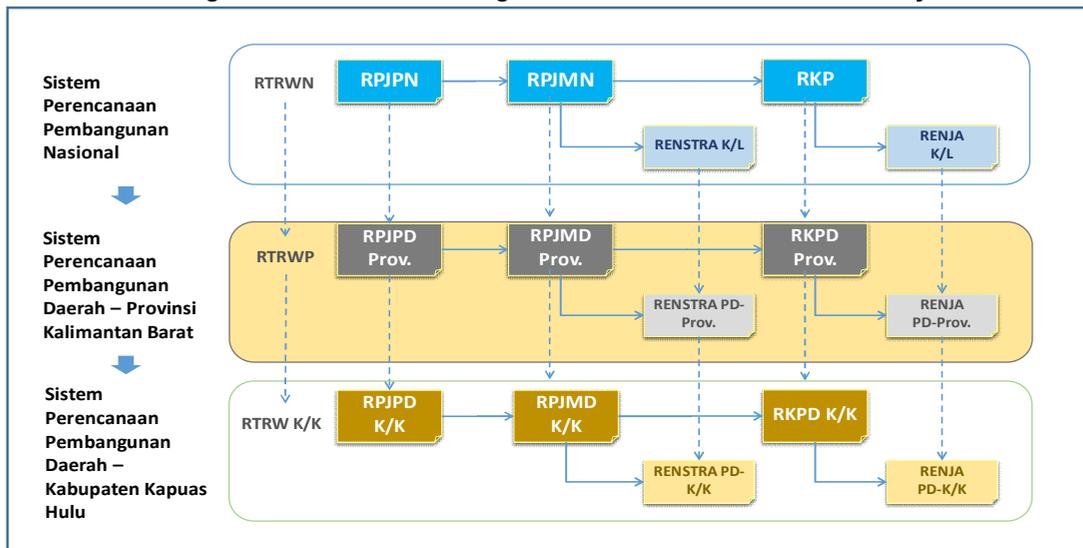
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842,)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPJMD bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPJMD Kapuas Hulu merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk didalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain berlandaskan dokumen RPJMN dan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu 2005 – 2025 tahap ke-dua. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2010 - 2015 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Bupati. Secara substantif, isi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 menjadi **Kabupaten Kapuas Hulu yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan** sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kabupaten Kapuas Hulu

Renstra OPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan *gradasi* dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Bupati bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang



harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRWD Kabupaten Kapuas Hulu, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu, strategi, dan program prioritas pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJMN periode berikutnya menjadi sumber acuan.



Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Barat sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD ini maka arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode berikutnya menjadi sumber acuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 tidak jauh berbeda dengan rumusan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang penyajiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Namun konten-konten dari sistematika penulisan perubahan RPJMD disempurnakan dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Perubahan menekankan pada penjelasan alasan formil dan materiil mengapa perubahan RPJMD ini dilakukan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Perubahan menekankan pada analisis kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, sesuai ketersediaan data.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Perubahan akan menekankan pada analisis realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan tahun 2012, 2013, 2014, 2015,



2016 dan prediksinya sampai dengan tahun 2021. Alokasi pendanaan pembangunan dalam lima tahun terakhir dan kapasitas riil di sisa waktu empat tahun sampai akhir periode RPJMD menjadi sandaran penting untuk menentukan (kembali) fokus atau prioritas pembangunan tahun 2021.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional). Perubahan menekankan pada analisis isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu dewasa ini dengan memerhatikan isu dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi maupun pembangunan global internasional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi bupati ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Perubahan menekankan pada penajaman dan penentuan target sasaran pembangunan yang lebih realistis dapat dicapai sesuai kondisi riil capaian pembangunan dan kemampuan pendanaan keuangan daerah serta menambahkan adanya indikator tujuan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama periode pelaksanaan pembangunan. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. Perubahan RPJMD lebih menekankan pada arah kebijakan untuk sisa periode kebijakan sebagai dasar penentuan kebijakan pada RKPD Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta pagu anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021, penanggungjawab bidang urusan/program Perangkat Daerah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terbaru.



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah pada realisasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Perubahan dilakukan dengan memperbaiki indikator dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dan/atau 2016 dan prediksinya sampai dengan tahun 2021.

BAB IX PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan isu strategis pembangunan paling *update*. Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Perbaiki sistematika dan substansi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu dan kabupaten/kota sekitar.
4. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2016-2021.
6. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu; serta
7. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah



agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sejarah pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Maka pada tanggal 13 Januari 1953 terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan Ibu Kota Putussibau. Bupati pertama yang menjabat adalah JC. Oevang Oeray (1951 – 1955), berikutnya dilanjutkan oleh Anang Adrak (1955 – 1956).

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Kabupaten terletak di Putussibau yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 842 Km, lewat jalan darat sejauh 657 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak melalui bandar Udara Pangsuma. Memiliki luas wilayah 29.842 Km² dan berpenduduk 238.797 pada Tahun 2017. Hutan di Wilayah Kesatuan Pemagku Hutan Putussibau dan Semitau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran dan kayu indah. Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana (arowana) dan ulanguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu sungai Kapuas, Embaloh, Mendalam dan Sibau dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan dan baung.

Analisis tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, yang tersaji sebagai berikut :

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk memahami kondisi atau gambaran umum daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Adapun, aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.



2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

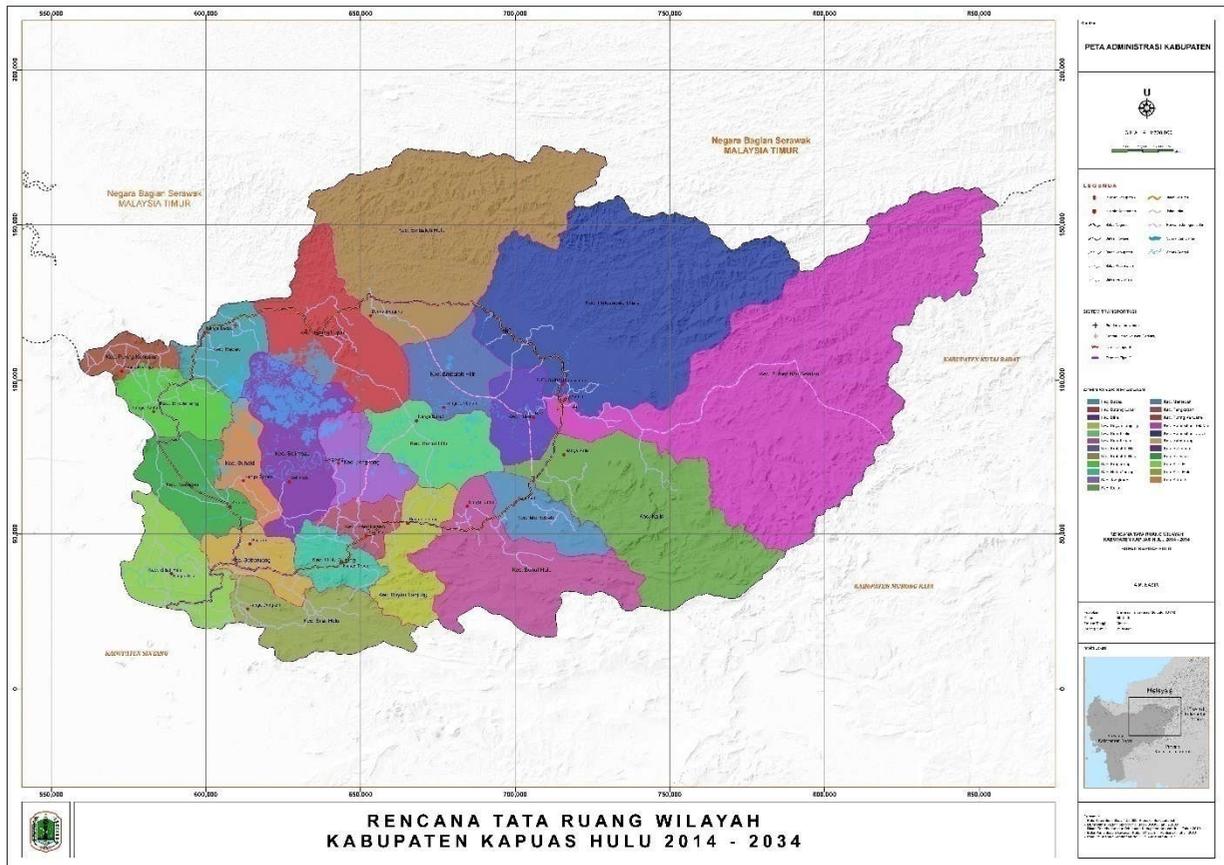
a. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 Km² atau mencakup 20.33 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan Kabupaten terluas setelah Kabupaten Ketapang, yang secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 703 Dusun. Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0,5° Lintang Utara sampai 1,4° Lintang Selatan dan di antara 111,40° sampai 114,10° Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sintang.



Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Perda No 1 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Kapuas Hulu

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 390.000 Ha (± 3.900 km²) merupakan daerah perairan atau tergenang (13,7 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas $\pm 2.594.200$ ha (± 25.942 km²) merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 1.677.601 ha atau $\pm 56,21$ % merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Taman Nasional Betung Kerihun : 816.693,40 ha
2. Taman Nasional Danau Sentarum : 127.393,4 ha
3. Hutan Lindung : 790.444,33 ha

b. Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas yang memiliki beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya seperti Sungai Embaloh, yang berhulu di bagian utara, Sungai Mandai, selain itu terdapat 8 anak sungai lainnya yang penting di mana peranannya sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari Kabupaten ke Kota dan Kecamatan. Dataran-dataran di sekitar perbatasan DAS ini dianggap sebagai suatu zona



sumber batubara dan minyak bumi. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari dataran rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relatif ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu keadaan topografinya bervariasi dari sistem dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Bentuk permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2% - 15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15% - 40%.

c. Iklim

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama.

Jumlah curah hujan adalah ukuran jumlah curahan air yang turun/keluar dari awan yang mencapai bumi dinyatakan dengan mm (milimeter), jumlah curah hujan 1 mm adalah ketinggian air hujan yang



terkumpul dalam tempat yang datar tidak meresap, tidak menguap, tidak mengalir artinya pada setiap 1 m² lapisan tanah dengan jumlah curah hujan 1 mm mempunyai volume 1 liter.

Jumlah curah hujan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi dalam satu Tahun berkisar antara 3.300 mm sampai 5.000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 perTahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

Di Kapuas Hulu hanya dikenal dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah Tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Pangsuma Tahun 2017 adalah 27°C. Suhu minimum terjadi pada bulan Februari dan Maret (21,0°C) dan suhu maksimum pada bulan Juli (35,4°C). Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang ± 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Selain sungai tersebut, terdapat delapan anak sungai yang sangat penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan transportasi barang dan penumpang dari Ibu Kota Kabupaten ke kota-kota Kecamatan di daerah pedalaman dan sebaliknya.

Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban (basin) dan Danau Oxbow di daerah- daerah meander sungai. Danau - danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di beberapa wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh HiLir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau. Keberadaan danau tersebut sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.

e. Bencana Alam

Bencana Alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Pada umumnya bencana alam terjadi karena adanya perubahan pada alam, baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Namun, beberapa peristiwa bencana alam terjadi karena ada faktor campur tangan manusia. Adapun bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah



banjir, tanah longsor dan kebakaran. Namun bencana alam yang sering terjadi adalah banjir dapat dilihat pada tabel 2.1. Banjir terbesar terjadi pada Tahun 2013 berjumlah 12.410 KK sedangkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan berjumlah 2.614 KK. Hal ini terjadi karena sudah ada penanganan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kecamatan – kecamatan yang berdataran rendah dengan membuat *drainase*, membuat bendungan dan sistem kelola tata ruang yang relatif baik.

Tabel 2.1
Jumlah Korban Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Banjir (KK)	Tanah Longsor (KK)	Kebakaran (KK)	Jumlah Korban (jiwa)
1	Silat Hilir	228	-	-	-
2	Silat Hulu	-	-	-	-
3	Hulu Gurung	-	-	-	-
4	Bunut Hulu	-	-	-	-
5	Mentebah	-	-	2	-
6	Bika	151	-	1	-
7	Kalis	-	-	-	-
8	Putussibau Selatan	-	-	26	1
9	Embaloh Hilir	150	-	-	-
10	Bunut Hilir	223	-	-	-
11	Boyan Tanjung	-	-	-	-
12	Pengkadan	-	-	-	-
13	Jongkong	315	-	-	-
14	Selimbau	330	-	-	-
15	Suhaid	315	-	-	-
16	Seberuang	-	-	1	-
17	Semitau	155	-	-	-
18	Empanang	-	-	1	-
19	Puring Kencana	-	-	-	-
20	Badau	298	-	-	-
21	Batang Lupar	319	-	-	-
22	Embaloh Hulu	130	-	-	-
23	Putussibau Utara	-	5	2	-
Jumlah	2017	2.614	5	33	1
	2016	5.169	104	13	-
	2015	13	14	18	-
	2014	78	-	245	-
	2013	12.410	30	2	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



2.1.2. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi yang didukung oleh letak geografis seperti perbukitan, pegunungan dan wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas yang terhampar luas. Dari sekian potensi yang sudah ada maupun yang bisa dikembangkan lebih prospektif antara lain sebagai berikut:

1. Perkebunan

Di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikembangkannya berbagai komoditi perkebunan, antara lain: karet, kelapa, kopi, lada, coklat (kakao), kapuk, tebu, aren/enau, pinang. Tanaman produktif untuk komoditi perkebunan secara umum menunjukkan angka yang bervariasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut::

Tabel 2.2
Perbandingan Luas Areal dan Produksi Perkebunan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No	Komoditi Tanaman Perkebunan	Luas Areal	Produksi / Tahun	Satuan
1	Kelapa Sawit	53.316 Ha	85.176	Ton
2	Karet	49.310 Ha	16.948	Ton
3	Kakao	245 Ha	54	Ton
4	Kelapa	140 Ha	42	Ton
5	Lada	37 Ha	11	Ton
6	Aren	112 Ha	7	Ton
7	Kopi	25 Ha	5	Ton
8	Tebu	14 Ha	2	Ton
9	Kapuk	9 Ha	0,5	Ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Komoditas utama sektor perkebunan adalah kelapa sawit. Kelapa Sawit dengan Produksi sebesar 85.176 ton dengan luas areal 53.316 ha hasil ini meningkat dari Tahun 2016 yang hanya mencapai 60.560 ton dengan luas areal tanaman menghasilkan 37.367 ha. Meningkatnya produksi sawit karena bertambahnya areal luas penanaman perkebunan, banyaknya tenaga kerja, pengaruh faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

2. Pertanian

Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah cukup luas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan. Adapun jumlah produksi komoditi tanaman pangan sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perbandingan Luas Areal Panen dan Produksi Pertanian
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No	Jenis Komoditi Tanaman Pangan	Luas Areal Panen	Produksi	Satuan
1	Padi	23.147 Ha	60.510	Ton
2	Jagung	330 Ha	244	Ton
3	Kacang Tanah	17 Ha	18,19	Ton
4	Kacang Hijau	1 Ha	1	Ton
5	Kedelai	5 Ha	4	Ton
6	Ubi Kayu	362 Ha	7.287	Ton
7	Ubi Jalar	97,4 Ha	838	Ton
	Jumlah	23.959,40 Ha	68.902	Ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan rata-rata hasil produksi beberapa komoditas tanaman pangan yaitu pada komoditas padi memiliki nilai produksi yang paling banyak sebesar 60.510 ton. Selain itu juga diikuti oleh tanaman ubi kayu dengan jumlah produksi sebesar 7.287 ton dan memiliki luas serta diikuti oleh komoditi unggulan lainnya. Data ini memberikan gambaran bahwa tanaman padi sawah bukan sawah masih mendominasi sektor pertanian. Untuk Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kapuas Hulu diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

3. Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu tujuan (destinasi) wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan alam asli pulau Kalimantan dan kebudayaan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kawasan Sentarum dan sekitarnya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ke-24 dari 88 kawasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2011 – 2015. Untuk penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Sentarum dilakukan peningkatan jalan poros desa ruas Lanjak - Kedungkang sepanjang 17 kilometer.

Selain itu ada juga wisata Dusun Meliau destinasi yang paling diminati yakni pengamatan orangutan, memancing ikan serta penginapan terdapat 11 kamar di rumah adat dayak yang dijadikan homestay. Keunikan tempat tinggal di rumah betang dan penyediaan makanan khas setempat menjadikan sensasi tersendiri bagi wisatawan yang datang.



2.1.3. Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Keadaan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, diperkirakan sebanyak 238.797 orang, yang terdiri dari 122.937 jiwa penduduk laki-laki (51,48%) dan 115.860 jiwa penduduk perempuan (48,52%) serta dengan sex ratio sebesar 106,11%.

Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan Penduduk	Sek Ratio
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	Putussibau utara	12.926	12.358	25.284	5,54	104,60%
2.	Bika	2.323	2.192	4.515	9,29	105,98%
3.	Embaloh hilir	2.911	2.754	5.665	8,23	105,70%
4.	Embaloh hulu	2.513	2.408	4.921	1,38	104,36%
5.	Bunut hilir	4.071	4.050	8.121	9,56	100,52%
6.	Bunut hulu	7.069	6.565	13.634	7,84	107,68%
7.	Jongkong	5.328	5.186	10.514	17,83	102,74%
8.	Hulu gurung	6.749	6.427	13.176	29,77	105,01%
9.	Selimbau	6.528	6.238	12.766	10,57	104,65%
10.	Semitau	4.433	4.160	8.593	10,87	106,56%
11.	Seberuang	5.353	5.025	10.378	20,97	106,53%
12.	Batang lupar	2.689	2.639	5.328	3,65	101,89%
13.	Empanang	1.744	1.644	3.388	5,41	106,08%
14.	Badau	3.126	2.989	6.115	10,66	104,58%
15.	Silat hilir	9.741	8.948	18.689	20,88	108,86%
16.	Silat hulu	5.849	5.409	11.258	11,28	108,13%
17.	Putussibau selatan	10.884	10.272	21.156	3,33	105,96%
18.	Kalis	6.890	6.335	13.225	5,25	108,76%
19.	Boyan tanjung	6.249	5.719	11.968	16,89	109,27%
20.	Mentebah	5.202	4.712	9.914	17,34	110,40%
21.	Pengkadan	4.685	4.481	9.166	29,07	104,55%
22.	Suhaid	4.474	4.269	8.743	20,37	104,80%
23.	Puring kencana	1.200	1.080	2.280	7,73	111,11%
	JUMLAH	122.937	115.860	238.797	7,66	106,11%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Semester II Tahun 2017

Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842 km², atau 2.984,200 ha, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 7,66 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat.



2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat serta fokus seni budaya dan olah raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kapuas Hulu. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pendapatan regional hingga tingkat kemakmuran masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan nasional.

a. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

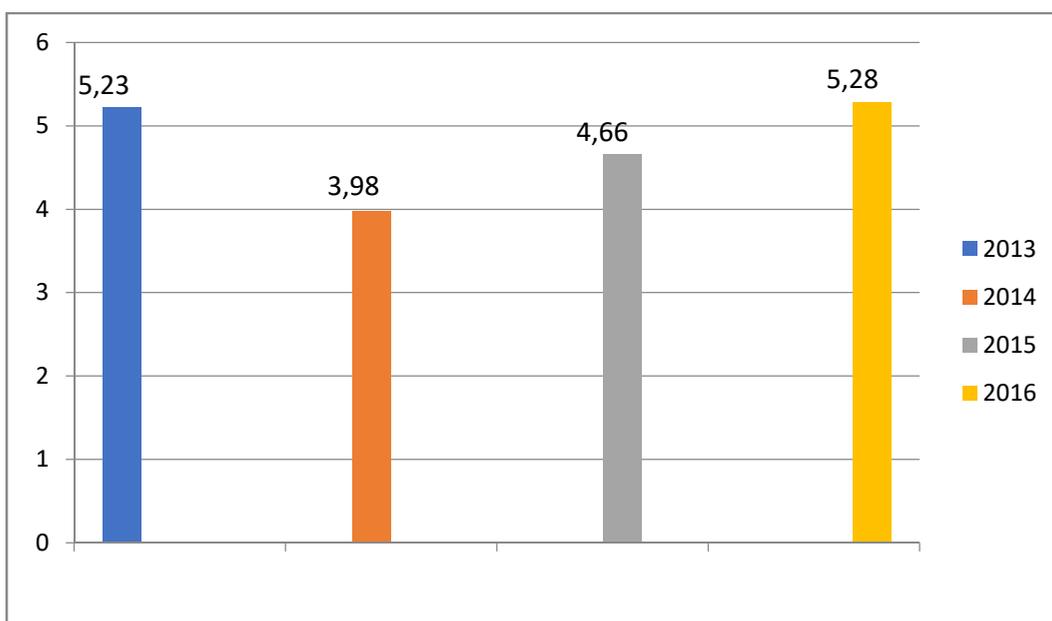
Kondisi perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 mengalami kenaikan, adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 tercatat 5,39 persen naik kurang lebih 0,11 poin dibanding pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 yang mencapai 5,28 persen. Ini merupakan indikasi bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan dibanding Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten sedikit berada di atas angka Provinsi. Pada Tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat mencapai 5,17 persen, sedangkan angka Kabupaten Kapuas Hulu tercatat 5,28 persen. Pada Tahun 2017, sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan yang relatif bervariasi.

Peranan kategori pertanian pada Tahun 2017 didominasi oleh subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 15,64 persen. Kontribusi terbesar kedua di kategori pertanian disumbangkan oleh sub kategori perkebunan tahunan sebesar 9,12 persen, disusul sub kategori kehutanan dan penebangan kayu sebesar 4,07 persen. Sektor Konstruksi menempati urutan kedua pada



pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu. Kontribusi sektor ini dari Tahun ke Tahun menunjukkan trend yang meningkat. Pada Tahun 2016 tercatat 22,06 persen, kemudian meningkat menjadi 22,22 persen pada Tahun 2017. Pada posisi ketiga adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi sektor ini berfluktuasi tapi relatif meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016, kontribusi sektor ini tercatat 11,71 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 11,34 persen pada Tahun 2017.

Gambar 1. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu 2013 – 2016



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2017

b. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Inflasi yang tinggi berarti juga terjadinya perubahan harga yang tajam dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan indeks harga implisit PDRB dapat dilihat besarnya laju inflasi pada tingkat produsen secara umum. Tingkat harga pada level produsen secara umum dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Hanya peningkatan setiap Tahunnya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 cenderung berfluktuasi persentasenya. Pada tahun 2016 tingkat inflasi atas dasar harga produsen secara umum turun sebesar 0,53 poin. Secara umum, laju inflasi atas dasar harga produsen Kabupaten Kapuas Hulu sedikit lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi atas dasar harga produsen provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Pada tahun 2017, laju inflasi Provinsi Kalimantan Barat tercatat 4,56 persen.



c. Pendapatan Regional

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di perlukan suatu alat ukur. Selain itu, alat ukur juga di perlukan sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (*Gross Domestic Regional Product / GDRP*) dari Tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2014 – 2017

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1.574.049,2	1.651.026,3	1.780.209,8	1.954.590,8
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian / <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agricultural Services</i>	1.046.899,3	1.109.433,3	1.213.722,9	1.357.164,2
a. Tanaman Pangan	184.188,6	202.445,7	227.812,4	254.784,5
b. Tanaman Hortikultura Semusim	35.569,0	36.851,1	37.956,5	42.009,8
c. Perkebunan Semusim	31,6	34,2	37,1	40,9
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	91.824,4	100.501,6	107.526,5	122.769,9
e. Perkebunan Tahunan	620.807,9	640.682,3	699.826,2	791.048,1
f. Peternakan	110.266,0	124.186,8	135.616,6	141.168,5
g. Jasa Pertanian dan Perkebunan	4.211,7	4.731,7	4.947,6	5.342,5
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu / <i>Forestry and Logging</i>	332.518,3	331.309,3	340.232,2	355.195,0
3. Perikanan / <i>Fishery</i>	194.631,6	210.283,6	226.254,7	242.231,6
B. Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	482.075,5	562.359,4	623.874,4	705.553,6
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi / <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and geothermal</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Pertambangan Batubara dan Lignit / <i>Coal and Lignite Mining</i>	64.380,2	58.965,3	49.616,3	47.636,4
3. Pertambangan Biji Logam/ <i>Iron Ore Mining</i>	33.922,5	36.276,3	42.719,3	44.700,5
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya / <i>Other Mining and Quarrying</i>	383.772,9	467.117,8	527.318,8	613.216,6
C. Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	705.577,8	772.741,5	865.518,6	966.528,1
1. Industri Batubara dan Penggilingan Migas / <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Industri Makanan dan Minuman / <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	544.944,8	603.679,4	685.280,4	0,0
3. Industri Pengolahan Tembakau / <i>Manufacture of Tobacco Product</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi / <i>Manufacture of Textiles and Wearing</i>	8.047,3	8.535,2	9.502,0	774.984,5
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki / <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya / <i>Manufacture of Wood and of Product of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials</i>	89.707,2	93.906,6	100.960,0	10.332,0
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman / <i>Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media</i>	1.105,6	1.194,6	1.232,3	1.294,0
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional / <i>Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products</i>	43,6	44,6	45,3	49,5
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik / <i>Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Product</i>	500,2	496,5	529,2	556,1
10. Industri Barang Galian Bukan Logam / <i>Manufacture of Other Non-Metallic</i>	6.176,1	6.802,3	7.427,7	7.783,3
11. Industri Logam Dasar / <i>Manufacture of Basic Metals</i>	3.429,0	3.536,3	4.278,4	4.396,4
12. Industri Barang Logam; Komputer; Barang Elektronik, Optik; dan / <i>Manufacture of</i>	18.172,4	19.161,6	19.783,3	21.334,1
13. Industri Mesin dan Perlengkapan / <i>Manufacture of Machinery and</i>	607,8	636,2	681,6	709,5
14. Industri Alat Angkutan / <i>Manufacture of Transport Equipment</i>	4.391,6	4.413,4	4.817,2	5.014,6
15. Industri Furniture / <i>Manufacture of Furniture</i>	11.743,4	12.432,0	12.438,8	12.571,4
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin	16.708,8	17.802,7	18.542,4	19.181,0
D. Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	327,9	358,1	438,9	493,4
1. Ketenagalistrikan / <i>Electricity</i>	219,3	245,5	318,4	365,7
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es / <i>Manufacture of Gas and Production of Ice</i>	108,5	112,6	120,4	127,7



Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water Supply	6.739,9	7.215,7	7.424,8	8.238,4
F. Konstruksi / Construction	1.287.500,9	1.485.402,3	1.730.145,3	1.928.700,0
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and	762.315,4	843.595,1	918.659,6	984.522,4
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya / Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	315.863,4	347.039,4	371.952,9	395.050,1
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycle	446.452,0	496.555,8	546.706,7	589.472,3
H. Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	93.949,5	102.804,6	115.139,8	125.928,3
1. Angkutan Rel / Railways Transport	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Angkutan Darat / Land Transport	66.334,6	72.950,8	81.495,0	88.414,9
3. Angkutan Laut / Sea Transport	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan / River, Lake, and Ferry	13.389,7	14.379,0	15.657,8	16.779,0
5. Angkutan Udara / Air Transport	4.392,9	5.179,0	6.373,2	8.255,9
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir / Warehousing	9.832,4	10.295,8	11.513,8	12.478,5
I. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum / Accomodation and Food Service	124.902,5	135.249,7	150.369,1	166.034,4
1. Penyedia Akomodasi / Accomodation	34.513,7	37.660,8	40.110,3	43.735,7
2. Penyedia Makan Minum / Food and Beverage Service Activities	90.388,8	97.588,9	110.258,8	122.298,7
J. Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	191.969,2	216.320,4	239.241,6	283.305,3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	115.806,3	124.945,2	135.029,1	146.241,5
1. Jasa Perantara Keuangan / Financial Intermediary Service	15.446,1	16.814,0	19.526,2	22.939,9
2. Asuransi dan Dana Pensiun / Insurance and Pension Fund	34.625,1	37.104,6	39.409,1	42.878,8
3. Jasa Keuangan Lainnya / Other Financial Service	55.362,7	59.796,7	63.918,4	67.559,1
4. Jasa Penunjang Keuangan / Financial Supporting Service	10.372,5	11.229,9	12.175,4	12.863,7
L. Real Estate / Real Estate Activities	165.769,1	181.477,2	195.766,3	211.923,1
M,N. Jasa Perusahaan / Business Activities	34.642,9	38.085,5	40.899,7	44.089,8
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence Compulsory Social Security	401.780,9	470.695,3	538.585,6	614.505,5
P. Jasa Pendidikan / Education	257.970,1	275.828,5	296.422,9	315.025,3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	115.755,9	127.522,2	136.633,4	147.237,9
R, S, T, U. Jasa Lainnya / Other Services Activities	58.655,2	63.750,2	68.132,3	75.206,1
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product	6.379.788,3	7.059.376,6	7.842.491,2	8.678.123,8

Keterangan *) : Angka Sementara / Preliminary Figures

***) : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber / Source : BPS Kabupaten Kapuas Hulu / BPS – Statistics of Kapuas Hulu Regency

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014–2017

Laporan Usaha/Industry	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	1.309.141,1	1.326.109,5	1.382.621,0	1.448.148,7
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian / Agriculture, Livestock, Hunting and Agricultural Services	868.406,1	891.696,9	944.396,2	1.001.926,9
a. Tanaman Pangan	125.204,3	124.247,1	134.374,6	146.675,5
b. Tanaman Hortikultura Semusim	31.220,8	31.663,2	32.345,4	34.222,0
c. Perkebunan Semusim	28,3	29,1	28,8	29,8
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	77.062,6	79.582,4	82.044,6	89.387,6
e. Perkebunan Tahunan	538.793,4	555.725,0	588.299,7	620.400,6
f. Peternakan	92.564,9	96.714,2	103.523,0	107.258,7
g. Jasa Pertanian dan Perkebunan	3.531,7	3.736,1	3.780,1	3.952,7
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu / Forestry and Logging	266.656,6	256.240,6	254.512,8	253.947,7
3. Perikanan / Fishery	174.078,3	178.172,1	183.712,0	192.274,1
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	388.157,0	410.422,2	435.650,2	459.850,6
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi / Crude	0,0	0,0	0,0	0,0



Laporan Usaha/Industry	2014	2015	2016*)	2017**)
<i>Petroleum, Natural Gas, and geothermal</i>				
2. Pertambangan Batubara dan Lignit / <i>Coal and Lignite Mining</i>	54.292,2	51.987,9	47.120,3	43.576,1
3. Pertambangan Bijih Logam / <i>Iron Ore Mining</i>	28.053,7	28.987,2	33.249,4	32.808,8
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya / <i>Other Mining and Quarrying</i>	305.835,6	329.447,2	355.280,4	383.465,7
C. Industri Pengolahan / Manufacturing	599.101,7	626.419,5	652.738,8	690.719,3
1. Industri Batubara dan Penggilingan Migas/ <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Industri Makanan dan Minuman / <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	466.574,8	492.677,1	515.461,1	550.036,4
3. Industri Pengolahan Tembakau / <i>Manufacture of Tobacco Product</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi / <i>Manufacture of Textiles; and Wearing</i>	6.679,9	6.901,7	7.255,2	7.594,9
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki / <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya / <i>Manufacture of Wood and of Product of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials</i>	73.498,0	72.831,6	74.778,1	77.100,0
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman / <i>Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media</i>	943,0	974,9	970,1	1.001,1
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional / <i>Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products</i>	37,2	37,6	37,9	39,2
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ <i>Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Product</i>	417,9	412,9	416,4	426,1
10. Industri Barang Galian Bukan Logam / <i>Manufacture of Other Non-Metallic</i>	5.220,7	5.446,2	5.629,5	5.717,5
11. Industri Logam Dasar / <i>Manufacture of Basic Metals</i>	2.859,0	2.937,7	3.319,5	3.343,1
12. Industri Barang Logam; Komputer; Barang Elektronik, Optik; dan / <i>Manufacture of</i>	14.349,6	15.468,0	15.541,2	16.022,8
13. Industri Mesin dan Perlengkapan / <i>Manufacture of Machinery and</i>	494,9	507,4	522,7	528,3
14. Industri Alat Angkutan / <i>Manufacture of Transport Equipment</i>	3.588,6	3.603,1	3.787,7	3.835,4
15. Industri Furniture/ <i>Manufacture of Furniture</i>	9.687,4	9.726,2	9.658,4	9.612,6
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin	14.676,0	14.895,0	15.361,1	15.461,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	424,0	434,3	485,7	496,1
1. Ketenagalistrikan / <i>Electricity</i>	327,9	335,4	381,6	390,1
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es / <i>Manufacture of Gas and Production of Ice</i>	96,0	98,8	104,1	106,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water Supply,	6.348,7	6.491,3	6.798,2	7.119,0
F. Konstruksi / Construction	914.184,2	982.164,0	1.057.392,8	1.116.900,7
E. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and	602.599,8	635.944,4	667.812,9	694.217,7
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya / <i>Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	229.581,6	238.990,1	247.983,7	255.550,3
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycle</i>	373.018,1	396.954,3	419.829,1	438.667,4
H. Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	76.221,0	79.982,8	84.399,2	88.873,2
1. Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Angkutan Darat / <i>Land Transport</i>	53.438,1	56.371,3	58.990,3	61.885,2
3. Angkutan Laut / <i>Sea Transport</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan / <i>River, Lake, and Ferry</i>	11.414,4	11.768,2	12.384,0	12.877,0
5. Angkutan Udara / <i>Air Transport</i>	3.454,5	3.675,3	4.291,1	4.969,8
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan/ Pos dan Kurir / <i>Warehousing</i>	7.914,0	8.168,0	8.733,9	9.141,2
I. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum / Accomodation and Food Service	100.866,1	105.388,6	110.113,3	116.220,7
1. Penyedia Akomodasi / <i>Accommodation</i>	27.712,2	29.056,2	29.965,6	30.942,0
2. Penyedia Makan Minum / <i>Food and Beverage Service Activities</i>	73.153,9	76.332,4	80.147,7	85.278,7
J. Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	178.470,4	192.022,5	208.113,3	240.825,3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	94.901,4	99.635,6	105.732,8	110.978,3
1. Jasa Perantara Keuangan / <i>Financial Intermediary Service</i>	12.668,4	13.538,3	15.694,6	17.173,9
2. Asuransi dan Dana Pensiun Insurance and Pension Fund	28.382,4	29.760,4	31.007,3	32.676,1
3. Jasa Keuangan Lainnya / <i>Other Financial Service</i>	45.028,6	46.992,0	49.145,5	50.920,1



Laporan Usaha/Industry	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
4. Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	8.822,1	9.345,0	9.885,3	10.208,1
L. Real Estate / Real Estate Activities	134.613,9	140.279,8	143.572,8	149.805,4
M. Jasa Perusahaan / Business Activities	28.314,4	29.489,4	30.344,1	31.527,1
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	280.520,4	299.405,4	319.479,0	335.282,7
P. Jasa Pendidikan / Education	211.565,0	219.595,4	223.197,2	229.626,8
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	90.304,6	95.539,4	98.478,2	103.276,8
R, S, T, U. Jasa Lainnya / Other Services Activities	49.584,2	51.786,3	53.817,8	57.874,6
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product	5.065.317,7	5.301.109,3	5.580.747,2	5.881.743,1

Keterangan *) : Angka Sementara / Preliminary Figures

**) : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber / Source : BPS Kabupaten Kapuas Hulu / BPS – Statistics of Kapuas Hulu Regency

Tabel 2.7
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014-2017

Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	24,67	23,39	22,70	22,52
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian / Agriculture, Livestock, Hunting and Agricultural Services	16,41	15,72	15,48	15,64
a. Tanaman Pangan	2,89	2,87	2,90	2,94
b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,56	0,52	0,48	0,48
c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,44	1,42	1,37	1,41
e. Perkebunan Tahunan	9,73	9,08	8,92	9,12
f. Peternakan	1,73	1,76	1,73	1,63
g. Jasa Pertanian dan Perkebunan	0,07	0,07	0,06	0,06
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu / Forestry and Logging	5,21	4,69	4,34	4,09
3. Perikanan / Fishery	3,05	2,98	2,88	2,79
B. Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	7,56	7,97	7,96	8,13
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi / Crude Petroleum, Natural Gas, and geothermal	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pertambangan Batubara dan Lignit / Coal and Lignite Mining	1,01	0,84	0,63	0,55
3. Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0,53	0,51	0,54	0,52
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya / Other Mining and Quarrying	6,02	6,62	6,78	7,07
C. Industri Pengolahan / Manufacturing	11,06	10,95	11,04	11,14
1. Industri Batubara dan Penggilingan Migas / Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Industri Makanan dan Minuman / Manufacture of Food Products and Beverages	8,54	8,55	8,74	8,93
3. Industri Pengolahan Tembakau / Manufacture of Tobacco Product	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi / Manufacture of Textiles and Wearing	0,13	0,12	0,12	0,12
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki / Manufacture of Leather and Related Products and Footwear	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya / Manufacture of Wood and of Product of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials	1,41	1,33	1,29	1,25
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman / Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	0,02	0,02	0,02	0,01
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional / Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik / Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Product	0,01	0,01	0,01	0,01
10. Industri Barang Galian Bukan Logam / Manufacture of Other Non-Metallic	0,10	0,10	0,09	0,09
11. Industri Logam Dasar / Manufacture of Basic Metals	0,05	0,05	0,05	0,05
12. Industri Barang Logam; Komputer; Barang Elektronik, Optik; dan / Manufacture of	0,28	0,28	0,25	0,25
13. Industri Mesin dan Perlengkapan / Manufacture of Machinery and	0,01	0,01	0,01	0,01
14. Industri Alat Angkutan / Manufacture of Transport Equipment	0,07	0,06	0,06	0,06



Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Industri Furniture / <i>Manufacture of Furniture</i>	0,18	0,17	0,16	0,14
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin	0,26	0,25	0,24	0,22
D. Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	0,01	0,01	0,01	0,01
1. Ketenagalistrikan / <i>Electricity</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es / <i>Manufacture of Gas and Production of Ice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply</i>	0,11	0,10	0,09	0,09
F. Konstruksi / <i>Construction</i>	20,18	21,04	22,06	22,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and</i>	11,95	11,95	11,71	11,34
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya / <i>Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,95	4,92	4,74	4,55
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycle</i>	7,00	7,03	6,97	6,79
H. Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	1,47	1,46	1,47	1,45
1. Angkutan Rel / <i>Railways Transport</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Darat / <i>Land Transport</i>	1,04	1,03	1,04	1,02
3. Angkutan Laut / <i>Sea Transport</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan / <i>River, Lake, and Ferry</i>	0,21	0,20	0,20	0,20
5. Angkutan Udara / <i>Air Transport</i>	0,07	0,07	0,08	0,10
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir / <i>Warehousing</i>	0,15	0,15	0,15	0,14
I. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service</i>	1,96	1,92	1,92	1,91
1. Penyedia Akomodasi / <i>Accommodation</i>	0,54	0,53	0,51	0,50
2. Penyedia Makan Minum / <i>Food and Beverage Service Activities</i>	1,42	1,38	1,41	1,41
J. Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	3,01	3,06	3,05	3,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,82	1,77	1,72	1,69
1. Jasa Perantara Keuangan / <i>Financial Intermediary Service</i>	0,24	0,24	0,25	0,26
2. Asuransi dan Dana Pensiun / <i>Insurance and Pension Fund</i>	0,54	0,53	0,50	0,49
3. Jasa Keuangan Lainnya / <i>Other Financial Service</i>	0,87	0,85	0,82	0,78
4. Jasa Penunjang Keuangan / <i>Financial Supporting Service</i>	0,16	0,16	0,16	0,15
L. Real Estate / <i>Real Estate Activities</i>	2,60	2,57	2,50	2,44
M,N. Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	0,54	0,54	0,52	0,51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence Compulsory Social Security</i>	6,30	6,67	6,87	7,08
P. Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	4,04	3,91	3,78	3,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,81	1,81	1,74	1,70
R, S, T, U. Jasa Lainnya / <i>Other Services Activities</i>	0,92	0,90	0,87	0,87
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan *) : Angka Sementara / *Preliminary Figures*

**) : Angka Sangat Sementara / *Very Preliminary Figures*

Sumber / *Source* : BPS Kabupaten Kapuas Hulu / BPS – *Statistics of Kapuas Hulu Regency*

d. Tingkat Kemakmuran Masyarakat

Salah satu cara untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat pendapatan perkapita di daerah tersebut. Pendapatan Per Kapita ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun. Nilai PDRB perkapita Kapuas Hulu pada periode 2013 sampai dengan periode 2017 menunjukkan trend yang terus naik. Pada Tahun 2016 nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 31,37 juta rupiah, sementara Tahun 2017 sebesar 34,03 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 2,66 juta rupiah (tabel 2.8).



Tabel 2.8
Produk Domestik Regional dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kapuas Hulu

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2013	2014	2015	2016	2017
- ADHB/ at current price	5.805	6.380	7.059	7.843	8.678
- ADHK/ at 2010 Constant Price	4.871	5.065	5.301	5.581	5.882
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
- ADHB/ at current price	24,6	26,58	28,7	31,37	34,03
- ADHK/ at 2010 Constant Price	20,64	20,1	21,55	22,32	23,07
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	9,76	8,07	7,94	9,33	8,48
Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (Thousand People)	236	240	246	250	255
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,02	1,02	1,03	1,02	1,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

e. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah (Tahun)), serta pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Tabel. 2.9
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2017
Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	71,94	71,94	71,94	71,95
Harapan Lama Sekolah	11,8	11,83	11,48	11,85
Rata-rata lama sekolah	6,65	7,00	7,01	7,02
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah PPP)	6.640	6.640	6.691	6.883
IPM	62,90	63,73	63,83	64,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

f. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita



perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2.10
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabuapten Kapuas Hulu Tahun 2014-2017

No	Tahun	GK(Rp/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan jiwa)	P0	P1	P2
1	2016	369.981	24,49	9,82	1,43	0,34
2	2017	384.275	23,96	9,45	1,28	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas garis kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 sebesar Rp. 384.275,00 perkapita perbulan, naik sebesar Rp 14.294,00 dari Tahun 2016 sebesar Rp. 369.981,00 perkapita perbulan. Secara absolut jumlah penduduk miskin pada Tahun 2017 mencapai 23,960 jiwa dibandingkan pada Tahun 2016 mencapai 24,490 jiwa menurun 530 jiwa atau menurun 2,21 %.

g. Ketenagakerjaan

Indonesia merupakan negara agraris, dimana Sektor Pertanian masih menjadi andalan rakyatnya sebagai mata pencarian. Berdasarkan hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS) Tahun 2015, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 86.108 jiwa atau sekitar 68,46 persen.

h. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda mempunyai peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan inventarisasi jumlah organisasi pemuda dan organisasi olah raga, serta telah melakukan even kepemudaan dan olah raga dapat diuraikan seperti di bawah ini :



Tabel 2.11
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olah raga
di Kabupaten Kapuas Hulu
(Keadaan per 31 Oktober 2017)

NO.	KECAMATAN	NAMA ORGANISASI	JUMLAH
1	Putussibau Utara	- FKPPi	1
		- Pemuda Pancasila	1
		- AMPI	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN Dan KWARCAB)	1
		- PMI	1
		- Pemuda Panca Marga	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Ansor	1
		- Pemuda Muhammadiyah	1
		- Orang Indonesia	1
		- PAC	1
		- PHUKAT'C	1
		- YVCI / Vixen Club	1
		- VESPA	1
2	Putussibau Selatan	- KNPI	1
		- Pemuda Pancasila	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Pemuda Ansor	1
		- Pemuda Melayu	1
3	Bika	Orang Muda Katolik	1
4	Kalis	- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
5	Mentebah	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
6	Boyan Tanjung	- Pemuda Pancasila	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
7	Pengkadan	- Pemuda Melayu	1
8	Hulu Gurung	- Pemuda Pancasila	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Pemuda Melayu	1
9	Seberuang	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
10	Semitau	- FKPPi	1
		- Pemuda Melayu	1
		- Pemuda Pancasila	1
11	Suhaid	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Pemuda Melayu	1
		- Pemuda Pancasila	1
		- Orang Muda Katolik	1
12	Selimbau	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1



NO.	KECAMATAN	NAMA ORGANISASI	JUMLAH
		- Pemuda Melayu	1
		- Pemuda Pancasila	1
		- Orang Muda Katolik	1
13	Jongkong	- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
		- Pemuda Pancasila	1
14	Bunut Hilir	- FKPPi	1
		- Pemuda Pancasila	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
15	Bunut Hulu	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
16	Embaloh Hilir	- Pemuda Pancasila	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
17	Embaloh Hulu	-Orang Muda Katolik	1
18	Batang Lupar	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
19	Badau	- Pemuda Pancasila	1
		- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
20	Empanang	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
21	Puring Kencana	- Orang Muda Katolik	1
22	Silat Hilir	- Gerakan Pramuka (KWARAN)	1
		- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
23	Silat Hulu	- Orang Muda Katolik	1
		- Pemuda Melayu	1
		JUMLAH	78

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



Tabel 2.12
Jumlah Kegiatan (Event) Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Kapuas Hulu
(Keadaan per 31 Oktober 2017)

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI
1.	Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)	Putussibau (Zona 1)
2.	Sosialisasi Pemuda	Semitau (Zona 2)
3.	Lomba LKBB dan Upacara Bendera	Putussibau
4	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemudaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)	Putussibau
5.	Kemah Bakti Pramuka	Putussibau

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

2.2.2. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Adapun seni budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel 2.13
Jenis Budaya Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	JENIS KESENIAN	ASAL BUDAYA (SUKU)	KETERANGAN
1	Gawak Nyape Tanah	Dayak Iban	Adat Tradisi
2	Gawak Kenyalang	Dayak Iban	Adat Tradisi
3	Gawak Kelingkang Panggan	Dayak Iban	Adat Tradisi
4	Gawak Kelingkang Tuah	Dayak Iban	Adat Tradisi
5	Gawak Tambak Bulu	Dayak Iban	Adat Tradisi
6	Gawak Mali Umai	Dayak Iban	Adat Tradisi
7	Gawak Timang Benih	Dayak Iban	Adat Tradisi
8	Gawak Sandau Ani	Dayak Iban	Seni Sastra
9	Gawak Kelingkang Benih	Dayak Iban	Seni Sastra
10	Bepantun	Dayak Iban	Seni Sastra
11	Nimang	Dayak Iban	Seni Sastra
12	Melandai	Dayak Iban	Seni Sastra
13	Ngua'	Dayak Iban	Seni Sastra
14	Mupu Kenyalang	Dayak Iban	Seni Sastra
15	Beramban	Dayak Iban	Seni Sastra
16	Beranak Ringin	Dayak Iban	Seni Sastra
17	Nusi Ensera	Dayak Iban	Seni Sastra



NO.	JENIS KESENIAN	ASAL BUDAYA (SUKU)	KETERANGAN
18	Pantun Bulan	Dayak Iban	Seni Sastra
19	Ngayun Anak	Dayak Iban	Seni Sastra
20	Gawai Raa Mamandung	Dayak Taman	Budaya Tradisi
21	Mamasi	Dayak Taman	Adat Tradisi
22	Menyambaang	Dayak Taman	Seni Sastra
23	Mulambu	Dayak Taman	Budaya Tradisi
24	Menimang	Dayak Taman	Seni Sastra Lisan
25	Pamolek Beok	Dayak Tamambaloh	Adat Tradisi
26	Baranangis	Dayak Tamambaloh	Adat Tradisi
27	Ngjyaan	Dayak Kayan	Seni Tradisi
28	Dayuung	Dayak Kayan	Seni Tradisi
29	Naik Dange	Dayak Kayan	Budaya Tradisi
30	Sejham Ningkau	Dayak Suaid	Budaya Tradisi
31	Jepin/Belangkah	Melayu	Tari Tradisi
32	Rodat-Hadrah	Melayu	Tari Tradisi
33	Betutur	Melayu	Seni Tradisi
34	Pantun	Melayu	Seni Tradisi
35	Besyair	Melayu	Seni Tradisi
36	Buang - buang	Melayu	Adat Tradisi
37	Tepung Tawar	Melayu	Adat Tradisi
38	Melamar	Melayu	Adat Tradisi
39	Antar Tunang	Melayu	Adat Tradisi
40	Mandi Berias Pengantin	Melayu	Adat Tradisi
41	Besurung	Melayu	Adat Tradisi
42	Arak-arakan Pengantin	Melayu	Adat Tradisi
43	Cucur Mawar	Melayu	Adat Tradisi
44	Selamat Mandi-mandi	Melayu	Adat Tradisi
45	Gunting Rambut	Melayu	Adat Tradisi
46	Turun Tanah	Melayu	Adat Tradisi
47	Beruding	Dayak Kantuk	Seni Tradisi
48	Bejandeh	Dayak Kantuk	Seni Tradisi
49	Betimang	Dayak Kantuk	Seni Tradisi
50	Makai Taun	Dayak Kantuk	Budaya Tradisi
51	Gawa' Batu	Dayak Kantuk	Budaya Tradisi
52	Adat Niri Karumah Panjae	Dayak Iban	Adat Tradisi
53	Tarian Tepin, Syair, Pantun, Qasidah, dan Hadrah	Suku Melalu	Upacara Adat
54	Dange	Suku Dayak Kayan Mendalam	Upacara Adat
55	Nike, Beni, Gawak Kenyalang, Gawak Nyape Tanah dan Neri Ke Rumah Painyai	Suku Dayak Iban	Upacara Adat
56	Gawak Batu, Bekali Tanah	Suku Melayu	Upacara Adat
57	Memindahkan Kuburan	Suku Dayak Taman	Upacara Adat
58	Tepung Tawar Pindah Rumah	Suku Melayu	Upacara Adat
59	Tari Jepin Manis	Suku Melayu	Tarian Tradisional



NO.	JENIS KESENIAN	ASAL BUDAYA (SUKU)	KETERANGAN
60	Tari Belangkah	Suku Melayu	Tarian Tradisional
61	Ngajat Perang	Suku Dayak Kayan	Tarian Tradisional
62	Ngajat Bersirang	Suku Dayak Kantuk	Tarian Tradisional
63	Ngajat Terima Tamu	Suku Dayak Iban	Tarian Tradisional
64	Malimongon	Suku Dayak Taman	Sastra Lisan
65	Bersanji	Suku Dayak Suruk	Sastra Lisan
66	Manjanang	Suku Dayak Tamambaloh	Sastra Lisan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.14
Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	R. Betang Melapi Patamuan	Melapi I	Putussibau Selatan	SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 212 Tahun 2012
2	R. Betang Lunsia Hilir	Lunsia Hilir	Putussibau Selatan	
3	Kawasan Neolitikum Nanga Balang	Nanga Balang	Putussibau Selatan	
4	R. Betang Semangkok	Ariung Mendalam	Putussibau Utara	
5	Rumah Mayat/Kelambu Semangkok	Ariung Mendalam	Putussibau Utara	
6	R. Betang Sungai Uluk Palin	Benua Tengah	Putussibau Utara	
7	R. Betang Benua Tengah	Benua Tengah	Putussibau Utara	
8	R. Betang Nanga Nyabau	Nanga Nyabau	Putussibau Utara	
9	R. Betang Sungai Utik	Batu Lintang	Embaloh Hulu	
10	R. Betang Bukung	Benua Martinus	Embaloh Hulu	
11	R. Betang Lunsia Hilir	Lunsia	Putussibau Selatan	
12	Masjid Baiturrahman Nanga Bunut	Bunut Tengah	Bunut Hilir	
13	Masjid Jami' At-Taqwa Selimbau	Desa Dalam	Selimbau	
14	Kawasan Anggrek Hitam Selimbau	Gudang Hulu	Selimbau	
15	Makan Kerajaan Selimbau	Gudang Hulu	Selimbau	
16	Gereja Santo Fidelis Sejiram	Sejiram	Seberuang	
17	Peninggalan Kerajaan Silat	Desa Pengeran	Silat Hilir	
18	Kuburan Bai Sari Amas Bale Polo Kayu	Melapi	Putussibau Selatan	
19	Kawasan Cagar Budaya	Pulau Majang	Badau	
20	Gudang Peluru	Sepandan	Batang Lupar	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik pada urusan pelayanan wajib dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.



2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Kapuas Hulu memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib dasar Pemerintah Kabupaten hingga saat ini.

a. Pendidikan

Dalam pembangunan pendidikan seluruh modal dasar pembangunan di daya gunakan, terutama penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.

Pada Tahun ajaran 2016/2017 jumlah Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu tercatat sebanyak 28 sekolah dan Jumlah Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 8 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 405 dan Madrasah Ibtidayah (MI) sebanyak 19 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 94 sekolah dan Madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 17 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 27 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 5 Sekolah, Madrasah Aliyah sebanyak 6 Sekolah. Sedangkan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2 yaitu Politeknik Negeri Putussibau dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Putussibau.

Jumlah murid dan mahasiswa/i yang terdaftar untuk Tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 1.427 murid Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 394 murid, Sekolah Dasar sebanyak 31.290 murid, Madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 1.996 murid, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 12.019 Murid, Madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 894 murid. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada Tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 6.924 murid, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.053 murid dan Madrasah Aliyah sebanyak 619 murid.. Lebih lengkap dapat di lihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah dan Murid TK dan SD di Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Jenis dan Status Sekolah
(Tahun Pelajaran 2016/2017)

NO	KECAMATAN	TK		RA		SD Negeri		SD Swasta		MI	
		Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID
1	PUTUSSIBAU UTARA	4	410	1	158	30	3.151	1	177	1	556



NO	KECAMATAN	TK		RA		SD Negeri		SD Swasta		MI	
		ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID
2	BIKA	1	23	0	0	10	658	0	0	0	0
3	EMBALOH HILIR	1	54	0	0	10	778	0	0	1	94
4	EMBALOH HULU	1	44	0	0	15	614	0	0	0	0
5	BUNUT HILIR	1	35	0	0	14	917	0	0	1	152
6	BUNUT HULU	1	41	1	59	19	1.831	0	0	2	179
7	JONGKONG	1	40	1	20	17	1.086	0	0	1	122
8	HULU GURUNG	1	35	1	0	18	1.245	0	0	4	244
9	SELIMBAU	1	64	1	19	22	1.666	0	0	0	0
10	SEMITAU	1	43	0	0	12	1.168	2	381	0	0
11	SEBERUANG	1	25	0	0	16	1.473	0	0	0	0
12	BATANG LUPAR	1	46	0	0	15	661	0	0	0	0
13	EMPANANG	1	10	0	0	11	334	2	69	0	0
14	BADAU	1	42	1	49	11	747	1	98	1	91
15	SILAT HILIR	2	68	0	0	30	2.887	2	141	1	96
16	SILAT HULU	3	112	0	0	22	1.580	0	0	0	0
17	PUTUSSIBAU SELATAN	1	129	1	89	28	2.389	1	128	2	250
18	KALIS	1	45	0	0	25	1.769	0	0	1	47
19	BOYAN TANJUNG	1	45	0	0	19	1.587	0	0	2	110
20	MENTEBAH	1	35	0	0	13	1.250	0	0	1	0



NO	KECAMATAN	TK		RA		SD Negeri		SD Swasta		MI	
		Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID
21	PENKADAN	1	37	1	0	16	1.006	0	0	1	55
22	SUHAIID	1	44	0	0	13	1.168	1	90	0	0
23	PURING KENCANA	0	0	0	0	9	241	0	0	0	0
JUMLAH		28	1.427	8	394	395	30.206	10	1.084	19	1.996

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.16
Jumlah Sekolah dan Murid SLTP di Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Jenis dan Status Sekolah
(Tahun Pelajaran 2016/2017)

NO	KECAMATAN	SLTP Negeri		SLTP Swasta		TSANAWIYAH	
		Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID	Σ SKLH	Σ MURID
1	PUTUSSIBAU UTARA	5	1.187	4	435	5	147
2	BIKA	1	133	0	0	1	0
3	EMBALOH HILIR	4	218	0	0	0	55
4	EMBALOH HULU	3	255	0	0	1	0
5	BUNUT HILIR	4	301	0	0	0	180
6	BUNUT HULU	6	560	0	0	1	18
7	JONGKONG	5	484	0	0	2	58
8	HULU GURUNG	6	531	0	0	1	100
9	SELIMBAU	7	649	0	0	3	88
10	SEMITAU	3	607	0	0	1	0
11	SEBERUANG	3	566	0	0	0	0
12	BATANG LUPAR	2	309	0	0	0	0
13	EMPANANG	1	179	0	0	0	0
14	BADAU	3	332	0	0	0	66
15	SILAT HILIR	6	971	0	0	1	0
16	SILAT HULU	5	617	0	0	0	10
17	PUTUSSIBAU SELATAN	8	1.264	0	0	1	0
18	KALIS	4	591	0	0	0	0



NO	KECAMATAN	SLTP Negeri		SLTP Swasta		TSANAWIYAH	
		ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID
19	BOYAN TANJUNG	5	533	0	0	0	20
20	MENTEBAH	2	601	0	0	1	27
21	PENKADAN	3	235	0	0	1	25
22	SUHAIID	3	419	0	0	2	100
23	PURING KENCANA	1	42	0	0	1	0
	JUMLAH	90	11.584	4	435	17	894

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.17
Jumlah Sekolah dan Murid SLTA Di Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Jenis dan Status Sekolah
 (Tahun Pelajaran 2016/2017)

NO	KECAMATAN	SLTA Negeri		SLTA Swasta		SMK		ALIYAH	
		ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID	ΣSKLH	ΣMURID
1	PUTUSSIBAU UTARA	1	604	3	718	0	0	1	141
2	BIKA	1	113	0	0	0	0	0	0
3	EMBALOH HILIR	1	115	0	0	0	0	0	0
4	EMBALOH HULU	1	144	0	0	0	0	0	0
5	BUNUT HILIR	1	174	1	96	0	0	1	15
6	BUNUT HULU	2	389	0	0	0	0	0	0
7	JONGKONG	1	312	0	0	0	0	1	192
8	HULU GURUNG	1	384	0	0	1	161	2	51
9	SELIMBAU	2	524	0	0	0	0	0	0
10	SEMITAU	1	506	0	0	0	0	0	0
11	SEBERUANG	1	305	0	0	0	0	0	0
12	BATANG LUPAR	1	173	0	0	0	0	0	0
13	EMPANANG	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BADAU	1	227	0	0	1	72	0	0
15	SILAT HILIR	1	210	0	0	1	192	0	0
16	SILAT HULU	1	310	0	0	0	0	0	0
17	PUTUSSIBAU SELATAN	1	566	0	0	2	628	0	0
18	KALIS	1	282	0	0	0	0	0	0
19	BOYAN TANJUNG	1	213	1	14	0	0	0	0
20	MENTEBAH	1	315	0	0	0	0	0	0
21	PENKADAN	1	235	0	0	0	0	0	0
22	SUHAIID	0	0	0	0	0	0	1	220
23	PURING KENCANA	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	22	6.101	5	828	5	1.053	6	619

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



➤ Angka Melek Huruf

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang. Kualitas pendidikan di suatu daerah salah satunya dapat diukur dari angka melek huruf. Semakin besar angka melek huruf menggambarkan semakin bagus kualitas pendidikan daerah tersebut. Angka Melek Huruf (AMH) adalah angka yang menggambarkan persentase penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Jenis Kelamin	Kemampuan Baca Tulis	
	Buta Huruf	Melek Huruf
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	4,81	95,19
Perempuan	9,75	90,25
Laki-Laki + Perempuan	7,21	92,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat membaca dan menulis cukup tinggi yaitu sebesar 92,79 persen artinya 9 dari 10 Orang di Kapuas Hulu tidak buta huruf, akan tetapi masih terdapat sebesar 7,21 persen penduduk yang buta huruf di Kapuas Hulu. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka melek huruf laki- laki (95,19 persen) lebih tinggi dibanding perempuan (90,25 persen).

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keadaan kondisi umum kesehatan di Kapuas Hulu dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 2 kasus dari 4.448 Kelahiran Hidup (KH) AKB pada Tahun 2017 sebesar 62 kasus dari 4.448 KH. Pada Tahun 2017 sebesar 238.797 jiwa penduduk Kapuas Hulu sebagian telah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari 130.751 jiwa dari total peserta Penerima Bantuan Iuran Pusat (PBI Pusat) dan peserta Non PBI (CPNS, PNS, TNI/ POLRI, Pensiunan dan Mandiri). Akses pelayanan kesehatan sampai dengan Tahun 2017 Kapuas Hulu telah memiliki 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C, 1 unit Rumah Sakit Bergerak/ Pratama (RSB), 23 unit Puskesmas, 92 unit Puskesmas Pembantu, 185 unit Poskesdes dan 33 polindes



Tabel 2.19
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

NO	KECAMATAN	RSU	PUSKESMAS	PUSTU	POSKESDES	POLINDES
1	Silat Hilir	0	1	8	8	7
2	Silat Hulu	0	1	5	8	4
3	Hulu Gurung	0	1	2	8	0
4	Bunut Hulu	0	1	4	10	2
5	Mentebah	0	1	3	5	1
6	Bika	0	1	1	6	0
7	Kalis	0	1	7	12	1
8	Putussibau Selatan	0	1	8	13	4
9	Embaloh Hilir	0	1	3	5	0
10	Bunut Hilir	0	1	2	8	1
11	Boyan Tanjung	0	1	5	11	1
12	Pengkadan	0	1	4	10	3
13	Jongkong	0	1	3	8	0
14	Selimbau	0	1	6	12	1
15	Suhaid	0	1	4	8	0
16	Seberuang	0	1	4	5	4
17	Semitau	0	1	2	7	2
18	Empanang	0	1	1	4	1
19	Puring Kencana	0	1	3	3	0
20	Badau	1	1	3	7	0
21	Batang Lupar	0	1	2	6	0
22	Embaloh Hulu	0	1	5	7	0
23	Putussibau Utara	1	1	7	14	1
	Jumlah	2	23	92	185	33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.20
Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No	Kecamatan	Medis							Jumlah
		Dokter Spesialis					Dokter Umum	Dokter Gigi	
		Mata	Anak	Penyakit Dalam	Kandungan	Bedah			
1	Silat Hilir	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Silat Hulu	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Hulu Gurung	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Bunut Hulu	0	0	0	0	0	1	0	1
5	Mentebah	0	0	0	0	0	2	0	2
6	Bika	0	0	0	0	0	2	0	2
7	Kalis	0	0	0	0	0	1	0	1
8	Putussibau Selatan	0	0	0	0	0	2	1	2
9	Embaloh Hilir	0	0	0	0	0	1	0	1
10	Bunut Hilir	0	0	0	0	0	1	0	1
11	Boyan Tanjung	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Pengkadan	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Jongkong	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Selimbau	0	0	0	0	0	1	0	1
15	Suhaid	0	0	0	0	0	1	0	1
16	Seberuang	0	0	0	0	0	1	0	1



No	Kecamatan	Medis							
		Dokter Spesialis					Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah
		Mata	Anak	Penyakit Dalam	Kandungan	Bedah			
17	Semitau	0	0	0	0	0	1	0	1
18	Empanang	0	0	0	0	0	1	0	1
19	Puring Kencana	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Badau	0	0	0	0	0	1	0	1
21	Batang Lupar	0	0	0	0	0	1	0	1
22	Embaloh Hulu	0	0	0	0	0	2	0	2
23	Putussibau Utara	0	0	0	0	0	2	1	2
	Jumlah	0	0	0	0	0	28	2	30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

c. Pekerjaan Umum

Sarana dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat terbatas. Hingga Tahun 2017, panjang jalan Kabupaten di Kapuas Hulu adalah 1.108,330 km dengan rincian jenis permukaan masing- masing 166,167 km berupa jalan aspal, 398,125 km jalan kerikil, Rigid Beton 200,578 Km dan jalan tanah sepanjang 343,460 km. Kondisi jaringan Jalan umumnya masih dalam kondisi rusak (16,65 %) dan rusak berat (31,46 %), jalan kabupaten dalam kondisi baik sekitar (24,10 %), dan sisanya sekitar (27,79 %) dalam kondisi sedang. Jembatan yang dibangun sampai Tahun 2017 dengan kondisi baik terget pada Tahun 2017 sebesar 400 unit terealisasi 519 unit, jembatan dengan kondisi sedang sebanyak 80 jembatan dari target jembatan sebanyak 78 unit. Dan jumlah jembatan dengan kondisi rusak sebanyak 134 unit.

d. Penataan Ruang

Berdasarkan Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 dengan luas yang peruntukannya sebagai Taman Nasional seluas 944.086,80 Ha, dan berdasarkan luasan kawan hutan di wilayah kerja UPT kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kapuas Hulu Timur (Unit XX) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas Hutan Lindung 343.686,03 Ha, Hutan Produksi Terbatas 107.691,27 Ha dan Hutan Produksi 35.042,97 Ha.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masih adanya permukiman kumuh tersebar di berbagai ibu kota kecamatan yang penduduknya padat dimana permasalahan utamanya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh termasuk pendanaan dan menumbuhkan gerakan masyarakat. Masalah perumahan permukiman di Kabupaten Kapuas Hulu selain pemenuhan kebutuhan rumah yang masih belum mencukupi antara lain : permukiman kumuh, dan rumah di bantaran sungai. Dengan luas permukiman kumuh sebesar 29.842 km² dan jumlah rumah layak huni sebanyak 32.899 rumah, dari jumlah rumah seluruhnya di kabupaten kapuas hulu sebanyak 46.998 rumah.



2.3.2. Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan pemerintah non dasar ini secara umum sudah mengalami peningkatan tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

a. Tenaga Kerja

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap Tahun. Ketersediaan lapangan pekerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja.

Menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, jumlah angkatan kerja mencapai 142.771 jiwa, Sementara untuk penduduk yang bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya sebanyak 39.385 jiwa.

Tabel 2.21
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan
Kabupaten Kapuas Hulu Agustus 2017

	Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan
Angkatan Kerja	Bekerja	79.904	59.708
	Pengangguran	1.244	1.915
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	6.259	4.539
	Mengurus Rumah tangga	877	21.029
	Lain-lain	4.368	2.313
Jumlah		92.652	89.504

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

b. Perhubungan

Jumlah bis dan non bis yang berada di terminal dan sub terminal di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 mencapai 87 unit yang tersebar di seluruh pelosok wilayah. Penurunan armada perhubungan darat ini dikarenakan meningkatnya volume kendaraan pribadi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke fasilitas pribadi tersebut. Sungai Kapuas merupakan salah satu sarana transportasi penghubung antar Kecamatan ke Desa atau antar Kecamatan ke Kabupaten. Namun kondisi terakhir terjadi penurunan pemanfaatan angkutan sungai di beberapa Kecamatan yang dilalui aliran sungai, hal ini disebabkan karena beberapa Kecamatan dapat dijangkau melalui jalan darat, dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu tempuh yang pendek. Berdasarkan data Tahun 2017 yang diperoleh dari Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah angkutan sungai yang tercatat di Kapuas Hulu sebanyak 482 unit, terdiri dari 38 kapal tambang, 58 unit Bandung berumah, 229 unit speed boat, dan 157 motor boat.



Sedangkan untuk Steigher (pelabuhan mini) pada Tahun 2013 sebanyak 24 buah, Tahun 2014 sebanyak 9 buah, Tahun 2015 sebanyak 11 buah, Tahun 2016 sebanyak 17 buah dan untuk Tahun 2017 sebanyak 7 buah. Dan jumlah dermaga sebanyak 3 buah pada Tahun 2015.

Perhubungan udara saat ini dilayani oleh Bandara Pangsuma Putussibau yang merupakan bandara udara perintis, dengan perusahaan penerbangan yakni Garuda Indonesia, Wings dan Nam Air untuk jalur penerbangan Putussibau – Pontianak dan Pontianak - Putussibau serta Dimonim Air jalur penerbangan Sintang - Putussibau dan Putussibau - Sintang. Dalam rangka menunjang keselamatan penerbangan, telah dibangun Kantor/ Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memantau keadaan cuaca di Putussibau.

c. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2016 terdapat 540 perizinan dengan realisasi investasi Rp. 112.160.190.069 sedangkan pada Tahun 2017 terdapat 2.287 perizinan dengan realisasi Rp. 140.350.028.938 mengalami kenaikan realisasi investasi Rp. 28.189.838.869. Sedangkan untuk realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2017 mengalami penurunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Realisasi Investasi dan Jumlah Perizinan

NO.	TAHUN	PERIZINAN	INVESTASI (Rp. JUTA)
1.	2012	212	54.648.200.000
2.	2013	582	125.667.100.000
3.	2014	369	68.611.797.000
4.	2015	432	63.900.910.000
5.	2016	540	112.160.190.069
6.	2017	2.287	140.350.028.938

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.23
Perkembangan Realisasi Investasi PMA/ PMDN

NO	TAHUN	PMA		PMDN	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US\$)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	2012	0	0	12	803.915,8
2	2013	15	7.985,2	13	79,486
3	2014	7	1.807,7	9	577.516,8
4	2015	15	1.000,5	14	1.269.698,8



NO	TAHUN	PMA		PMDN	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US\$)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. JUTA)
5	2016	19	21.731,5	42	2.710.201,4
6	2017	19	14.369	96	541.409

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017

d. Koperasi dan UKM

Salah satu wadah perekonomian yang menunjang bagi pengembangan ekonomi masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Jumlah unit koperasi pada Tahun 2017 Koperasi aktif di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 sebanyak 95 koperasi dari 210 koperasi yang ada sedangkan jumlah usaha mikro dan kecil yang aktif pada Tahun 2017 berjumlah 1.213 usaha dari jumlah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1.276 usaha.

2.3.3 Pelayanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut adalah layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi ikan di Kapuas Hulu bukan hanya ikan konsumsi namun ikan hias seperti ikan arwana sudah dikenal mendunia tinggal bagaimana kita mengemas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk produksi olahan hasil perikanan juga memiliki nilai yang cukup ekonomis untuk dijadikan usaha bagi warga Kapuas Hulu sehingga sub sektor perikanan agar diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan di kolam, pagong, dan keramba serta bantuan fasilitas penangkapan ikan di perairan sungai dan danau guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan produksi daerah serta menunjang kebutuhan bahan baku industri rumah tangga dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Usaha-usaha perikanan di Kapuas Hulu termasuk perikanan rakyat yang sebagian besar masih mempergunakan alat tangkap tradisional. Berdasarkan tabel berikut jumlah produksi ikan perairan umum di Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun 2017 secara total mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya, yaitu 31.494,71 ton pada Tahun 2016, menurun menjadi 31.439,01 ton Tahun 2017. Namun terjadi peningkatan pada produksi budidaya perikanan, yaitu 17.923,00 ton pada Tahun 2016 meningkat menjadi 24.060,20 ton pada Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:



Tabel 2.24
Produksi Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	JELAWAT (Ton)	GABUS (Ton)	BETUTU (Ton)	TOMAN (Ton)	LAIS (Ton)	
1	Silat Hilir	59,40	55,90	-	-	159,21	
2	Silat Hulu	-	-	-	-	-	
3	Hulu Gurung	-	-	-	-	-	
4	Bunut Hulu	-	-	-	-	-	
5	Mentebah	-	-	-	-	-	
6	Bika	19,00	36,00	-	32,60	298,76	
7	Kalis	-	-	-	-	-	
8	Putusibau Selatan	38,00	38,71	-	-	-	
9	Embaloh Hilir	65,30	65,31	38,90	2.208,41	296,41	
10	Bunut Hilir	229,70	151,61	54,90	2.460,41	779,41	
11	Boyan Tanjung	-	-	-	-	-	
12	Pengkadan	-	-	-	-	-	
13	Jongkong	55,40	84,50	48,20	220,51	316,21	
14	Selimbau	105,70	123,40	53,50	259,31	415,41	
15	Suhaid	83,70	126,30	65,10	253,11	817,00	
16	Seberuang	-	-	-	-	-	
17	Semitau	54,00	-	53,20	195,91	130,61	
18	Empanang	-	-	-	-	50,60	
19	Puring Kencana	-	-	-	-	-	
20	Badau	44,50	44,80	-	103,61	153,11	
21	Batang Lupar	44,65	143,70	37,80	-	171,81	
22	Embaloh Hulu	-	-	-	98,11	114,61	
23	Putussibau Utara	37,21	37,71	-	-	-	
	Jumlah	2017	836,56	907,94	351,60	5.831,98	3.703,15
		2016	836,56	963,64	351,6	5.831,98	3.703,15
		2015	422,00	553,80	94,00	5.239,70	2.406,30
		2014	598,10	630,60	94,70	8.768,10	2.562,70
		2013	377,00	630,60	84,70	9.129,10	2.362,70

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.25
Produksi Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya (Lanjutan)
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	TAMBAKAN (Ton)	BELIDA (Ton)	LAINNYA (Ton)	JUMLAH (Ton)
1	Silat Hilir	279,00	53,70	402,23	1.009,44
2	Silat Hulu	-	-	288,68	288,68
3	Hulu Gurung	-	-	-	-
4	Bunut Hulu	-	-	-	-
5	Mentebah	-	-	-	-
6	Bika	264,36	33,00	965,26	1.648,98
7	Kalis	-	-	-	-
8	Putusibau Selatan	-	0,25	535,31	612,27
9	Embaloh Hilir	268,51	74,60	1.558,69	4.576,13
10	Bunut Hilir	378,41	585,70	3.199,42	7.839,56
11	Boyan Tanjung	-	-	-	-



NO	KECAMATAN	TAMBAKAN (Ton)	BELIDA (Ton)	LAINNYA (Ton)	JUMLAH (Ton)	
12	Pengkadan	-	-	-	-	
13	Jongkong	193,51	76,30	1.184,72	2.179,35	
14	Selimbau	838,31	69,10	1.670,70	3.535,43	
15	Suhaid	357,31	124,10	2.124,01	3.950,63	
16	Seberuang	-	-	-	-	
17	Semitau	351,41	55,70	1.068,82	1.909,65	
18	Empanang	-	-	-	50,60	
19	Puring Kencana	-	-	-	-	
20	Badau	136,61	43,30	965,53	1.491,46	
21	Batang Lupar	125,11	46,40	927,19	1.496,66	
22	Embaloh Hulu	115,21	-	-	327,93	
23	Putussibau Utara	-	-	447,32	522,24	
	Jumlah	2017	3.307,75	1.162,15	15.337,88	31.439,01
		2016	3.307,75	1.162,15	15.337,88	31.494,71
		2015	2.393,50	812,05	12.681,00	24.603,05
		2014	3.493,50	953,05	17.912,60	35.013,35
		2013	3.486,50	353,45	18.212,60	34.636,65

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.26
Produksi Budidaya Perikanan Menurut Jenisnya
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	JELAWAT (Ton)	BETUTU (Ton)	TOMAN (Ton)	NILA (Ton)	MAS (Ton)	
1	Silat Hilir	1,01	-	36,68	40,00	2,50	
2	Silat Hulu	-	-	-	10,00	3,50	
3	Hulu Gurung	-	-	-	300,00	20,40	
4	Bunut Hulu	-	-	-	255,00	8,50	
5	Mentebah	-	-	-	70,00	6,35	
6	Bika	-	-	65,20	50,00	-	
7	Kalis	-	-	-	623,81	4,50	
8	Putussibau Selatan	-	-	-	190,00	10,50	
9	Embaloh Hilir	4,00	-	370,41	-	-	
10	Bunut Hilir	3,00	-	670,54	-	-	
11	Boyan Tanjung	-	-	-	70,00	8,40	
12	Pengkadan	-	-	-	160,50	17,50	
13	Jongkong	20,02	-	2.827,86	263,25	7,20	
14	Selimbau	18,11	-	4.568,10	993,25	4,00	
15	Suhaid	12,10	-	639,46	-	-	
16	Seberuang	-	-	-	-	1,00	
17	Semitau	3,20	-	186,81	30,00	2,00	
18	Empanang	-	-	-	-	-	
19	Puring Kencana	-	-	-	-	-	
20	Badau	3,03	-	78,76	25,00	1,00	
21	Batang Lupar	2,01	-	96,56	5,00	1,00	
22	Embaloh Hulu	2,01	-	-	-	-	
23	Putussibau Utara	-	-	-	50,00	7,20	
	Jumlah	2017	68,49	-	9.540,38	3.135,81	105,55
		2016	1.097,51	3,23	5.954,76	2.509,73	10,00
		2015	642,91	8,20	5.526,17	137,21	758,00
		2014	1.548,44	47,91	4.054,43	219,22	247,23
		2013	1.492,44	42,02	3842,6	190,58	242,11

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



Tabel 2.27
Produksi Budidaya Perikanan Menurut Jenisnya (Lanjutan)
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	GURAMI (Ton)	LELE (Ton)	PATIN (Ton)	LAINNYA (Ton)	JUMLAH (Ton)	
1	Silat Hilir	-	30,00	25,00	30,35	165,54	
2	Silat Hulu	-	30,00	8,00	35,00	86,50	
3	Hulu Gurung	-	70,40	80,00	22,00	523,40	
4	Bunut Hulu	-	-	250,00	37,10	550,60	
5	Mentebah	-	10,00	140,00	15,00	391,35	
6	Bika	-	-	160,32	59,90	335,42	
7	Kalis	-	-	540,40	39,20	1.207,91	
8	Putusibau Selatan	-	158,54	120,00	55,10	534,14	
9	Embaloh Hilir	35,70	-	264,50	76,39	751,00	
10	Bunut Hilir	56,00	-	277,90	821,09	1.828,53	
11	Boyan Tanjung	-	57,00	70,00	15,00	260,70	
12	Pengkadan	-	60,00	50,00	50,00	592,00	
13	Jongkong	319,00	22,00	1.920,82	1.019,45	6.399,60	
14	Selimbau	245,10	5,00	700,36	821,09	7.355,01	
15	Suhaid	53,11	12,00	150,90	490,35	1.357,92	
16	Seberuang	-	-	5,00	10,00	16,00	
17	Semitau	-	54,00	5,00	44,21	325,22	
18	Empanang	-	-	-	10,00	10,00	
19	Puring Kencana	-	-	-	10,00	10,00	
20	Badau	31,10	25,00	150,00	245,45	559,34	
21	Batang Lupar	30,60	-	125,00	140,62	400,79	
22	Embaloh Hulu	-	-	-	10,00	12,01	
23	Putussibau Utara	-	260,02	20,00	50,00	387,22	
	Jumlah	2017	770,61	793,96	5.063,20	4.107,30	24.060,20
		2016	225,76	11,80	3.026,51	5.083,70	17.923,00
		2015	325,71	29,42	492,57	8.229,98	16.150,17
		2014	451,29	64,41	630,58	2.822,84	10.086,35
		2013	436,07	25,27	586,51	2757,99	9.615,59

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.28
Produksi Ikan Hias Perikanan Menurut Jenisnya
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	PRODUKSI IKAN HIAS				JUMLAH
		ARWANA		ULANG ULI/ARWANA BRAZIL/RINGAU		
		PENANGKARAN (Ekor)	HASIL ALAM (Ekor)	PENANGKARAN (Ekor)	HASIL ALAM (Ekor)	
1	Putussibau Utara	552	-	4.419	-	4.971
2	Putussibau Selatan	1045	-	4.916	-	5.961
3	Bika	3250	-	1.656	-	4.906
4	Kalis	-	-	576	-	576
5	Mentebah	122	-	1.198	-	1.320
6	Boyan Tanjung	45	-	2.649	-	2.694
7	Pengkadan	120	-	4.116	-	4.236
8	Hulu Gurung	23	-	3.977	-	4.000
9	Seberuang	45	-	2.063	-	2.108
10	Semitau	2582	-	5.255	521	8.358



NO	KECAMATAN	PRODUKSI IKAN HIAS				JUMLAH
		ARWANA		ULANG ULI/ARWANA BRAZIL/RINGAU		
		PENANGKARAN (Ekor)	HASIL ALAM (Ekor)	PENANGKARAN (Ekor)	HASIL ALAM (Ekor)	
11	Suhaid	3831	-	6.648	6358	16.837
12	Selimbau	657	-	5.779	2707	9.143
13	Jongkong	1483	-	4.205	404	6.092
14	Bunut Hilir	142	-	2.264	453	2.859
15	Bunut Hulu	283	-	2.551	-	2.834
16	Embaloh Hilir	204	-	929	-	1.133
17	Embaloh Hulu	-	-	200	457	657
18	Batang Lupar	327	-	2.818	718	3.863
19	Badau	250	-	3.444	552	4.246
20	Empanang	-	-	470	-	470
21	Puring Kencana	-	-	155	-	155
22	Silat Hilir	80	-	1.033	-	1.113
23	Silat Hulu	-	-	700	-	700
JUMLAH	2017	15.041	-	62.021	12.170	89.232
	2016	9.729	-	-	-	9.729
	2015	9.337	-	-	-	9.337
	2014	9.337	520	-	7.000	16.857
	2013	6.988	450	-	15.200	22.638

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.29
Produksi Ikan Hias Perikanan Menurut Jenisnya
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	KOMODITAS (TON)					JUMLAH
		KERUPUK BASAH	KERUPUK KERING	IKAN ASAP	IKAN ASIN	LAIN-LAIN	
1	Putussibau Utara	159	-	-	-	-	159
2	Putussibau Selatan	127	-	-	-	-	127
3	Bika	-	-	-	63	-	63
4	Kalis	-	-	-	-	-	-
5	Mentebah	-	-	-	-	-	-
6	Boyan Tanjung	-	-	-	-	-	-
7	Pengkadan	-	-	-	-	-	-
8	Hulu Gurung	-	-	-	-	-	-
9	Seberuang	-	-	-	-	-	-
10	Semitau	373	643	291	543	77	1927
11	Suhaid	473	965	337	661	161	2597
12	Selimbau	439	1337	299	709	265	3049
13	Jongkong	553	1409	193	715	227	3097
14	Bunut Hilir	457	541	223	497	109	1827
15	Bunut Hulu	-	-	-	-	-	-
16	Embaloh Hilir	241	383	179	375	83	1261
17	Embaloh Hulu	111	327	-	125	43	606
18	Batang Lupar	51	22	46	89	11	219
19	Badau	27	19	42	94	-	182
20	Empanang	29	20	51	101	-	201



NO	KECAMATAN	KOMODITAS (TON)					JUMLAH	
		KERUPUK BASAH	KERUPUK KERING	IKAN ASAP	IKAN ASIN	LAIN-LAIN		
21	Puring Kencana	-	-	-	-	-	-	
22	Silat Hilir	90	98	63	82	31	364	
23	Silat Hulu	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2017	3.130	5.764	1.724	4.054	1.007	15.679
		2016	2.607	5.452	1.258	3.996	889	14.202
		2015	2.599	5.448	1.253	3.988	878	14.166
		2014	1.675	5.398	1.253	2.011	829	11.166
		2013	1.524	5.324	1.111	1.912	816	10.687

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

b. Pariwisata

Pariwisata dimasa mendatang dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan berbagai upaya pengembangan dan pembinaan terutama terhadap berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penunjang pembangunan di bidang pariwisata. Langkah penyediaan dan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pariwisata seperti transportasi, akomodasi, restoran, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya penunjang kegiatan wisata perlu diikuti pula dengan kegiatan berbagai promosi mengenai potensi wisata. Disamping itu, dengan adanya infrastruktur tersebut juga cukup menunjang pengembangan sumber pendapatan lain khususnya di sektor pariwisata, dimana pertumbuhan kunjungan wisata berpeluang meningkat jika melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup menjanjikan diantaranya potensi wisata alam dengan obyek wisata yang sudah sangat terkenal yakni Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 sebanyak 12.886 orang meningkat sebesar 1.785 orang dibanding Tahun 2016 sebesar 11.101 orang.

c. Pertanian

Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Perekonomian daerah ini salah satunya tergantung dari usaha pertanian. Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan salah satu program utama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Tanaman Pangan

Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah cukup luas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Namun sampai dengan Tahun 2017, luas panen yang dimanfaatkan untuk tanaman padi hanya sebesar 23.147. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat



melalui keanekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan.

Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kapuas Hulu diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Luas panen padi di Kabupaten Kapuas Hulu dari Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017 yaitu sebesar 23.147 Ha produksi pertanian sebesar 60.510 ton, produktivitas padi 25,93 Kw/Ha pada Gambaran umum hasil produksi Tanaman Pangan dapat diuraikan dari Tabel-tabel berikut:

Tabel 2.30
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi
Kabupaten Kapuas Hulu

TAHUN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA – RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
2013	21.509	52.374	24,35
2014	21.252	51.862	24,40
2015	20.656	51.412	24,88
2016	23.111	56.238	24,33
2017	23.147	60.510	26,14

Sumber :Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Terdapat peningkatan luasan sawah/panen dalam 5 Tahun terakhir dimana pada Tahun 2013 luasan panen hanya 21.509 ha namun pada Tahun 2017 luasan panen telah mencapai 23.147 ha. Untuk produktifitas terjadi peningkatan selama 5 Tahun terakhir pada kisaran 26 kwintal per hektar.

Tabel 2.31
Luas Panen dan Produksi Tanaman Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kapuas Hulu

TAHUN	JAGUNG			UBI KAYU		
	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (TON)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (TON)	RATA – RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
2013	276	326	11,81	400	7.079	176,98
2014	154	338	21,97	216	3.534	161,67
2015	115	153,262	13,32	127	2.332	183,22
2016	223	204	9,15	372	7.069	190,03
2017	330	244	7,39	362	7.287	201,30

Sumber :Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Selama 5 Tahun terakhir luasan panen dan produktifitas jagung mengalami kenaikan sedangkan ubi kayu luasan panen menurun sedangkan produktifitas naik.



Tabel.2.32
Luas Panen dan Produksi tanaman Ubi Jalar dan Kacang Tanah
Kabupaten Kapuas Hulu

TAHUN	UBI JALAR			KACANG TANAH		
	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
2013	126	1.058	83,87	50	52	10,40
2014	54	485	89,90	34	41	12,29
2015	29	243,484	83,96	15	15,930	10,62
2016	49	417	85,10	32	34	10,63
2017	97,4	838	86,04	17	18,19	10,70

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Luasan panen dan produktifitas ubi jalar meningkat sedangkan kacang tanah Luasan panen dan produktifitas menurun faktor sulitnya pemasaran produk menjadi faktor enggan petani menanam komoditas tersebut.

Tabel 2.33.
Luas Panen dan Produksi Kacang Kedelai dan Kacang Hijau
Kabupaten Kapuas Hulu

TAHUN	KACANG KEDELAI			KACANG HIJAU		
	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
2011	6	6	10	24	18	7,50
2012	3	3	10	21	16	7,62
2013	-	-	-	18	14	7,78
2014	1	1	10	2	19	7,88
2015	4	3	4	-	-	-
2016	15	9	6	7	5	7,14
2017	5	4	8	1	1	10

Sumber : Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengelola produksi kacang kedelai dan kacang hijau, faktor sulitnya pemasaran komoditi kacang-kacangan menjadi penyebab penurunan produksi, petani enggan menanam kedelai dan kacang hijau karena harga pasaran lokal tidak mendukung untuk budidaya komoditi tersebut.

Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikembangkannya berbagai komoditi perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, lada, coklat (kakao), kapuk, tebu, aren/enau, pinang dan jarak. Belum semua komoditi perkebunan tersebar ditiap Kecamatan. Hanya perkebunan karet, kelapa dan lada saja yang tersebar di seluruh kecamatan. Tanaman produktif untuk komoditi perkebunan secara umum menunjukkan angka yang bervariasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.34.
Luas dan Produksi Perkebunan Karet Rakyat
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL AREA (HA)	JUMLAH PETANI (KK)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RATA - RATA PRODUKSI (KG/HA/TAHUN)
1	2	3	4	5	6
1	Silat Hilir	2.270	1.570	927	780
2	Semitau	2.400	1.196	1.147	757
3	Suhaid	2.186	1.509	1.089	850
4	Selimbau	1.923	1.125	503	627
5	Jongkong	2.005	1.474	737	704
6	Bunut Hilir	2.098	1.416	463	452
7	Embaloh Hilir	2.500	1.226	1.055	743
8	Bika	1.893	1.056	316	491
9	Putussibau Utara	1.891	1.306	278	363
10	Silat Hulu	2.636	1.626	1.005	729
11	Seberuang	2.733	1.585	1.167	738
12	Hulu Gurung	4.191	1.564	1.705	707
13	Pengkadan	3.769	2.671	1.866	817
14	Boyan Tanjung	2.717	1.448	907	718
15	Bunut Hulu	2.137	1.741	870	859
16	Mentebah	2.397	1.876	841	641
17	Kalis	1.636	1.167	629	769
18	Putussibau Selatan	1.827	1.544	308	425
19	Embaloh Hulu	1.908	1.348	334	458
20	Batang Lupar	1.294	956	244	505
21	Badau	986	729	178	625
22	Empanang	1.230	877	309	748
23	Puring Kencana	683	291	70	361
JUMLAH		49.310	31.301	16.948	787

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.35.
Luas dan Produksi Perkebunan Kelapa rakyat
Kabupaten Kapuas Hulu
Per Desember 2017

NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL AREAL (HA)	JUMLAH PETANI (KK)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RATA-RATA PRODUKSI (KG/HA/THN)
1	2	3	4	5	6
1	Silat Hilir	12	35	3,0	353
2	Semitau	5	20	0,5	200
3	Suhaid	4	18	0,5	167
4	Selimbau	7	25	2,0	800
5	Jongkong	5	24	2,0	1.000
6	Bunut Hilir	5	27	3,0	750



NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL AREAL (HA)	JUMLAH PETANI (KK)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RATA-RATA PRODUKSI (KG/HA/THN)
7	Embaloh Hilir	10	28	3,0	429
8	Bika	6	15	2,0	444
9	Putussibau Utara	7	22	3,0	667
10	Silat Hulu	6	10	1,0	222
11	Seberuang	7	25	3,0	600
12	Hulu Gurung	11	30	4,0	500
13	Pengkadan	7	29	2,0	333
14	Boyan Tanjung	7	25	2,0	364
15	Bunut Hulu	5	20	1,0	667
16	Mentebah	4	15	1,0	333
17	Kalis	4	10	1,0	333
18	Putussibau Selatan	8	25	2,0	444
19	Embaluh Hulu	6	17	2,0	500
20	Batang Lupar	7	14	1,5	300
21	Badau	5	11	0,5	167
22	Empanang	4	7	0,5	250
23	Puring Kencana	3	7	1,5	750
JUMLAH		140	459	42	614

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel.2.36
Luas dan Produksi Perkebunan Lada Rakyat
Kabupaten Kapuas Hulu
Per Desember 2017

NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL AREA (HA)	JUMLAH PETANI (KK)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RATA - RATA PRODUKSI (KG/HA/TAHUN)
1	2	3	4	5	6
1	Silat Hilir	0,5	-	-	-
2	Semitau	-	-	-	-
3	Suhaid	-	-	-	-
4	Selimbau	-	-	-	-
5	Jongkong	-	-	-	-
6	Bunut Hilir	-	-	-	-
7	Embaloh Hilir	-	-	-	-
8	Bika	-	-	-	-
9	Putussibau Utara	1	-	-	-
10	Silat Hulu	-	-	-	-
11	Seberuang	-	-	-	-
12	Hulu Gurung	-	-	-	-
13	Pengkadan	0,5	-	-	-
14	Boyan Tanjung	-	-	-	-
15	Bunut Hulu	0,5	7	-	-



NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL AREA (HA)	JUMLAH PETANI (KK)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RATA - RATA PRODUKSI (KG/HA/TAHUN)
16	Mentebah	1,5	-	-	-
17	Kalis	-	-	-	-
18	Putussibau Selatan	-	-	-	-
19	Embaloh Hulu	4	8	1	500
20	Batang Lupar	5	9	1	500
21	Badau	12	23	7	778
22	Empanang	5	10	1	333
23	Puring Kencana	8	12	1	250
JUMLAH		38	69	11	524

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Tabel 2.37.
Luas dan Produksi Perkebunan Sawit Rakyat
Kabupaten Kapuas Hulu
Per Desember 2017

NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL AREA (HA)	JUMLAH PETANI (KK)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RATA - RATA PRODUKSI (KG/HA/TAHUN)
1	2	3	4	5	6
1	Silat Hilir	22.854	3.295	24.683	1.449
2	Semitau	8.639	656	10.465	604
3	Suhaid	4.121	343	5.329	857
4	Selimbau	250	-	-	-
5	Jongkong	-	-	-	-
6	Bunut Hilir	-	-	-	-
7	Embaloh Hilir	-	-	-	-
8	Bika	3.397	-	-	-
9	Putussibau Utara	-	-	-	-
10	Silat Hulu	1.147	-	-	-
11	Seberuang	4.697	-	4.764	-
12	Hulu Gurung	-	-	-	-
13	Pengkadan	791	-	-	-
14	Boyan Tanjung	-	-	-	-
15	Bunut Hulu	-	-	-	-
16	Mentebah	224	-	-	-
17	Kalis	-	-	-	-
18	Putussibau Selatan	-	-	-	-
19	Embaloh Hulu	-	-	-	-
20	Batang Lupar	2.135	-	-	-
21	Badau	11.207	439	7.569	718
22	Empanang	7.828	-	4.765	954
23	Puring Kencana	6.174	-	2.985	951
JUMLAH		73.464	4.733	60.560	1.085

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



Peternakan

Sub sektor Peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, perbaikan gizi masyarakat dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan, dapat diketahui bahwa populasi ternak besar di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Sapi sebesar 7.673 ekor untuk Tahun 2017 dan ternak kecil yang terdiri dari Kambing 1.666 ekor, Babi 23.786 ekor dan Domba 10 Ekor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Populasi Ternak Dirinci Per Kecamatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

NO	KECAMATAN	SAPI (Ekor)	KAMBING (Ekor)	BABI (Ekor)	Domba (Ekor)
1	Badau	17	0	1381	0
2	Batang Lupar	11	27	2573	0
3	Bika	220	31	630	0
4	Boyan Tanjung	173	130	62	0
5	Bunut Hilir	80	56	19	0
6	Bunut Hulu	167	13	320	0
7	Embaloh Hulu	107	0	288	0
8	Embaloh Hilir	153	6	1668	0
9	Empanang	0	0	1726	0
10	Hulu Gurung	146	26	0	0
11	Jongkong	603	80	41	0
12	Kalis	1073	188	1700	0
13	Mentebah	583	195	663	10
14	Pengkadan	68	70	0	0
15	Puring Kencana	4	0	480	0
16	Putussibau Selatan	1356	245	2282	0
17	Putussibau Utara	699	147	4721	0
18	Seberuang	10	8	1336	0
19	Selimbau	1653	6	14	0
20	Semitau	8	40	447	0
21	Silat Hilir	287	369	587	0
22	Silat Hulu	176	29	2411	0
23	Suhaid	79	0	437	0
	Jumlah	7673	1666	23786	10

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



Tabel 2.39.
Populasi Ternak Unggas Dirinci Per Kecamatan
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	Ayam Buras (Ekor)	Ayam Ras Petelur (Ekor)	Ayam Pedaging (Ekor)	Itik (Ekor)	Itik Manila (Ekor)	
1	Badau	6.189	0	1.473	120	10	
2	Batang Lupar	8.175	0	3.489	0	5	
3	Bika	1.919	0	4.596	237	49	
4	Boyan Tanjung	22.392	0	3.761	210	150	
5	Bunut Hilir	2.151	0	2.670	34	0	
6	Bunut Hulu	9.967	0	4.400	316	10	
7	Embaloh Hulu	1.459	0	1.552	15	12	
8	Embaloh Hilir	5.564	0	1.862	75	0	
9	Empanang	1.679	0	548	0	0	
10	Hulu Gurung	27.953	0	7.584	540	204	
11	Jongkong	1.715	600	9.098	340	95	
12	Kalis	7.805	0	5.791	224	182	
13	Mentebah	7.852	0	6.814	154	145	
14	Pengkadan	2.314	200	2.391	260	77	
15	Puring Kencana	1.715	0	755	16	45	
16	Putussibau Selatan	13.015	0	240.268	650	442	
17	Putussibau Utara	20.755	0	328.260	337	403	
18	Seberuang	5.358	0	2.581	0	2	
19	Selimbau	2.361	0	2.732	113	7	
20	Semitau	3.465	126	3.197	71	10	
21	Silat Hilir	6.200	120	8.210	63	76	
22	Silat Hulu	4.318	0	2.654	75	18	
23	Suhaid	1.373	0	3.167	97	0	
	Jumlah	2017	165.694	1.046	647.853	3.947	1.942
		2016	164.499	846	571.197	5.114	2.495
		2015	256.036	4.790	570.201	4.909	2.400
		2014	248.318	4.000	89.874	4.204	1.546
		2013	243.451	0	74.898	3.730	1.460

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

d. Perdagangan

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung urusan pilihan perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dilaksankannya pasar murah 2 kali (Lebaran dan Natal) di Kecamatan Bunut Hulu, Bika dan Tekalong.
- Promosi produk ekspor di Batam
- Menghadiri undangan ekspo di Jakarta
- Pendataan Tera Ulang
- Pengawasan Tera Ulang



- f) Monitoring harga barang sembako dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu yang ada di pasar-pasar Kecamatan.

e. Perindustrian

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 sebesar 54,64 % yang berasal dari penambahan jumlah industri dari Tahun 2016 ke 2017 yang sebanyak 100 industri dibanding dengan total jumlah industri sampai dengan Tahun 2017 yang sebanyak 183 industri. Dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 851 industri atau menurun sebanyak 668 industri.

f. Transmigrasi

Pencapaian SPM atau hasil-hasil untuk Urusan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemerataan penduduk di daerah pedalaman sehingga daerah yang terisolir dapat berkembang melalui Pengembangan Permukiman Baru (PTB).
- b. Meningkatnya pendapatan penduduk daerah permukiman transmigrans melalui pembinaan dan pelatihan serta keterampilan usaha ekonomi sehingga hasilnya dapat meningkatkan tarap hidupnya.
- c. Meningkatnya pembangunan jalan di wilayah pedesaan melalui pengembangan kawasan transmigrasi sehingga penduduk lokal yang terisolir dapat merasakan mamfaat pembangunan jalan yang selama ini belum terjangkau akses jalan di desa.

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang dibentuk membantu kepala daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

a. Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Melalui PAD kita dapat melihat apakah kegiatan perekonomian di suatu daerah tergolong maju atau belum maju. PAD Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 berjumlah Rp. 108.780.578.527,85 dengan realisasi sebesar Rp. 93.132.311.356,86. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 berjumlah Rp. 975.757.515.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Rp. 309.519.656.000,00 dengan realisasi Rp. 291.283.378.264,00. Sedangkan jumlah belanja langsung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 dengan target Rp.844.482.173.373,80 dan realisasi Rp. 763.346.611.652,04 serta jumlah belanja tidak langsung Rp.893.880.844.532,90 dan Realisasi Rp.852.618.838.675,00.



2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas ekonomi suatu daerah yang dilihat dari pengeluaran perkapita. Semakin tinggi pengeluaran perkapita maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.

a. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Golongan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 persentase terbesar terdapat pada golongan antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 749.999,- dengan persentase sebesar 35,0 persen. Lalu diikuti dengan golongan pengeluaran sebesar Rp. 750.000,- s/d Rp. 999.999,- sebanyak 21,0 persen penduduk. Berikut ditampilkan secara rinci dan lengkap golongan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.40.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

No.	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase
1	≤300.000	1,5
2	300.000-399.999	7,9
3	400.000-499.999	8,8
4	500.000-749.999	35,0
5	750.000-999.999	21,0
6	1.000.000-1.499.999	17,4
7	1.500.000+	8,4
Jumlah		100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

b. Lapangan Usaha Utama

Lapangan usaha diharapkan menjadi indikator tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah, apakah daerah itu berbasis pertanian atau industri sehingga dapat menunjukkan tingkat perkembangan



ekonominya. Dari hasil Sakernas 2014 terlihat bahwa untuk wilayah pedesaan, sektor pertanian masih merupakan sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 75,95 persen. Namun untuk wilayah perkotaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan merupakan sektor yang dominan menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 32,62 persen, lalu diikuti dengan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 31,30 persen. Hal ini menyangkut bahwa penduduk di perkotaan banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta, membuka warung makan, serta pedagang eceran.

Tabel 2.41.
Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kapuas Hulu, Agustus 2017

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	41.096	39.917
2	Pertambangan dan Penggalian	6.881	188
3	Industri	2.052	1.300
4	Listrik, Gas dan Air Minum	245	0
5	Konstruksi	7.167	0
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	8.131	11.502
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.146	0
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	289	347
9	Jasa Kemasyarakatan, social dan Perorangan	12.899	6.454
	Total	20.904	59.708

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

2.4.2. Fasilitas Infrastruktur/Wilayah

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi transportasi, perhubungan darat, perhubungan sungai, perhubungan udara, telekomunikasi, perumahan, dan listrik air.

a. Transportasi dan Perhubungan

Secara umum, apabila dilihat dari sistem pengangkutan atau transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu, belum seluruh wilayah mendapat layanan jaringan transportasi yang baik. Jalur pelayanan sungai yang saat ini dianggap sebagai jalur yang memiliki akses paling tinggi dari dan ke bagian lain wilayah Kabupaten. Apalagi bila jalur jalan darat lintas selatan dapat berfungsi baik maka wilayah jalur Sungai Kapuas ini akan menjadi semakin penting dan melebar ke arah selatan. Tetapi untuk kondisi saat ini



wilayah sekitar ruas selatan baru dapat digolongkan sebagai wilayah yang memiliki akses sedang karena ketergantungan wilayah ini terhadap jalur pelayaran Sungai Kapuas masih tinggi. Wilayah-wilayah lain seperti sekitar jalur pelayaran sungai embaloh dan jalur jalan darat Putussibau-Tanjungkerja-Benua Martinus-Lanjak-Badau-Nanga Kantuk sampai ke Perbatasan Kabupaten Sintang juga digolongkan sebagai wilayah dengan aksesibilitas sedang. Sedangkan wilayah lain merupakan wilayah dengan aksesibilitas rendah yang umumnya sangat sulit dicapai baik melalui sungai maupun darat. Sistem pengangkutan yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu secara garis besar merupakan perpaduan antara subsistem perhubungan darat, sungai dan udara.

b. Perhubungan Darat

Sarana dan prasarana jalan mempunyai arti penting untuk kelancaran kegiatan ekonomi suatu daerah. Namun demikian sarana dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat terbatas. Hingga Tahun 2017, panjang jalan Kabupaten di Kapuas Hulu adalah 1.108,330 km dengan rincian jenis permukaan masing- masing 166,167 km berupa jalan aspal 398,125 km jalan kerikil, Rigid Beton 200,578 Km dan jalan tanah sepanjang 343,460 km. Kondisi jaringan Jalan umumnya masih dalam kondisi rusak (16,65 %) dan rusak berat (31,46 %), jalan kabupaten dalam kondisi baik sekitar (24,10 %), dan sisanya sekitar (27,79 %) dalam kondisi sedang. Jembatan yang dibangun sampai Tahun 2017 dengan kondisi baik terget pada Tahun 2017 sebesar 400 unit terealisasi 519 unit, jembatan dengan kondisi sedang sebanyak 80 jembatan dari target jembatan sebanyak 78 unit. Dan jumlah jembatan dengan kondisi rusak sebanyak 134 unit.

c. Perhubungan Sungai

Angkutan sungai merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup penting di Kapuas Hulu. Banyak lokasi baik Desa maupun Kecamatan yang saat ini masih belum terjangkau dengan angkutan darat, sehingga satu-satunya cara untuk mencapai lokasi tersebut adalah melalui angkutan sungai. Angkutan sungai dijadikan sarana penghubung maupun penunjang kegiatan ekonomi bagi daerah pemukiman yang ada ditepi sungai seperti Suhaid, Jongkong, Selimbau, Semitau, Badau, Silat Hilir, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir.

Berdasarkan data Tahun 2017 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kapuas Hulu, jumlah angkutan sungai yang tercatat di Kapuas Hulu sebanyak 482 unit, terdiri dari 38 kapal tambang, 58 unit bandung berumah, 229 unit speed boat, dan 157 motorboat. Sedangkan untuk Steigher (pelabuhan mini) pada Tahun 2013 sebanyak 24 buah, Tahun 2014 sebanyak 9 buah, Tahun 2015 sebanyak 11 buah, Tahun 2016 sebanyak 17 buah dan untuk Tahun 2017 sebanyak 7 buah. Dan jumlah dermaga sebanyak 3 buah pada Tahun 2015.

d. Perhubungan Udara

Perhubungan udara di Kabupaten Kapuas Hulu dilayani oleh perusahaan penerbangan NamAir, Wings dan Garuda Indonesia untuk jalur penerbangan Pontianak-Putussibau.



Pada Tahun 2017, jumlah pesawat yang berangkat melalui Bandara Pangsuma Putussibau tercatat sebanyak 761 penerbangan. Angka ini mengalami kenaikan 1,05 persen dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang hanya 732 penerbangan.

Keberangkatan dan kedatangan melalui bandara Pangsuma Putussibau masing-masing berhasil mengangkut sebanyak 39.278 dan 40.126 orang. Jumlah ini meningkat dibanding Tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2016 yang mengangkut 35.002 orang (berangkat) dan 34.698 orang (datang).

e. Telekomunikasi

Pada Tahun 2017 jumlah manara telekomunikasi operator indosat sebanyak 33 manara, telkomsel sebanyak 42 manara sedangkan jumlah desa yang terlayani jaringan telekomunikasi sebanyak 148 desa, 4 kelurahan, desa dengan jaringan komunikasi yang lemah sebanyak 11 desa dan desa yang tidak mempunyai jaringan telekomunikasi sebanyak 119 desa serta Bantuan BTS sebanyak 19 BTS.

f. Perumahan

Kondisi perumahan dan pemukiman rakyat kurang menguntungkan dari aspek kesehatan, hal ini antara lain disebabkan karena rendahnya tingkat pengetahuan serta kemampuan ekonomi masyarakat, lokasi permukiman mengikuti aliran sungai dengan pola pertaniannya yang berpindah-pindah.

g. Listrik

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kapuas Hulu, permintaan tenaga listrik juga semakin besar, oleh sebab itu upaya pemenuhan kebutuhan listrik perlu mendapat perhatian dengan memanfaatkan bahan mineral sebagai sumber utama yang dapat menghasilkan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) jumlah pelanggan listrik pada akhir Tahun 2017 sebanyak 43.153 pelanggan. Total nilai penjualan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 6.275.368.648,-.

h. Air Minum

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Putussibau dapat diketahui bahwa pada Tahun 2017 tercatat jumlah pelanggan air minum sebanyak 11.573 pelanggan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pelanggan, jumlah air yang disalurkan dan banyaknya nilai air yang disalurkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.42
Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Minum

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan Air Minum	Banyaknya Air Minum(m ³)	Total Nilai Air Minum (Rp)
1	Rumah Tempat Tinggal	10.450	2.515.174	8.608.960.189
2	Hotel/Niaga Besar	43	25.893	167.890.381
3	Badan Sosial dan Rumah Sakit/ Sosial Khusus	251	90.383	203.810.211
4	Rumah Ibadah/ Sosial Umum	26	8.375	12.104.243
5	Instansi Pemerintah	101	44.384	279.084.651
6	Perusahaan dan Pertokoan/ Niaga Kecil	699	252.819	1.001.066.766
7	Industri Besar	2	1.354	19.280.722
8	Pelabuhan	1	123	4.096.286
	Jumlah	11.573	2.938.705	10.296.229.449

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017



2.4.3. Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

a. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Komposisi umur penduduk Kapuas Hulu pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.43
Rasio Ketergantungan

KABUPATEN/KOTA : 6106 KAPUAS HULU							
NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1.	<15 (USIA MUDA)	31.142	25,33%	29.088	25,11%	60.230	25,22%
2.	15-64 (USIA PRODUKTIF)	87.305	71,02%	82.144	70,90%	169.449	70,96%
3.	>64 (USIA NON PRODUKTIF)	4.490	3,65%	4.628	3,99%	9.118	3,82%
JUMLAH		122.937	100%	115.860	100%	238.797	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

Perbandingan jumlah penduduk antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kapuas Hulu pada Tahun 2017 adalah 106,11. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan, dimana perbandingannya adalah pada setiap 100 orang perempuan terdapat 106-107 laki-laki. Sedangkan jika dilihat angka rasio ketergantungan (dependency ratio) antara jumlah penduduk umur 0-14 Tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 Tahun (angkatan kerja) adalah sebagai berikut:

- rasio ketergantungan anak-anak: 35,54%
- rasio ketergantungan lansia: 5,38%
- total rasio ketergantungan: 40,93%

Dengan demikian, pada Tahun 2017 setiap 100 orang berusia produktif di Kapuas Hulu secara rata-rata terbebani oleh sekitar 41 orang.



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi, maka daerah otonom Kabupaten Kapuas Hulu menerima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalan dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan aspek penerimaan pendapatan daerah dimana hal tersebut berperan cukup besar dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan masih berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2011-2016, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.1.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2016

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2011	24.798.926.784	852.158.070.754	2,91%
2012	31.525.600.001	915.937.541.308	3,44%
2013	31.134.105.914	1.081.457.520.226	2,88%
2014	72.989.107.133	1.225.466.444.483	5,96%
2015	34.370.922.700	1.274.982.240.125	2,70%
2016	64.788.107.364	1.695.798.783.909	3,82%
Rata-rata	43.267.794.983	1.174.300.100.134	3,68%

Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Kapuas Hulu tergolong cukup rendah dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal daerah hanya sekitar 3,68%. Meskipun tren rasionya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, namun pertumbuhannya masih relatif kecil. Adapun derajat desentralisasi fiskal yang tertinggi dalam enam tahun terakhir terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 5,96%. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal daerah ini menunjukkan kurang optimalnya pencapaian PAD. Diharapkan di tahun-tahun mendatang, pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

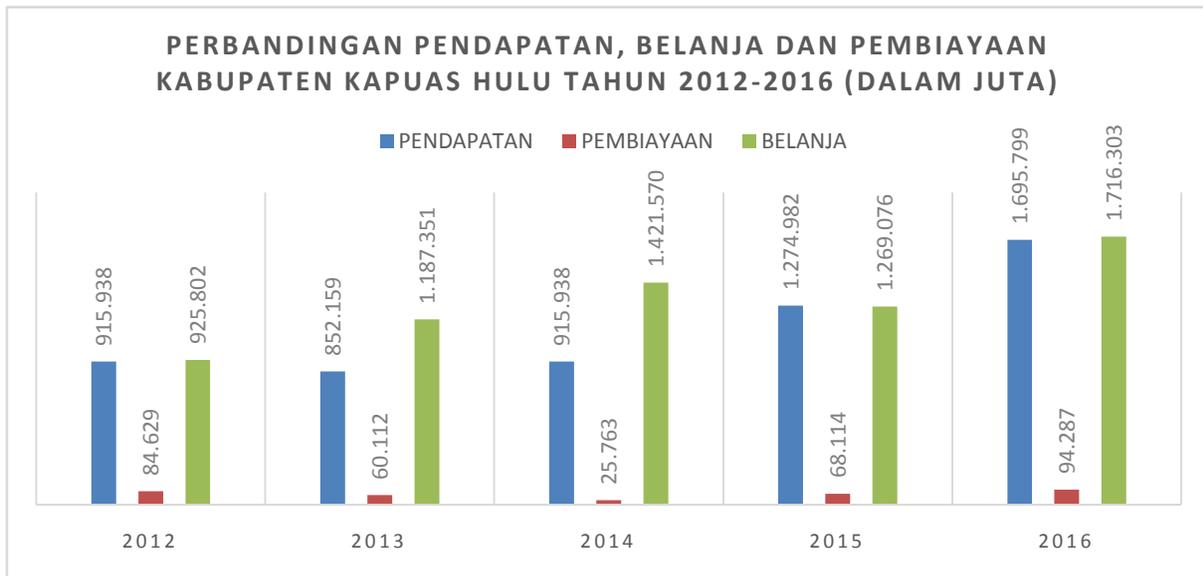
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dilihat dari perbandingan antara belanja dan pendapatan dan pembiayaan, maka pengelolaan keuangan daerah untuk pembangunan masih bisa dikatakan cukup sehat. Hal ini bisa diindikasikan dari relatif setaranya besaran antara belanja dan pendapatan yang ada.

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1.



Sumber: data yang diolah

a. Pendapatan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Secara umum, realisasi pendapatan daerah menjadi analisis utama dalam pengelolaan keuangan daerah mengingat pendapatan daerah merupakan esensi penggerak setiap program dan kegiatan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan kenaikanyang cukup tinggi yaitu sebesar 90 persen, dimana pendapatan pada tahun 2013 sebesar Rp 852,159 milyarmeningkat menjadi 1,619 triliun pada tahun 2017 atau rata-rata pertumbuhan mencapai 18,56% pertahun. Meskipun secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, namun pertumbuhannya mengalami perlambatan sejak tahun 2014, dan bahkan pada tahun 2017 pendapatan daerahnya (angka sementara) cenderung lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016.

Secara umum dinamika perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan yang sebagian besar dari dana DAU. Rata-rata kontribusi dana perimbangan pada pendapatan daerah mencapai 85,91%. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk lebih memperbesar proporsi PAD dalam pendapatan daerah, agar suatu saat terjadi penurunan dana dari sumber perimbangan tidak mengganggu pelaksanaan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.



Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH	852.159.000.000	915.938.000.000	1.274.982.240.125	1.695.798.783.909	1.619.177.580.000
Pendapatan Asli Daerah	24.799.000.000	31.526.000.000	57.269.569.125	64.788.107.364	45.900.920.000
Pendapatan Pajak Daerah	2.192.000.000	6.493.000.000	12.673.571.125	9.884.040.357	15.820.000.000
Hasil Retribusi Daerah	7.685.000.000	11.770.000.000	14.933.473.400	3.242.003.679	2.830.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.261.000.000	5.841.000.000	7.500.000.000	9.249.484.821	10.500.000.000
Lain-Lain PAD yang Sah	10.661.000.000	7.422.000.000	22.162.524.600	42.412.578.508	16.750.920.000
Dana Perimbangan	758.228.000.000	873.270.000.000	1.064.119.612.000	1.345.352.173.052	1.334.870.682.000
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	57.750.000.000	53.090.000.000	67.226.537.000	54.225.516.213	40.717.489.000
DAU	600.726.000.000	686.859.000.000	913.007.845.000	983.714.397.000	984.403.921.000
DAK	99.752.000.000	77.479.000.000	83.885.230.000	307.412.259.839	309.749.272.000
Lainnya		55.842.000.000			
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	69.132.000.000	11.142.000.000	153.593.059.000	285.658.503.493	238.405.978.000
Hibah		532.000.000	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.683.000.000		20.000.000.000	25.871.531.493	20.000.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.508.000.000		133.593.059.000	171.469.372.000	218.405.978.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	8.941.000.000	10.610.000.000	-	88.317.600.000,00	-
Total Pendapatan Daerah	852.159.000.000	915.938.000.000	1.274.982.240.125	1.695.798.783.909	1.619.177.580.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pemanfaatan dan perolehan Dana Perimbangan adalah relatif tanpa masalah berarti kecuali DAK yang memerlukan dana pendamping daerah minimal 10% dari jumlah DAK sehingga mengurangi porsi pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak



diketahui secara pasti potensi penerimaannya karena bersifat penerimaan insidental. Meskipun begitu trennya dari tahun 2013 ke 2017 trennya terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 69,132 milyar pada tahun 2013 menjadi 238, 405 milyar pada tahun 2017 yang disebabkan oleh peningkatan pos dana penyesuaian dan otonomi khusus.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bidang tertentu yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2013–2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kebupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
PENDAPATAN	852.159.000.000	915.938.000.000	1.274.982.240.125	1.695.798.783.909	1.619.177.580.000	18,79
BELANJA	1.187.350.809.014	1.421.570.042.815	1.269.076.400.125	1.716.302.951.973	1.615.883.799.750	9,60
BELANJA TIDAK LANGSUNG	508.852.285.989	697.907.663.221	685.927.691.170	810.850.840.838	883.600.945.035	15,66
Belanja Pegawai	390.205.844.089	443.382.228.395	485.881.435.970	484.714.818.356	513.103.283.035	7,21
Belanja Hibah	33.774.325.000	75.857.795.050	51.522.635.000	45.247.728.509	41.608.610.000	18,08
Belanja Bantuan Sosial	4.728.400.000	882.186.000	2.806.950.000	120.000.000	913.000.000	175,49
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	77.284.653.900	176.395.120.200	-	1.620.030.000	1.865.000.000	35,84
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota/ dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-	-	142.716.670.200	277.008.007.800	323.111.052.000	52,68
Belanja Tidak Terduga	2.859.063.000	1.390.333.576	3.000.000.000	2.140.256.173	3.000.000.000	18,98
BELANJA LANGSUNG	678.498.523.025	723.662.379.594	583.148.708.955	905.452.111.135	732.282.854.715	5,85
Belanja Pegawai	29.374.561.400	34.794.916.600	36.188.218.400	38.095.437.200	49.953.107.800	14,71
Belanja Barang dan Jasa	274.169.219.990	319.255.961.164	293.811.649.325	350.614.583.423	320.617.139.267	4,81
Belanja Modal	374.954.741.635	369.611.501.830	253.148.841.230	516.742.090.512	361.712.607.648	10,30
JUMLAH BELANJA	1.187.350.809.014	1.421.570.042.815	1.269.076.400.125	1.716.302.951.973	1.615.883.799.750	9,60
SURPLUS / (DEFISIT)	(335.191.809.014)	(505.632.042.815)	5.905.840.000	(20.504.168.064)	3.293.780.250	

Sumber: Badan Keuangan Daerah



Perkembangan belanja daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2017 secara rata-rata meningkat 9,60% per tahun. Sebagian besar peningkatan belanja ini dipengaruhi oleh peningkatan belanja tak langsung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,66% pertahun dalam kurun waktu tahun 2013 ke 2017. Sedangkan belanja langsung dalam kurun waktu yang sama pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 5,85%. Jika kita bandingkan antara besaran pendapatan dengan total belanja daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2017, maka akan terlihat bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2016 terjadi defisit dimana total belanja melebihi pendapatan yang ada. Pada dasarnya defisit yang terjadi tidak selalu bernilai negatif, karena dapat ditutup dengan SILPA sehingga dapat menekan angka SILPA pada tahun berikutnya, namun dengan asumsi bahwa penyerapan anggaran pada tahun berjalan dapat dilakukan secara maksimal. Yang perlu diperhatikan terkait defisit belanja ialah, bahwa besaran defisit belanja harus direncanakan dan tetap mengacu serta nilainya kurang dari prakiraan SILPA tahun sebelumnya. Sehingga belanja masih tetap bisa dikatakan sehat dan tidak bermasalah.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dari tahun 2014 hingga 2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pembiayaan ini dipengaruhi oleh peningkatan SILPA. Meskipun terjadinya peningkatan SILPA dapat mengindikasikan kurang efektifnya penyerapan anggaran belanja, namun jika tujuannya ialah untuk efisiensi SILPA dapat berarti positif. Secara keseluruhan pembiayaan (netto) yang dapat digunakan untuk menutup defisit belanja dari tahun 2014-2017 juga mengalami peningkatan dari 25,763 milyar di tahun 2013 menjadi 79,449 milyar di tahun 2017.

Gambaran tentang realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Proporsi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2017 (Milyar)

URAIAN	TAHUN			
	2014	2015	2016*	2017*
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	57.388	116.344	110.548	135.704
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.388	116.344	98.857	135.704
			11.692	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.625	48.230	16.261	56.255
Pernyertaan modal (Investasi) Daerah	16.625	32.875	15.875	38.345



URAIAN	TAHUN			
	2014	2015	2016*	2017*
Pembayaran pokok hutang	15.000	15.355	386	17.910
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.625	48.230	16.261	56.255
PEMBIAYAAN NETTO	25.763	68.114	94.287	79.449

Sumber: Badan Keuangan Daerah

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kabupaten Kapuas Hulu pada periode tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2015, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki aset senilai Rp. 2.433.403.710.026,17 dengan nilai asset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp. 2.191.992.735.842,06

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 mencapai Rp 123.828.336.967,05.



Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang untuk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 sebesar Rp.89.710.663.803,58.

Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 23.703.177.269,77. Kewajiban jangka pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebesar Rp 15.284.397.020,04.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015.mencapai Rp. 2.409.700.532.756,40

Tabel 3.5.

Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015

Uraian Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran				
	2011	2012	2013	2014	2015
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	82.755,34	58.512,67	80.903,21	115.896,05	98.730,63
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.878,70	2.094,94	1.193,80	452,81	126,21
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		11,82			
Kas di Bendahara Penerimaan	122,99	177,22		6,06	
Piutang Pajak	197,68	247,79	235,65	773,11	421,32
Piutang Bagi Hasil Provinsi				11.579,28	9.598,40



Uraian Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran				
	2011	2012	2013	2014	2015
Piutang Retribusi	280,81	5,78	3.646,53	947,52	2.158,52
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		64,77	18,00	614,55	449,17
Piutang Lainnya					
Penyisihan Piutang					
Persediaan	689,43	786,13	391,77	3.860,80	3.860,00
Jumlah Aset Lancar					2.824,64
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.086,07	6.347,27	6.607,59	6.658,63	11.308,73
Investasi Non Permanen	92.011,03	68.248,40	92.996,55	140.788,82	123.828,34
Dana Bergulir					
Jumlah Investasi Non Permanen					
Investasi Permanen	865,38	2.793,68	1.118,78	972,63	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	865,38	2.793,68	1.118,78	972,63	
Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar					
Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu					
Penyertaan Modal pada BUMD PD. Uncak Kapuas	19.606,00	24.106,00	34.106,00	44.106,00	54.106,00
Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas	21.182,00	23.182,00	23.444,10	48.945,17	17.312,76
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	454,36	1.204,36	1.055,81	389,17	9.416,91
Investasi Permanen Lainnya					8.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	41.242,36	48.492,36	58.605,91	93.440,34	89.710,66



Uraian Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran				
	2011	2012	2013	2014	2015
ASET TETAP					
Tanah	42.107,74	51.286,05	59.724,69	94.412,97	
Peralatan dan Mesin					89.710,66
Gedung dan Bangunan					
Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.103,01	78.422,45	79.306,68	246.279,28	249.962,99
Aset Tetap Lainnya	164.710,08	199.991,78	209.816,39	230.898,70	269.424,82
Konstruksi dalam Pengerjaan	645.615,91	765.041,60	808.952,97	899.626,79	951.885,70
Akumulasi Penyusutan	1.162.496,14	1.292.751,63	1.511.354,63	1.755.529,31	2.049.057,45
Jumlah Aset Tetap	12.674,60	20.224,29	20.982,66	29.827,07	31.137,46
DANA CADANGAN	58.989,23	27.235,01	45.328,01	60.472,32	59.228,88
Dana Cadangan				1.309.833,05	1.418.704,57
Jumlah Dana Cadangan	2.118.588,99	2.383.666,75	2.675.741,35	1.912.800,41	2.191.992,74
ASET LAINNYA					
Tunggakan UUDP dan UYHD					
Tagihan Penjualan Angsuran					
Tuntutan Ganti Rugi					
Penyisihan Tuntutan Ganti	768,83	689,02	1.146,50	473,16	
Kemitraan dengan pihak ketiga	202,40	9,00			
Aset Tak Berwujud					305,32
Amortisasi Asset tak Berwujud					284,32
Aset Lain-lain		161,75	254,78		
Kas yang telah ditetapkan penggunaannya	2.961,21	7.648,89	4.660,21	4.964,97	5.267,55
Kas Yang Belum					3.940,34



Uraian Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran				
	2011	2012	2013	2014	2015
jenis Statusnya					
Jumlah Aset	18.553,75	18.415,26	18.126,99	18.716,89	25.552,64
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Bunga	2.275.193,94	2.530.125,11	2.852.651,06	2.172.157,22	2.433.403,71
Utang Pada Pihak Ketiga					
Utang Perhitungan Pada Pihak Ketiga					
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Propinsi					
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya					
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keu. Bank	17,37	32,14	8,29	4,76	
Pendapatan diterima dimuka					
Utang Jangka pendek lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek					
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					5,67
Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat					15.278,73
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	6.945,38	781,93	1.100,74	4.981,83	15.284,40
JUMLAH KEWAJIBAN					
EKUITAS DANA	38.418,78	38.418,78	38.418,78	23.418,78	8.418,78
EKUITAS DANA LANCAR	38.418,78	38.418,78	38.418,78	23.418,78	8.418,78
Sisa Lebih	45.381,54	39.232,85	39.527,81	28.405,37	23.703,18



Uraian Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pembiayaan Anggaran (SiLPA)					
Pendapatan Yang Ditanggguhkan					
Cadangan Piutang					
Cadangan Persediaan	84.633,82	60.575,47	82.088,72	116.344,10	
Dana yang belum dapat ditetapkan statusnya	123,21	177,22	0,00	6,06	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek	1.167,92	1.104,47	4.291,95	17.775,26	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	6.086,07	6.347,27	6.607,59	6.658,63	
EKUITAS DANA INVESTASI					
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	6.962,76	770,11	1.100,74	4.981,83	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	85.048,27	67.434,33	91.887,52	135.802,23	
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya					
Dana yang Harus disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Panjang	42.107,74	51.286,05	59.724,69	94.412,97	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.118.588,99	2.383.666,75	2.675.741,35	1.912.800,41	
EKUITAS DANA CADANGAN					
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	38.418,78	38.418,78	38.418,78	23.418,78	
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	2.144.764,13	2.423.457,93	2.721.235,73	2.007.949,62	
JUMLAH EKUITAS DANA					
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					



Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.

Selanjutnya untuk melihat kondisi keuangan daerah lebih lanjut berdasarkan data-data yang ada di Neraca Daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis tersebut untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban daerah yang menjadi beban pembangunan. Analisis rasio keuangan tersebut antara lain **rasio lancar** yaitu untuk mengukur seberapa jauh ekuitas dana lancar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban lancar. Selanjutnya **rasio quick** yaitu untuk melihat kemampuan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban lancar daerah. **Rasio total hutang terhadap ekuitas** yaitu untuk membandingkan besaran ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap kewajiban daerah. Analisis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Rasio atas Neraca
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Lancar (<i>current ratio</i>) (%)	28,23	83,85	83,84	13,21	810,16
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>) (%)	26,90	77,90	76,04	12,34	646,78
3	Rasio total hutang terhadap total ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>) (%)	0,01	0,01	0,02	0,02	0,63

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio lancar pada neraca daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011 – 2015 menunjukkan nilai yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban yang harus dipenuhi adalah tidak menjadikan beban.

b. Rasio Quick (*Quick Ratio*)

Merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio quick pada neraca daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011 – 2015 menunjukkan nilai yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban lancar dapat ditanggung oleh kemampuan kas pemerintah daerah.

c. Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam neraca daerah. Berdasarkan rasio total hutang terhadap total ekuitas neraca daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2011 – 2015 bernilai <1 sehingga kemampuan ekuitas pemerintah daerah untuk menjamin hutang pemerintah daerah tidak menjadikan beban.



Berdasarkan dari analisis atas Rasio Lancar dan Rasio Quick keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Demikian halnya dari Rasio total kewajiban terhadap total ekuitas dapat dilihat bahwa keuangan daerah tidak terbebani oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

- (1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- (2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
- (3) Analisis proyeksi belanja daerah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pengelolaan keuangan daerah pada masa depan maupun kapasitas riil yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan

Perhitungan proyeksi pendapatan empat tahun ke depan (2018-2021) dapat dihitung dengan melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2014-2017, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Sebagai upaya tindak lanjut perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain sebagai berikut:

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Pajak Daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum;



2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data Wajib Pajak khususnya terhadap pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan Retribusi Daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pajak daerah Tahun 2014– 2017.
2. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan meningkat dengan persentase kenaikan berdasarkan perkiraan yang paling riil karena perkembangan tahun 2014–2017 sangat fluktuatif.

Proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2018 hingga 2021 ditargetkan terus meningkat. Pendapatan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 1,684 triliun dan akan menjadi 1,957 triliun pada tahun 2021. Peningkatan proyeksi pendapatan tersebut dipengaruhi oleh kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang diproyeksikan terus meningkat. Proyeksi dana perimbangan tahun 2018 sebesar 1,373 triliun dan akan menjadi 1,503 triliun pada tahun 2021. Sedangkan Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar 262,246 milyar dan akan menjadi 349,359 milyar pada tahun 2021. Peningkatan lain-lain pendapatan yang sah tersebut terutama berasal dari Pendapatan Hibah dan Otonomi Khusus (tambahan penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Profesi guru PNSD, Dana Desa). Sedangkan PAD meskipun diproyeksikan meningkat secara signifikan namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan akan tetap kecil.

Secara lebih rinci perkiraan penerimaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018 – 2021) dapat dilihat pada tabel 3.7.



Tabel 3.7.
Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018–2021

Uraian	TAHUN			
	2018*	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	1.684.997.283.340	1.795.779.943.012	1.874.168.380.727	1.957.841.924.809
Pendapatan Asli Daerah	49.447.084.400	86.226.432.100	95.065.751.810	104.879.222.446
Pendapatan Pajak Daerah	17.402.000.000	19.142.200.000	21.056.420.000	23.162.062.000
Hasil Retribusi Daerah	2.886.600.000	5.773.200.000	6.927.840.000	8.313.408.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	11.235.000.000	12.021.450.000	12.862.951.500	13.763.358.105
Lain-Lain PAD yang Sah	17.923.484.400	49.289.582.100	54.218.540.310	59.640.394.341
Dana Perimbangan	1.373.303.623.140	1.418.442.277.532	1.460.222.272.199	1.503.603.409.973
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	43.974.888.120	52.769.865.744	56.991.455.004	61.550.771.404
DAU	1.004.091.999.420	1.024.173.839.408	1.044.657.316.197	1.065.550.462.521
DAK	325.236.735.600	341.498.572.380	358.573.500.999	376.502.176.049
Lainnya				
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	262.246.575.800	291.111.233.380	318.880.356.718	349.359.292.390
Hibah	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.000.000.000	26.840.000.000	28.182.000.000	29.591.100.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	240.246.575.800	264.271.233.380	290.698.356.718	319.768.192.390
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-
Total Pendapatan Daerah	1.684.997.283.340	1.795.779.943.012	1.874.168.380.727	1.957.841.924.809

Sumber :DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu (diolah)



3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018–2021

Proyeksi belanja perlu untuk dihitung berdasarkan tren pertumbuhan komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung dari tahun 2013–2017. Dalam menyusun proyeksi ini yang menjadi pertimbangan juga ialah bagaimana meningkatkan proporsi belanja langsung dalam total belanja keseluruhan.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa total belanja daerah diproyeksikan meningkat dari 1.683.473.365.072 pada tahun 2018 menjadi 1.940.200.801.487 pada tahun 2021. Proyeksi belanja daerah ini juga mengacu pada target pendapatan yang diproyeksikan akan terus meningkat. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (BTL) diproyeksikan akan meningkat 1,15% pertahun sedangkan Belanja Langsung (BL) diproyeksikan akan meningkat rata-rata 8,67% pertahun. Pertumbuhan BL ini akan dapat meningkatkan proporsi belanja langsung dalam keseluruhan belanja daerah. Target proporsi BL dalam total belanja daerah pada tahun 2018 sebesar 47,38% dan menjadi 52,75% pada tahun 2021. Pada skema proyeksi belanja ini, tahun 2019, 2020, dan 2021 terbentuk defisit belanja. Meskipun begitu besaran defisit anggaran belanja ini telah memperhatikan prediksi besaran SILPA pada tahun sebelumnya, bahkan tujuan pembetulan defisit belanja ini ialah untuk dapat mengurangi SILPA yang ada. Untuk dapat menekan SILPA yang ada maka efektifitas penyerapan anggaran harus dimaksimalkan. Secara keseluruhan proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Proyeksi Belanja Daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun			
	2018**	2019	2020	2021
PENDAPATAN	1.684.997.283.340	1.754.922.634.646	1.829.284.670.846	1.908.444.267.440
BELANJA	1.683.473.365.072	1.769.280.338.068	1.863.061.582.888	1.940.200.801.487
BELANJA TIDAK LANGSUNG	885.816.511.798	895.716.677.044	906.096.905.279	916.760.044.048
Belanja Pegawai	513.616.386.318,31	523.888.714.044,68	534.366.488.325,57	545.053.818.092,08
Belanja Hibah	41.691.827.220,00	41.775.210.874,44	41.858.761.296,19	41.942.478.818,78
Belanja Bantuan Sosial	914.826.000,00	457.413.000,00	274.447.800,00	164.668.680,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.866.865.000	1.868.731.865	1.870.600.597	1.872.471.197
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota/ dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	324.726.607.260,00	324.726.607.260,00	324.726.607.260,00	324.726.607.260,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	797.656.853.274	873.563.661.024	956.964.677.609	1.023.440.757.438
Belanja Pegawai	51.451.701.034,00	52.737.993.559,85	54.056.443.398,85	55.407.854.483,82
Belanja Barang dan Jasa	330.235.653.445,37	363.259.218.789,91	399.585.140.668,90	439.543.654.735,79
Belanja Modal	415.969.498.794,80	457.566.448.674,28	503.323.093.541,71	528.489.248.218,79
JUMLAH BELANJA	1.683.473.365.072	1.769.280.338.068	1.863.061.582.888	1.940.200.801.487
SURPLUS / (DEFISIT)	1.523.918.268	-14.357.703.422	-33.776.912.042	-31.756.534.046

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu (diolah)

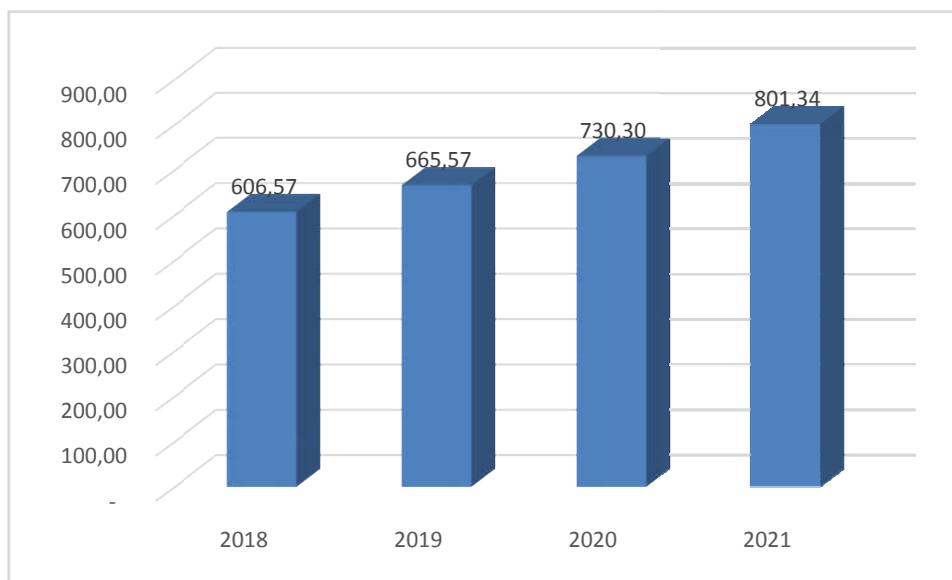


3.3.3. Proyeksi Belanja Wajib Mengikat Tahun 2018-2021

APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Belanja wajib dan mengikat merupakan pendanaan wajib yang harus dibayarkan pemerintah selama periode pembangunan jangka menengah baik untuk membiayai belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun pembiayaan pengeluaran lainnya. Proyeksi belanja wajib dan mengikat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2.
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kab. Kapuas Hulu Tahun 2018-2021 (Milyar)



Sumber: DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu (diolah)

3.3.4. Proyeksi Pembiayaan

Analisis proyeksi pembiayaan dilakukan untuk mengetahui besaran SILPA (Penerimaan Pembiayaan) yang dapat digunakan untuk memprediksi kapasitas riil keuangan daerah. Hasil analisis proyeksi pembiayaan diperoleh skema bahwa besaran SILPA dari tahun 2018-2021 dibuat terus menurun. Prediksi SILPA pada tahun 2018 sebesar 118,26 Milyar, dan terus menurun hingga menjadi 23,013 milyar pada tahun 2021. Pada dasarnya realisasi SILPA tahun 2018 akan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun 2019, dan realisasi SILPA tahun 2019 akan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun 2020, dan seterusnya. Dalam skema ini, besar kecilnya SILPA ini sangat dipengaruhi oleh besaran defisit belanja yang ada. Secara rinci proyeksi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.9.
Proyeksi Pembiayaan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2018–2021 (Milyar)

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	135.704	118.261	94.950	56.855
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	135.704	118.261	94.950	56.855
Penerimaan Kembali piutang				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.967	8.953	4.318	2.085
Pernyataan modal (Investasi) Daerah	18.517	8.941	4.318	2.085
Pembayaran pokok hutang	450	11	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.967	8.953	4.318	2.085
PEMBIAYAAN NETTO	116.737	109.308	90.632	54.770
SILPA (Pembiayaan Netto + Surplus/Defisit Belanja)	118.261	94.950	56.855	23.014

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu (diolah)

3.3.5. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Kebijakan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana pernyataan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.
6. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.



7. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
8. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
9. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
10. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Kapasitas Riil keuangan daerah dari tahun 2018 hingga 2021 diproyeksikan berada antara 1,1 – 1,2 triliun rupiah. Kondisi kapasitas riil yang relatif stagnan ini lebih disebabkan oleh peningkatan belanja wajib dan mengikat tiap tahun dalam kurun waktu 2018-2021 yang cukup signifikan. Sehingga peningkatan pendapatan dari tahun 2018-2021 Kabupaten Kapuas Hulu akan teralokasi untuk membiayai peningkatan belanja wajib dan mengikat pada tahun yang berkenaan. Secara lebih rinci kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Kab. Kapuas Hulu Tahun 2018–2021

Uraian	Target			
	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN (A)	1.685,00	1.795,78	1.874,17	1.957,84
SILPA (B)	74,95	118,26	94,95	56,86
BELANJA WAJIB MENGIKAT (C)	606,57	665,57	730,30	801,34
KAPASITAS RIIL (A+B) - C	1.153,37	1.248,47	1.238,81	1.213,36

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu (diolah)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk lima tahun mendatang.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi empat permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: **Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Integritas Aparatur dan Pengelolaan Keuangan belum optimal; Belum Optimalnya pemanfaatan SDA, pariwisata, distribusi pendapatan serta rendahnya kualitas SDM; Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar; Pembangunan belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan.** Permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum optimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.



Gambar 4.1.
Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu



Dari empat masalah utama daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Keterkaitan masalah utama dengan masalah dan akar masalah adalah bahwa suatu permasalahan utama adalah masalah daerah yang penyelesaiannya harus membutuhkan peran lintas bidang urusan atau bisa di sebut sebagai masalah daerah, sedangkan masalah dan akar masalah merupakan permasalahan perangkat daerah sehingga suatu permasalahan utama di pecahkan melalui penyelesaian masalah-masalah yang ada di perangkat daerah. Kemudian dari permasalahan utama tersebut dicari penyebabnya berdasarkan tugas fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah. Berikut ini penjelasan permasalahan utama serta permasalahan dan akar masalah.

1. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Integritas Aparatur dan Pengelolaan Keuangan belum optimal

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak meninggalkan permasalahan diantaranya adalah tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Dari



masalah Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Integritas Aparatur dan Pengelolaan Keuangan belum optimal menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu:

a. Masih rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kabupaten Kapuas Hulu saat ini bisa di bilang bahwa akuntabilitas kerjanya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari predikat akuntabilitas yang di dapat hanya pada level 'C'. Evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa kelemahan utama yang menjadi penyebab Kabupaten Kapuas Hulu skor predikatnya masih "C" terletak pada kelemahan menyusun dokumen perencanaan. Kelemahan ini tentu saja akan membawa dampak yang sangat besar terhadap siklus selanjutnya. Selain itu dokumen daerah tidak terintegrasi dengan dokumen perangkat daerah dan/atau dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun pada umumnya tidak memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat diukur dengan jelas. Dengan demikian pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan.

Ketiadaan indikator kinerja dan target yang ditetapkan adalah hal yang paling krusial dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Proses akuntabilitas tidak mungkin bisa dilaksanakan jika instansi pemerintah tidak menerapkan apa yang ingin dicapai dengan indikator kinerja yang obyektif dan terukur. Hasilnya, dokumen perencanaan hanya memuat program dan kegiatan sebagai pelaksanaan janji-janji kepala daerah yang sulit diukur keberhasilannya.

b. Belum Optimalnya Integritas Aparatur Dalam Melayani

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Kapuas Hulu ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa Penyediaan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara adil dan merata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.



c. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan dan audit merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi/lembaga. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi/lembaga terhadap setiap pegawai yang berada dalam organisasi adalah wujud dari pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan, serta mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan.

Peranan pengawasan dan audit internal lembaga/organisasi pada rencana kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga keuangan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan APBD. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Kapuas Hulu belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal hal itu dilihat dari opini terhadap laporan keuangan Kabupaten Kapuas Hulu yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kabupaten Kapuas Hulu perlu mengejar opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti diketahui WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga *good* dan *clean government* dapat terwujud.

Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan adalah pengelolaan asset yang masih belum optimal dan sistem penetausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya.

Sebagaimana telah di uraikan di atas, terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka di rincikanlah akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2.
Rumusan Permasalahan Utama
“Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Integritas Aparatur dan Pengelolaan Keuangan belum optimal”

Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah 2. Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah 3. Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintah untuk mendukung akselerasi pembangunan
2. Belum optimalnya integritas aparatur dalam melayani	1. Penyediaan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara adil dan merata 2. Masih rendahnya disiplin aparatur dalam melayani masyarakat 3. Belum adanya SOP terkait pelayanan publik
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1. Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal 2. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran daerah

2. Belum Optimalnya pemanfaatan SDA, pariwisata, distribusi pendapatan serta rendahnya kualitas SDM

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas $\pm 29.842 \text{ km}^2$, atau mencakup 20,33 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang membuat potensinya sungguh sangat luar biasa. Selain itu, salah satu kekuatan ekonomi bagi Kabupaten Kapuas Hulu adalah ditetapkannya beberapa kecamatan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Peningkatan nilai tambah dari produk-produk sumberdaya alam belum sepenuhnya terwujud baik dari aspek sosial, budaya dan ekologi. Efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam terutama untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu relatif masih rendah. Belum tercipta keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan aspek pengembangannya. Tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbarukan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah juga kian meningkat

Pemanfaatan sumber daya alam yang demikian potensial, perlu didukung dengan pengembangan industri kecil menengah sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, pemanfaatan SDA ini berdampak pada meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan SDA yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.



Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan Belum Optimalnya pemanfaatan SDA, pariwisata, distribusi pendapatan serta rendahnya kualitas SDM adalah sebagai berikut:

a. Belum Maksimalnya pemanfaatan SDA untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Luas kawasan budidaya yang meliputi sekitar 44,39% dari luas Kabupaten Kapuas Hulu, cukup potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan maupun pemukiman. Ketersediaan lahan ini diharapkan mampu menarik minat bagi investor untuk menanamkan modalnya, bahkan saat ini lahan perkebunan rakyat di daerah perbatasan tercatat cukup besar dan potensial serta memiliki wilayah pemasaran yang cukup luas di Sarawak seperti perkebunan coklat, lada, karet dan lain-lain.

Peluang untuk meningkatkan sistem pertanian pangan masih cukup besar, karena sumberdaya alam masih sangat banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk pemanfaatan lahan kering yang belum dikembangkan dan dikelola secara optimal. Pengembangan dan penguasaan IPTEK pertanian serta peningkatan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian dan kelembagaan pertanian, akan semakin membuka dan menciptakan berbagai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas serta pengembangan berbagai produk baru atau keanekaragaman produk tanaman pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penggunaan produk pertanian tidak saja untuk kebutuhan konsumsi langsung masyarakat, namun dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor serta bahan baku berbagai kegiatan industri disamping pula untuk kebutuhan pakan ternak yang berkualitas local. Mata pencaharian penduduk disektor pertanian, umumnya masih bersifat monokultur yang secara ekonomi sangat rentan resiko. Belum sepenuhnya dilaksanakan upaya diversifikasi produksi pertanian, menyebabkan nilai produktivitasnya relatif rendah, kurang berdaya saing serta beresiko secara tidak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Permasalahan pada sektor pertanian secara spesifik pada sub sektor peternakan di sebabkan oleh beberapa hal seperti cara beternak yang masih tradisional dan belum menerapkan cara-cara yang dianjurkan dalam program Panca Usaha; belum memadainya prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha peternakan; kelembagaan petani ternak belum berfungsi baik dan optimal; kurangnya modal bagi peternak dalam mengembangkan usahanya; kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah dimana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masih kurang, baik dari aparat pemerintahan/dinas terkait maupun peternak itu sendiri. Permasalahan sub sektor perikanan antara lain masih banyak ditemukannya upaya-upaya penangkapan ikan di perairan umum dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang sehingga sangat berdampak pada kerusakan habitat dan ekosistem perikanan serta berakibat semakin menurunnya produktivitas; pengusaha budidaya perikanan darat hingga saat ini belum dilakukan dan dikembangkan secara optimal; prasarana dan sarana penunjang usaha perikanan relatif masih terbatas; serta kurangnya tenaga penyuluh dalam rangka pengembangan dan pengelolaan usaha dan hasil-hasil



perikanan. Permasalahan pada sub sektor perkebunan antara lain rendahnya kualitas komoditas tanaman perkebunan sehingga belum mendukung permintaan pasar khususnya untuk kebutuhan ekspor; belum berkembangnya secara sinergis dan mantap hubungan kemitraan antara petani perkebunan dengan pihak pengembang; lemahnya keterkaitan industri hulu-hilir dan keterkaitan petani-produsen-konsumen serta penunjang agribisnis lainnya; kesenjangan yang cukup besar dibidang informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengetahuan dan keterampilan yang rendah baik dari aparat pemerintah maupun petani perkebunan itu sendiri; serta keterkaitan antara penelitian/pengkajian, pelatihan dan penyuluhan tidak berjalan secara berkesinambungan.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga cukup rentan sebagai akibat sistem distribusi yang kurang efisien untuk menjamin ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah. Disamping itu, terbatasnya lahan yang cocok dan sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman pangan khususnya padi dan sayur-sayuran selain adanya kendala pada tingkat kemampuan penguasaan teknologi serta kemampuan petani dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan usaha pertanian tanaman pangan di daerah pedalaman dan perbatasan masih dilaksanakan secara berpindah-pindah dengan siklus yang semakin pendek.

b. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata Daerah

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa potensial. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi wisata yang terbentuk secara alamiah dari kondisi geografis, sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjadi tujuan pariwisata seperti: 1). obyek wisata budaya yang berupa kekayaan nilai-nilai tradisional diantaranya adalah obyek wisata budaya Rumah Betang serta berbagai kesenian tradisional dari masing-masing anak suku Dayak dan Melayu; 2). obyek wisata alam, diantaranya hutan alam primer, berbagai spesies flora dan fauna, bentangan alam gunung dan bukit yang sangat indah, fenomena alam seperti air terjun, gunung/riam, dan gua-gua alam, serta obyek wisata air lainnya seperti danau dan sungai, salah satunya obyek wisata alam yang sudah dikenal dunia adalah Taman nasional betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum.

Bidang kepariwisataan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai obyek wisata yang begitu potensial tersebut tetapi masih belum memiliki daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara padahalmemiliki prospek pasar skala nasional dan internasional. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan kawasan wisata, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata.

Potensi-potensi tersebut belum bisa dijadikan salah satu pendongkrak ekonomi daerah terutama meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sektor pariwisata masih kalah dengan sektor pertanian, kegutanan dan perikanan. pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kapuas Hulu hanya mencapai 6.772 orang dan tidak terlalu signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pariwisata dikelola secara optimal maka potensi wisatawan lokal maupun mancanegara bisa meningkat mencapai angka 100% sehingga secara langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata



hingga level internasional. Oleh karena itu, agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah

c. Belum Optimalnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan terpencar-pencar dalam kelomok yang kecil terutama di daerah pedalaman, menyulitkan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang optimal maupun pelayanan kebutuhan dasar masyarakat juga pelaksanaannya belum efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan pemerataan pendapatan belum tercermin di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagian kegiatan ekonomi masih terpusat di ibu kota kabupaten menyebabkan peluang-peluang kesempatan kerja atau berusaha masih terbatas. Hal itu yang menyebabkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Hulu belum merata di seluruh wilayah.

Lambatnya pertumbuhan sektor riil disebabkan oleh rendahnya kinerja investasi, dimana kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu belum meluas khususnya pada sektor-sektor ekonomi produktif serta kurangnya investasi swasta baik PMDN maupun PMA. Kurangnya investasi tersebut menyebabkan pembangunan ketenagakerjaan belum berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan oleh tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja serta belum luasnya lapangan dan kesempatan kerja yang tersedia, khususnya di luar sektor pertanian. Disamping itu belum terpadunya sistem informasi dan bursa tenaga kerja, dan program pengembangan tenaga kerja pemuda mandiri serta peningkatan kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya berkembang dan membuahkan hasil secara optimal.

d. Masih Rendahnya Kualitas SDM Masyarakat Kapuas Hulu

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunandaerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Kapuas Hulu berkorelasi dengan kualitas SDM. Indikasi atas kualitas SDM antara lain diukur dengan sejauh mana SDM Kabupaten Kapuas Hulu dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri. Peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan komposit dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Penghasilan (pendidikan) diakui secara luas adalah unsur mendasar dari pembangunan manusia. Sektor pendidikan diukur dengan dua indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari bidang pendidikan, salah satunya indikatornya yaitu meningkatnya angka harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Semakin tinggi suatu daerah harapan lama sekolahnya mempresenatsikan bahwa kualitas dan pemeretaan pendidikan di daerah tersebut sudah baik. Tingkat penyebaran dan pemerataan lembaga pendidikan beserta prasarana dan sarana



pendukungnya saat ini masih rendah. Dengan wilayah geografis dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta terbatasnya infrastruktur, aksesibilitas, SDM termasuk kebutuhan biaya yang begitu besar, menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh kesempatan secara optimal dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Masih rendahnya tingkat penyebaran dan pemerataan lembaga pendidikan beserta prasarana dan sarana pendukungnya, serta indikator keberhasilan pendidikan yang masih rendah, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 (diluar jenjang pendidikan SD/MI) masing-masing sebesar 46,49% dan 28,64%. Demikian pula dengan Angka Partisipasi Murni (APM) yang masing-masing 63,15% dan 48,24%.

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan masyarakat antara lain adalah jangkauan pelayanan kesehatan terbatas; rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan; terbatasnya jumlah dan kualitas baik prasarana, sarana maupun tenaga kesehatan yang tersedia serta jumlah anggaran dan dana operasional untuk kegiatan pelayanan kesehatan relatif masih minim. Selain itu, permasalahan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain: dengan luas dan kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu menyebabkan jangkauan pelayanan kesehatan masih sangat terbatas; kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan; terbatasnya jumlah dan kualitas baik prasarana, sarana maupun tenaga kesehatan yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan Status gizi yang salah satunya dapat dilihat dari angka Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, pada tahun 2015 hanya sebesar 0,39 persen di sebabkan karena Ketersediaan tenaga medis saat ini masih sangat jauh dari memadai bahkan sangat minim jika dibandingkan dengan rasio standar ISO 2010 yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah “Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Rumusan Permasalahan Utama
“Belum Optimalnya pemanfaatan SDA, pariwisata, distribusi pendapatan serta rendahnya kualitas SDM”

Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pemanfaatan SDA untuk peningkatan perekonomian masyarakat	1. Mata pencaharian penduduk sektor pertanian masih bersifat monokultural 2. Masih rendahnya kualitas komoditas tanaman perkebunan sehingga belum mendukung permintaan pasar khususnya untuk ekspor 3. Semakin menurunnya produktivitas pertanian 4. Masih rendahnya kesejahteraan petani 5. Cara beternak yang masih bersifat tradisional 6. Masih rendahnya produksi perikanan bila



	dibandingkan dengan potensi yang ada
2. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya sarana dan prasana di obyek wisata2. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata3. pemasaran pariwisata belum optimal
3. Belum optimalnya pemerataan pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan ekonomi masih terpusat di ibu kota kabupaten2. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan kegiatan usaha di pedesaan3. Lambatnya pertumbuhan sektor riil
4. Masih Rendahnya kualitas SDM masyarakat Kapuas Hulu	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan2. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal dan merata3. Masih rendahnya daya beli masyarakat

3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan antar komunitas masyarakat sebagai akibat terbatasnya akses transportasi dan infrastruktur sosial ekonomi lainnya pada komunitas masyarakat pedesaan dan tertinggal serta di wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan, banyaknya infrastruktur dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi dengan baik, kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tidak tersebar merata, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia, pembangunan wilayah-wilayah tertinggal belum mendapatkan prioritas, serta belum terintegrasi dan optimalnya dukungan sektor-sektor pembangunan untuk pengembangan wilayah tertinggal, pedalaman dan perbatasan terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Beberapa wilayah pedalaman khususnya di Utara-Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif sulit dijangkau baik melalui sungai maupun jalan darat, memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang sangat lemah. Terbatasnya infrastruktur yang tersedia menjadikan wilayah-wilayah ini sulit dijangkau oleh sistem perdagangan antar wilayah yang pada akhirnya menyebabkan wilayah ini kurang mendapat rangsangan untuk menumbuhkan berbagai proses produksi. Kendala lainnya adalah rendahnya pengetahuan teknologi produksi oleh masyarakat dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum



terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, dan pemukiman) secara merata menjadi “PR” bagi pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pembangunan sisa pemerintahan empat tahun ke depan.

Kelancaran sistem transportasi sungai sangat tergantung pada iklim dan cuaca terutama siklus hidrologi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada musim kemarau, umumnya debit dan tinggi permukaan air sungai menurun sehingga kapasitas sungai sebagai jalur angkutan menjadi menurun pula. Bahkan, bila kemarau berjalan cukup panjang maka debit air Sungai Kapuas pun sampai pada titik dimana motor air tidak dapat melaluinya. Di beberapa pusat permukiman dimana jalan raya sebagai alternatif belum berfungsi dengan baik, maka pada saat-saat kemarau panjang harga bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari menjadi sangat mahal.

Sebagian besar baik jalan kolektor maupun lokal masih berupa jalan yang telah diperkeras yang masih memiliki mutu lapis perkerasan yang sangat rendah. Akibatnya sangat merugikan secara ekonomi karena banyak waktu yang hilang akibat waktu tempuh yang lama serta berdampak pula pada kerusakan yang kian cepat terhadap kendaraan yang memanfaatkan atau melalui jalan-jalan tersebut.

Minimnya jumlah sarana angkutan umum yang beroperasi serta kurang memadainya prasarana jalan yang menghubungkan antar wilayah, berdampak pada minimnya jumlah fasilitas terminal yang dibangun. Dari 6 terminal yang ada, hampir seluruhnya belum berfungsi dengan baik sehingga kondisinya pun tidak terawat dan terpelihara, disamping itu keberadaan terminal ini juga tidak banyak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, khususnya penerimaan dari pungutan retribusi.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

a. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit diwujudkan. Minimnya dana pembangunan ekonomi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana pembangunan terserap pada belanja pegawai sehingga porsi untuk peningkatan infrastruktur dasar menjadi berkurang.

Panjang jalan kabupaten di Kapuas Hulu adalah 1.186,874 Km dengan rincian jenis permukaan masing-masing 166,862 Km berupa jalan aspal, 334,786 Km jalan kerikil, Rigid Beton 172,728 Km dan jalan tanah sepanjang 512,498 Km. Kondisi jaringan jalan umumnya masih dalam kondisi rusak (11,30 %) dan rusak berat (42,00%), hanya sekitar (35,07%) jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan sisanya sekitar (11,62%) dalam kondisi sedang. Jembatan yang dibangun sampai tahun 2015 adalah sepanjang 6.575,20 Km, atau (612 buah). Jumlah jembatan yang dalam kondisi baik dan layak dilalui sebanyak 480 buah



(78,43%) jembatan, kondisinya sedang 61 buah, rusak ringan 40 buah dan rusak berat 31 buah. Sebagian besar jalan kolektor dan lokal masih berupa jalan yang diperkeras yang memiliki mutu lapis perkerasan yang rendah. Sarana angkutan yang tersedia terbatas, disamping itu dari 6 terminal yang ada, hampir seluruhnya tidak berfungsi dengan baik dan tidak terawat. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, kualitas dan representatif yang menjamin keselamatan penumpang, cenderung menyebabkan minat masyarakat yang semakin menurun.

Kendala dibidang energi kelistrikan adalah keterbatasan dana dan investor untuk melakukan investasi dalam pengembangan berbagai sumber energi alternatif. Kondisi ini dipicu oleh adanya kendala fisik geografis serta terbatasnya SDM yang terdidik dan terampil.

Pemanfaatan air bersih melalui fasilitas yang dikelola oleh PDAM yang merupakan faktor utama dalam menunjang kesehatan penduduk, ternyata pemanfaatannya tercatat masih rendah yakni sekitar 13,18%. Umumnya penduduk Kabupaten Kapuas Hulu masih mengandalkan sumber air dari aliran Sungai Kapuas baik untuk kebutuhan air minum maupun kebutuhan sehari-harinya (86,82%). Sistem pelayanan sarana air bersih hingga tahun 2015 dilayani oleh 1 PDAM dengan sumber air baku dari air sungai dan baru menjangkau Kota Putussibau dan beberapa kecamatan saja. Hingga tahun 2015, jumlah pelanggan yang terlayani jaringan air bersih dari saluran pipa air PDAM adalah sebanyak 10.336 pelanggan, dengan rincian untuk rumah tempat tinggal sebanyak 9.716 pelanggan, dan perusahaan dan pertokoan sebesar 620 pelanggan. Sementara itu, produksi air bersih yang disalurkan kepada pelanggan tahun 2015 sebanyak 3.544.225 m³. dengan besarnya sebesar Rp 53.526.661.095,- dimana juga terjadi kebocoran sebanyak 1.030.192 m³. selain masih terbatasnya infrastruktur dasar, masalah perumahan juga menjadi kendala di Kabupaten Kapuas Hulu. sampai saat ini masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 11,23 persen. hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten agar dapat menata kawasan kumuh terutama di perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah “Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar” di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan Utama
“Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar”

Masalah	Akar Masalah
1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar	1. Mata pencaharian penduduk sektor belum meratanya pembangunan infrastruktur perhubungan 2. Pemanfaatan air bersih untuk rumah tangga masih rendah 3. Masih rendahnya ketersediaan listrik di perdesaan 4. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata



4. Pembangunan Belum Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Kesadaran masyarakat umumnya masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan kelestarian sebagai akibat lemahnya ikatan sosial dan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta membuka peluang sekaligus menyimpan potensi terjadinya konflik kepentingan antar sektor maupun antar pihak-pihak yang merasa dirugikan dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan luas kawasan konservasi yang ada sekarang ini sebesar 55,61 persen (Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014) dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, membawa konsekuensi pada tugas dan tanggung jawab yang diemban dirasakan cukup berat.

Menurunnya kualitas hutan sebagai penyangga kehidupan kawasan di sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi ancaman serius saat ini. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi disebabkan oleh adanya peningkatan peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan dan perladangan berpindah, terjadinya kebakaran hutan yang secara intensitas dan frekuensinya cukup tinggi setiap tahunnya serta tidak terkendalinya kegiatan-kegiatan penebangan hutan secara liar. Pembinaan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam, jika tidak dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran maka pemanfaatan dan eksploitasi yang dilakukan sebagai akibat desakan ekonomi dan kebutuhan hidup yang makin meningkat, akan menjadi ancaman terhadap kelestariannya. Kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam seperti kegiatan penebangan kayu/hutan secara liar (*illegal logging*), perdagangan liar (*illegal trading*), penambangan emas ilegal (PETI) yang hanya berorientasi untuk kepentingan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kepentingan kehidupan sosial lainnya yang perlu di perhatikan dalam pembangunan ke depan.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan pembangunan belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah belum optimalnya upaya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Kabupaten Kapuas Hulu harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat mewujudkan tumbuhnya kenyamanan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, generasi sekarang dan selanjutnya.



Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik dan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai/laut serta pencemaran udara dari aktivitas pabrik.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah “Menurunnya kualitas lingkungan hidup” di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan Utama
“pembangunan belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan”

Masalah	Akar Masalah
1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup	1. Kejadian kebakaran hutan yang intensitas dan frekuensinya cukup tinggi akibat peningkatan alih fungsi lahan 2. Semakin meningkatnya kegiatan penambangan kayu/hutan secara liar (<i>illegal logging</i>), perdagangan liar (<i>illegal trading</i>), penambangan emas ilegal yang hanya berorientasi kepentingan ekonomi jangka pendek

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.



4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengungkap perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarukan yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan



dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Kapuas Hulu yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami



perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional (RPJMN 2015-2019)

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyesuaian dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk



memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sertamengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar



dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan barat Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.

Sebagai bagian dari wilayah Pulau Kalimantan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Pulau Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Pulau Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini di cerminkan dengan meningkatnya kontribusi PDRB wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada tabel Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Target Sasaran Makro Kalimantan Barat
Dalam RPJMN 2015-2019 Buku III

No.	Indikator Makro	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	6,0	6,2	7,2	7,9
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,7	8,0	7,4	6,8	6,1
3.	Tingkat Pengangguran (%)	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III



Gambar 4.2.
Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pulau Kalimantan RPJMN 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

a. Pengembangan Kawasan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan pertambangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

Bidang Informasi dan Telekomunikasi

1. Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi di Kawasan perbatasan;
2. Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, **Kapuas Hulu**, Bekayang, Seruyan dan Sekadau;
3. Pengembangan jaringan internet;
4. Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Kalimantan Barat.



Penguatan Regulasi dan Insentif

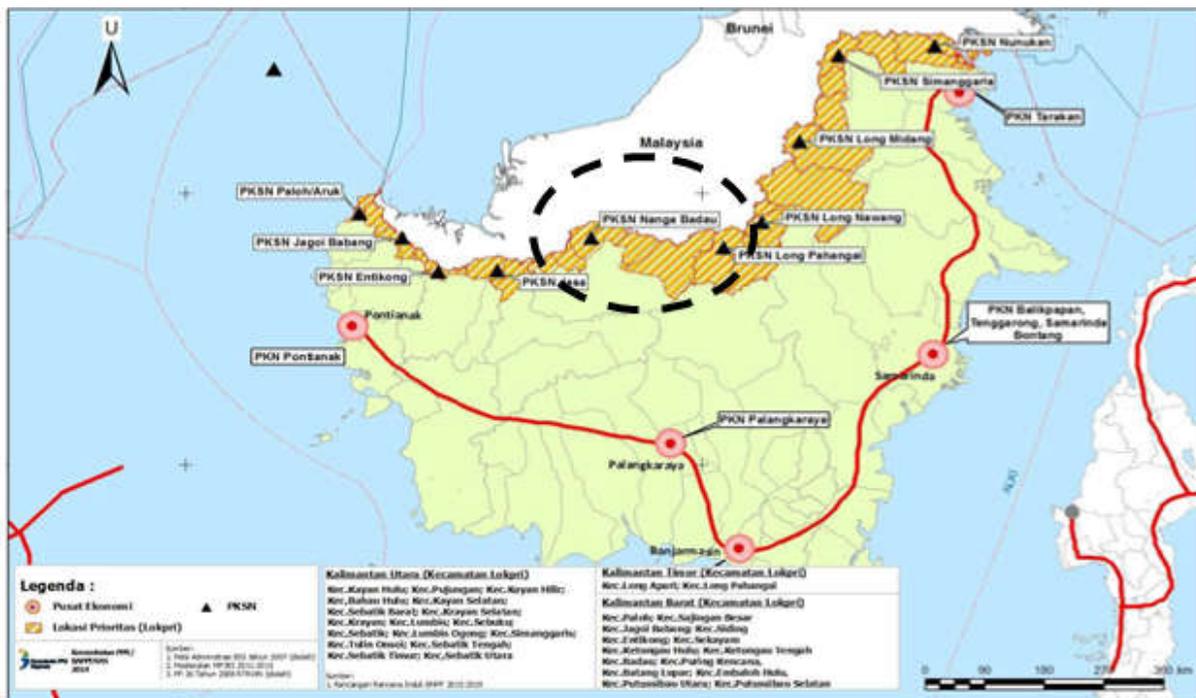
Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan Negara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Kalimantan

No.	Kabupaten	Kecamatan Lokasi Prioritas
1.	Sambas	Paloh; Sajingan Besar
2.	Bengkayang	Jagoi babang; Siding
3.	Sanggau	Entikong; Sekayam
4.	Sintang	Ketungau Hulu; Ketungau Tengah
5.	Kapuas Hulu	Badau; Puring Kencana; Batang Lupar; Embolah Hulu; Putussibau Utara; Putussibau selatan
6.	Mahakam Hulu	Long Apri; Long Pahangai
7.	Malinau	Kayan Hulu; Pujungan; Kayan Hilir; bahau Hulu; kayan Selatan
8.	Nunukan	Sebatik Barat; Krayan Selatan; Krayan; Lumbis; Sebuku; Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsai, Sebatik tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Gambar 4.3.
Peta Sebaran Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Kalimantan 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III



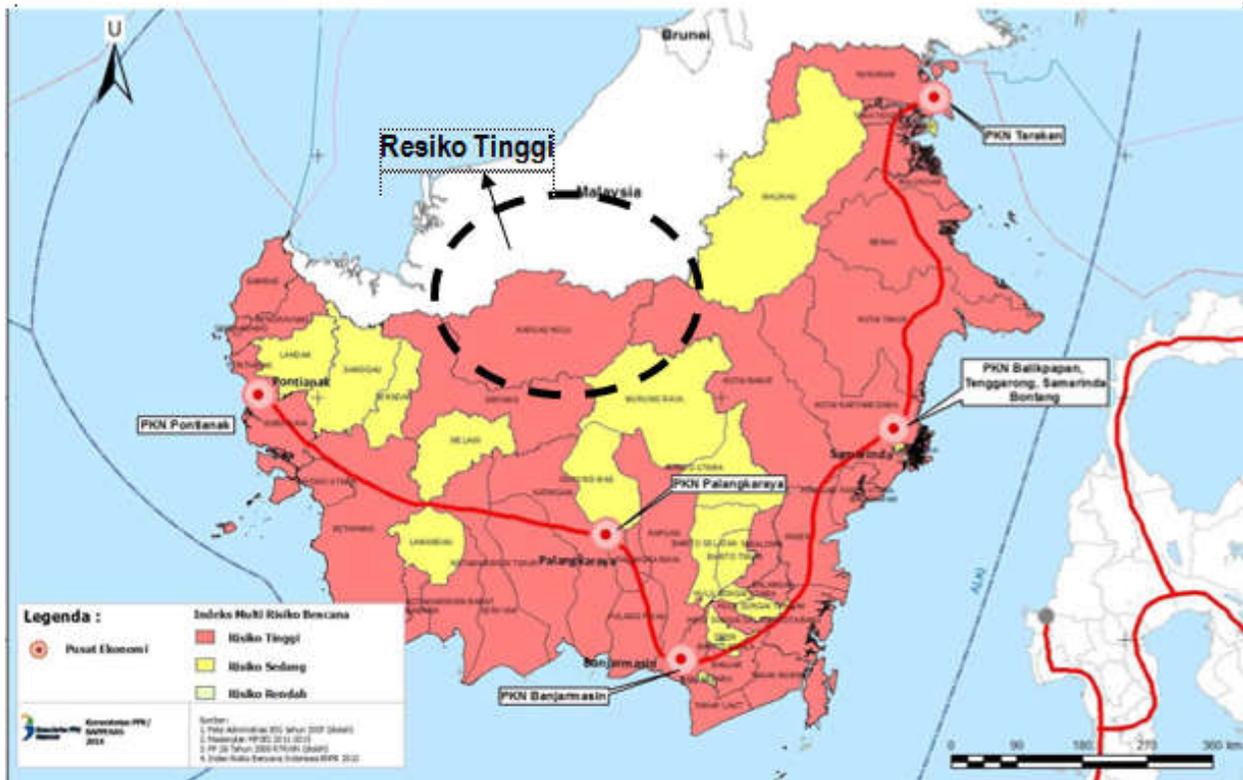
Adapun sebaran resiko bencana dan profil kerawanan dan resiko PKN, PKW, PKSN, Kawasan Industri dan Kawasan Pusat pertumbuhan lainnya di wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada

Tabel 4.8.
Profil Kerawanan dan Resiko PKN, PKW dan PKSN
Di Wilayah Pulau Kalimantan

Wilayah	Indeks Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi resiko tingkat Kabupaten/Kota (ORBI 2013)
Kawasan Pusat Pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran lainnya di Kalimantan Barat	Kota Singkawang; tinggi untuk bencana banjir Kabupaten Bengkayang: sedang untuk bencana banjir Kabupaten Sambas: tinggi untuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sanggau: tinggi untuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sintang: sedang untuk bencana Kabupaten Landak: tinggi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan Kabupaten Kapuas Hulu: sedang untuk bencana banjir dan kebakaran hutan	Kota Singkawang: tinggi Kabupaten Bengkayang: tinggi Kabupaten Sambas: tinggi Kabupaten Sanggau: sedang Kabupaten Sintang: tinggi Kabupaten Landak: sedang Kabupaten Kapuas Hulu: tinggi
Putussibau – Kabupaten Kapuas Hulu	Tinggi untuk ancaman: Banjir, kekeringan	Kapuas Hulu: Tinggi

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Gambar 4.4.
Peta Indeks Resiko Bencana Wilayah Pulau Kalimantan



Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III



Tabel 4.9.
Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Nasional
Kabupaten Kapuas Hulu

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
JALAN
1. Pengembangan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau – Nanga Era – Bts Kaltim
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Kalbar-1 200 MW
2. PLTG/MG Mobile PP kalbar 100 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
4. Pengembangan PLTS Komunal dan PLTMH
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab Kapuas Hulu, Kab Kapuas Hulu
2. Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu, Kab Kapuas
3. Pembangunan Prasarana Pengembalian dan Saluran Pembawa Air baku Sungai Pontan Kab. Kapuas Hulu
PENDIDIKAN
1. Peningkatan pelayanan pendidikan daerah perbatasan dan pulau (dalam bentuk sekolah berasrama)
2. Pembangunan Politeknik di Kabupaten Bengkayang Kapuas Hulu dan Sanggau
KESEHATAN
1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (difokuskan untuk 10 Kabupaten tertinggal dan daerah perbatasan)
2. Pembangunan tenaga medis
3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar
4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang)
5. Pengendalian penyakit HIV dan AIDS
6. Penanggulangan gizi buruk

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

4.2.3. Isu Atau Kebijakan Daerah

Isu strategis daerah (Provinsi dan Kabupaten) merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025, serta RTRW Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.

a. Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 memiliki visi pembangunan



“Mewujudkan Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”, dengan upaya pencapaian berupa misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan Pendidikan;
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam;
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi;
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai;
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku;
7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai;
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses kesumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya;
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi; dan
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, agenda prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan pada lima tahun kedepan, terdapat 7 (tujuh) prioritas



pembangunan yaitu: 1). Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat; 2). Meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia; 3). Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 4). Peningkatan sumberdaya aparatur dan pelayanan publik; 5). Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar; 6). Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; dan 7). Meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.

b. Telaahan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu dengan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu ke dalam perencanaan lima tahunan sehingga pembangunan tahap ke-tiga ini masih selaras dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kapuas Hulu dan dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kapuas Hulu. Perencanaan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kapuas Hulu memiliki visi pembangunan **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN”**.

Visi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Adil adalah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan



kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain yang telah maju dengan bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri, oleh karena itu untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemandirian suatu daerah dapat tercermin melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bahkan dapat mengekspor produk-produknya dan ketergantungan terhadap daerah lain maupun pemerintah pusat yang semakin berkurang khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas, mandiri dan berakhlak mulia.
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- (3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten.
- (4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
- (5) Mewujudkan daerah perbatasan menjadi daerah yang layak huni, produktif dan mandiri sehingga nantinya menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai halaman depan wilayah NKRI.
- (6) Mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten terdepan dalam upaya mewujudkan kawasan konservasi dan menciptakan kelestarian lingkungan baik regional, nasional maupun global.

c. Telaahan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

Ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh



karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Di dalam perda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian maka antara rencana pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang dapat sinergis dan sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan ekowisata;
- c. Pengembangan agropolitan;
- d. Pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- e. Pengentasan kemiskinan dan pembagunan daerah tertinggal;
- f. Pengembangan kawasan perbatasan;
- g. Pengembangan infrastruktur;
- h. Penanganan kawasan rawan bencana; dan
- i. Peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah kabupaten meliputi:

- a. Pusat kegiatan yang terdapat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:
 - PKSN yaitu Kota Badau;
 - PKW yaitu Kota Putussibau;
 - PKL yaitu Kota Nanga Tepuai dan Semitau



- PPK terdiri atas: Kawasan perkotaan lanjut di Kecamatan Batang Lupar; Kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir; Kawasan perkotaan jongkong di Kecamatan Jongkong; Kawasan Perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan Kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir.
 - PPL terdiri atas: Desa Bika di Kecamatan Bika; Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung; Desa Semangut Tanjung di Kecamatan Bunut Hulu; Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu; Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu; Desa Nanga Embolah di Kecamatan Embolah Hilir; Desa banua Martinus di Kecamatan Embolah Hulu; Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang; Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis; Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan; Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana; Desa Sejiran di Kecamatan Semberuang; Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau; Desa Semalah di Kecamatan Selimbau; Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir; Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan Seda Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid.
- b. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:
- Sistem jaringan transportasi darat;
 - Sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
 - Sistem jaringan jaringan transportasi udara.
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
- Sistem jaringan energi;
 - Sistem jaringan telekomunikasi;
 - Sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Rencana Pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukkan pertanian;
- c. Kawasan peruntukkan perikanan;



- d. Kawasan peruntukkan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukkan industri;
- f. Kawasan peruntukkan pariwisata;
- g. Kawasan peruntukkan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukkan lainnya.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan daerah maka isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

a. Belum Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peranserta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat.

Selain itu, Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak meninggalkan permasalahan diantaranya adalah tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan.



b. Belum Optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas \pm 29.842 km², atau mencakup 20,33 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang membuat potensinya sungguh sangat luar biasa. Selain itu, salah satu kekuatan ekonomi bagi Kabupaten Kapuas Hulu adalah ditetapkannya beberapa kecamatan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Peningkatan nilai tambah dari produk-produk sumberdaya alam belum sepenuhnya terwujud baik dari aspek sosial, budaya dan ekologi. Efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam terutama untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu relatif masih rendah. Belum tercipta keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan aspek pengembangannya. Tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbarukan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah juga kian meningkat

Pemanfaatan sumber daya alam yang demikian potensial, perlu didukung dengan pengembangan industri kecil menengah sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, pemanfaatan SDA ini berdampak pada meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan SDA yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

c. Masih Tingginya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit diwujudkan. Minimnya dana pembangunan ekonomi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana pembangunan terserap pada belanja pegawai sehingga porsi untuk peningkatan infrastruktur dasar menjadi berkurang.

Panjang jalan kabupaten di Kapuas Hulu adalah 1.186,874 Km dengan rincian jenis permukaan masing- masing 166,862 Km berupa jalan aspal, 334,786 Km jalan kerikil, Rigid Beton 172,728 Km dan jalan tanah sepanjang 512,498 Km. Kondisi jaringan jalan umumnya masih dalam kondisi rusak (11,30 %) dan rusak berat (42,00%), hanya sekitar (35,07%) jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan sisanya sekitar (11,62%) dalam kondisi sedang. Jembatan yang dibangun sampai tahun 2015 adalah sepanjang 6.575,20 Km, atau (612 buah). Jumlah jembatan yang dalam kondisi baik dan layak dilalui sebanyak 480 buah (78,43%) jembatan, kondisinya sedang 61 buah, rusak ringan 40 buah dan rusak berat 31 buah. Sebagian besar jalan kolektor dan lokal masih berupa jalan yang diperkeras yang memiliki mutu lapis perkerasan yang rendah. Sarana angkutan yang tersedia terbatas, disamping itu dari 6 terminal yang ada, hampir seluruhnya tidak berfungsi dengan baik dan tidak terawat. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, kualitas dan representatif yang menjamin keselamatan penumpang, cenderung menyebabkan minat masyarakat yang semakin menurun.



Kendala dibidang energi kelistrikan adalah keterbatasan dana dan investor untuk melakukan investasi dalam pengembangan berbagai sumber energi alternatif. Kondisi ini dipicu oleh adanya kendala fisik geografis serta terbatasnya SDM yang terdidik dan terampil.

Pemanfaatan air bersih melalui fasilitas yang dikelola oleh PDAM yang merupakan faktor utama dalam menunjang kesehatan penduduk, ternyata pemanfaatannya tercatat masih rendah yakni sekitar 13,18%. Umumnya penduduk Kabupaten Kapuas Hulu masih mengandalkan sumber air dari aliran Sungai Kapuas baik untuk kebutuhan air minum maupun kebutuhan sehari-harinya (86,82%). Sistem pelayanan sarana air bersih hingga tahun 2015 dilayani oleh 1 PDAM dengan sumber air baku dari air sungai dan baru menjangkau Kota Putussibau dan beberapa kecamatan saja. Hingga tahun 2015, jumlah pelanggan yang terlayani jaringan air bersih dari saluran pipa air PDAM adalah sebanyak 10.336 pelanggan, dengan rincian untuk rumah tempat tinggal sebanyak 9.716 pelanggan, dan perusahaan dan pertokoan sebesar 620 pelanggan. Sementara itu, produksi air bersih yang disalurkan kepada pelanggan tahun 2015 sebanyak 3.544.225 m³. dengan besarnya sebesar Rp 53.526.661.095,- dimana juga terjadi kebocoran sebanyak 1.030.192 m³. selain masih terbatasnya infrastruktur dasar, masalah perumahan juga menjadi kendala di Kabupaten Kapuas Hulu. sampai saat ini masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 11,23 persen. hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten agar dapat menata kawasan kumuh terutama di perkotaan.

d. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah belum optimalnya upaya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Kabupaten Kapuas Hulu harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat mewujudkan tumbuhnya kenyamanan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, generasi sekarang dan selanjutnya.

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik dan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai/laut serta pencemaran udara dari aktivitas pabrik.



Tabel 4.10.
“Isu Strategis, Permasalahan Daerah dan Sasaran/Program/Kegiatan”

No.	Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Permasalahan Daerah	Sasaran/Program/Kegiatan Terkait: Masalah Utama, Masalah dan Akar Masalah
1.	Belum Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Integritas Aparatur dan Pengelolaan Keuangan belum optimal.	Penerapan Sistem E-Govt dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kapuas Hulu (Sasaran atau Program)
2.	Belum Optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Belum Optimalnya pemanfaatan SDA, pariwisata, distribusi pendapatan serta rendahnya kualitas SDM	Industrialisasi Ekonomi Berbasis Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah (Sasaran)
3	Masih Tingginya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar	Pengembangan wilayah perbatasan (kemiskinan/ketertinggalan; illegaltrading, penyelundupan, TKI dll; kesenjangan antar negara) Wilayah Perbatasan→ Sasaran/Program Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (program atau potensi)
4	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Pengembangan Potensi Taman Nasional Betung Kerihun (Program atau Kegiatan)



BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Penyusunan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu mengacu dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik Aparatur Pemerintahan, Masyarakat, maupun Swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA,
BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu sejahtera, berdaya saing, dan harmonis yang



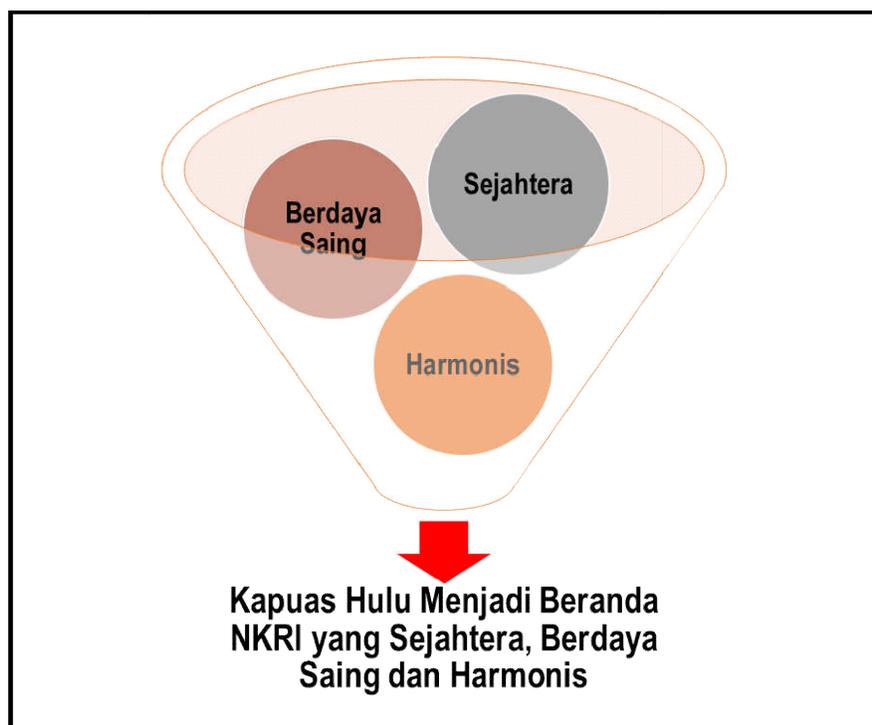
masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kapuas Hulu yang **Sejahtera**, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.

Kapuas Hulu yang **Berdaya Saing**, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Kapuas Hulu yang **Harmonis**, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis

Gambar 5.1
Hubungan Antar Elemen Visi



Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu Kapuas Hulu menjadi beranda NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis.

Dengan tercapainya visi tersebut, diharapkan 5 tahun ke depan Kabupaten Kapuas Hulu mampu bertransformasi menjadi Berdanda terdapan NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis. Kapuas Hulu Beranda NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis, merupakan cita-cita atau *ultimate goals* yang menggambarkan kondisi dimana Kapuas Hulu sebagai Kabupaten terdepan NKRI yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi sebagai beranda terdepan NKRI.



5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan Visi di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih**

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. **Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. **Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah



perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

-
- 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas**
 - 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**
 - 3. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing SDM Masyarakat**
 - 4. Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berorientasi Lingkungan**
 - 5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup**
-

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:



Tabel 5.1
Indikator Tujuan (Makro) Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Data Awal	Target 2021
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih			
Tujuan 1: terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	27	70
Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan			
Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	6,04
Tujuan 3: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM masyarakat	3. Angka kemiskinan (%)	9,14	7
	4. IPM	64,18	67,5
	5. IDM	27,24	28,77
Tujuan 4: Terwujudnya Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berorientasi lingkungan	6. Persentase jalan dalam kondisi mantap	50	73,54
	7. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	10	3,21
Misi 3: Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
Tujuan 5: Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50	75

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta Berlandaskan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan yang profesional, akuntabel dan memberikan pelayanan prima mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah.



Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan pelayanan prima, maka pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat dengan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan pelayanan prima diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dengan **Predikat Sakip (skor) menjadi BB, Opini BPK menjadi WTP, Nilai LPPD menjadi 3300**, pada tahun 2021;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan **IKM menjadi 72** pada tahun 2021.

2. Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi.

Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu dititik beratkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan peningkat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu. Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian meningkat secara terus menerus dengan memperhatikan unggulan daerah. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.



Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pariwisata potensi dan merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan beberapa sektor ekonomi lainnya, misalnya sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, sektor industri dan perdagangan, telekomunikasi serta sektor perhubungan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata memiliki paradigma dalam rencana pembangunan dan pengembangannya. Tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang senantiasa menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, serta dengan orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian alam dan lingkungan hidup, serta memperkaya dan mempercantik sumber daya alam

Lebih lanjut, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pembangunan ekonomi yang fokus pada keberlanjutan lingkungan dan tidak merusak alam. Karena pembangunan ekonomi berkelanjutan akan berlangsung jangka panjang, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan **laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 6,81 persen** pada tahun 2021; dan
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan **laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan mencapai 6,06 persen** pada tahun 2021; dan
- c. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu dengan **jumlah kunjungan wisatawan meningkat mencapai sebesar 15.650 orang** pada tahun 2021.

3. Tujuan 3: Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing SDM Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Peningkatan produktifitas masyarakat ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Kabupaten Kapuas Hulu juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau akses-akses ekonomi sehingga dapat mewujudkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain aspek produktivitas masyarakat, kurikulum pendidikan berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah



pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dicapai melalui industrialisasi sektor pertanian dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Kabupaten Kapuas Hulu telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kapuas Hulu cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi peningkatan lulusan jenjang pendidikan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 9 tahun. Program ini harus terus dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan dan lebih berdaya saing. Untuk itu, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dilengkapi di semua daerah terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengembangkan Puskesmas 24 jam di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan kualitas Sumberdaya Manusia juga memerhatikan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dengan meningkatkan pendapatan masyarakatnya

Guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan daya saing SDM Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. Menurunnya angka kemiskinan dari **10,03 Persen menjadi 6,00 Persen pada tahun 2021**;



- b. Menurunnya angka pengangguran dengan **angka pengangguran terbuka dari 2 Persen menjadi 0,75 persen** pada tahun 2021
- c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan dengan **rata-rata lama sekolah tercapai sebesar 6,75 tahun** pada tahun 2021; dan **Harapan lama sekolah mencapai sebesar 8,5 tahun** pada tahun 2021;
- d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan **angka harapan hidup/indek kesehatan sebesar 72 tahun** pada tahun 2021; dan

4. Tujuan 4: Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berorientasi Lingkungan

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti perumahan, pemukiman, kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Pembangunan infrastruktur pemukiman di Kapuas Hulu juga wajib memperhatikan lingkungan. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi yang akan digunakan, ditetapkan berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan lingkungan di sini terutama mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan mencegah pencemaran limbah/polutan yang membahayakan.

Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang asri dan nyaman merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung bagi masyarakat secara optimal di suatu wilayah. Lingkungan yang nyaman ditandai terciptanya ketertiban, ketentraman dan keindahan lingkungan

Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dengan **persentase panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 73,54 persen** pada tahun 2021; **Persentase lingkungan pemukiman kumuh mencapai sebesar 3,21 persen** pada tahun 2021;



5. Tujuan 5: Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus di Kabupaten Kapuas Hulu karena sebagai daerah konservasi. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kerusakan hutan yang terjadi dan berdampak terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya.

Dampak risiko lingkungan di atas dapat dikategorikan sebagai bencana ekologis. Kebanyakan dari kita mungkin masih menganggap bahwa kerusakan tersebut dikategorikan sebagai bencana alam, akan tetapi jika melihat penyebab dari bencana tersebut pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menghargai lingkungan. Hal ini memberikan dampak diantaranya, kekeringan berkepanjangan, banjir, bertambahnya frekuensi peristiwa iklim yang memengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta *biodiversitas* dan kestabilan ekonomi.

Guna meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, maka sasaran pembangunan yang harus di capai adalah:

- a. Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan **meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup sebesar 75 persen** pada tahun 2021.



Tabel 5.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016 – 2021

VISI: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih									
Tujuan 1: terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Keuangan daerah	1. Predikat Sakip	C	CC	B	BB	BB	BB
			2. Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			3. Nilai LPPD	2700	2800	3000	3100	3200	3300
		2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4. IKM	70%	70%	70,5%	71%	71,5%	72%
Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan									
Tujuan 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	5. laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian	5,91%	6,09%	6,27%	6,45%	6,63%	6,81%
			6. laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	3,11%	4,66%	5,01%	5,36%	5,71%	6,06%
		4. Meningkatnya kunjungan wisatawan	7. Jumlah Kunjungan Wisatawan	11.101 Org	11.878 Org	13.252 Org	13.620 Org	14.596 Org	15.650 Org
Tujuan 3: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM masyarakat	3. Tingkat kemiskinan	5. Menurunnya angka kemiskinan	8. angka kemiskinan	9,14%	8,86%	8,36%	7,86%	7,36%	7%
	4. IPM	6. Menurunnya angka Pengangguran	9. Tingkat pengangguran terbuka	2%	1,75%	1,50%	1,25%	1%	0,75%
		7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10. Angka Harapan Hidup	71,95 Tahun	71,96 Tahun	71,97 Tahun	71,98 Tahun	71,99 Tahun	72 Tahun
		8. Meningkatnya kualitas dan	11. Angka rata-rata lama sekolah	6,70 Tahun	6,71 Tahun	6,72 Tahun	6,73 Tahun	6,74 Tahun	6,75 Tahun



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
		pemerataan pendidikan	12. Angka harapan lama sekolah	6,32 Tahun	6,66 Tahun	7 Tahun	7,5 Tahun	8 Tahun	8,5 Tahun
			13. angka kelulusan pendidikan dasar/ rata-rata nilai un	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. IDM	9. Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat	Jumlah Desa Menurut Status Desa: <ul style="list-style-type: none"> • Mandiri • Maju • Berkembang • Tertinggal • Sangat Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 0 Desa • Maju 1 Desa • Berkembang 8 Desa • Tertinggal 98 Desa • Sangat Tertinggal 171 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 0 Desa • Maju 1 Desa • Berkembang 9 Desa • Tertinggal 99 Desa • Sangat Tertinggal 169 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 0 Desa • Maju 4 Desa • Ber • kembang 22 Desa • Tertinggal 129 Desa • Sangat Tertinggal 123 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 1 Desa • Maju 8 Desa • Berkembang 36 Desa • Tertinggal 142 Desa • Sangat Tertinggal 92 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 3 Desa • Maju 20 Desa • Berkembang 89 Desa • Tertinggal 116 Desa • Sangat Tertinggal 50 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 4 Desa • Maju 26 Desa • Berkembang 124 Desa • Tertinggal 114 Desa • Sangat Tertinggal 10 Desa
Misi 3: Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan									
Tujuan 4: Terwujudnya Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berorientasi lingkungan	6. Jalan dalam kondisi mantap	10. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Permukiman	15. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	48,69%	50%	55%	60%	67%	73,54%
	7. Lingkungan pemukiman nyaman		16. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	11,23%	10%	8%	6%	4%	3,21%
Tujuan 5 : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50%	55%	60%	70%	73%	75%



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan pemerataan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan menyelaraskan antara apa yang akan dicapai dengan berbagai identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dengan mengagendakan berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung dan menciptakan perbaikan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah peningkatan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).



Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;



16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Melalui pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil-hasil pembangunan secara berkala terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 maka strategi dan arah kebijakan dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD. Perbaikan atau penyempurnaan strategi dan kebijakan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang belum terantisipasi serta perubahan-perubahan asumsi makro pembangunan dan pendanaan.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD untuk menjabarkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) berbagai kebijakan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

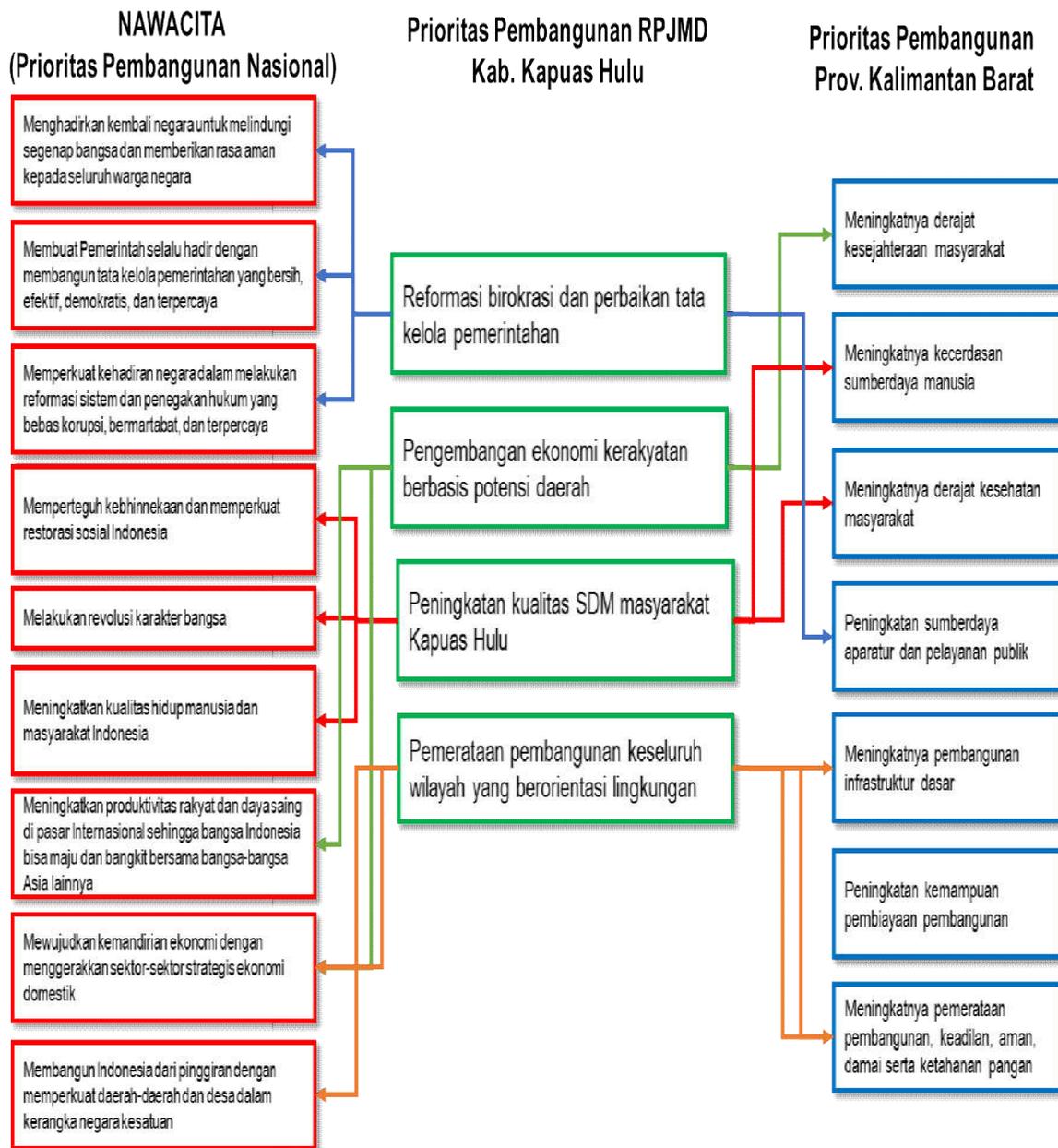


3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka strategi atau prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu telah diintegrasikan dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat dan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional (**Nawacita**) harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah (Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu) agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten) seperti yang tersaji pada Gambar 6.1 berikut:



Gambar 6.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu



Berdasarkan hasil FGD dengan para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam kertas kerja yang telah dirumuskan pada gambar di atas, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1.
Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 – 2021

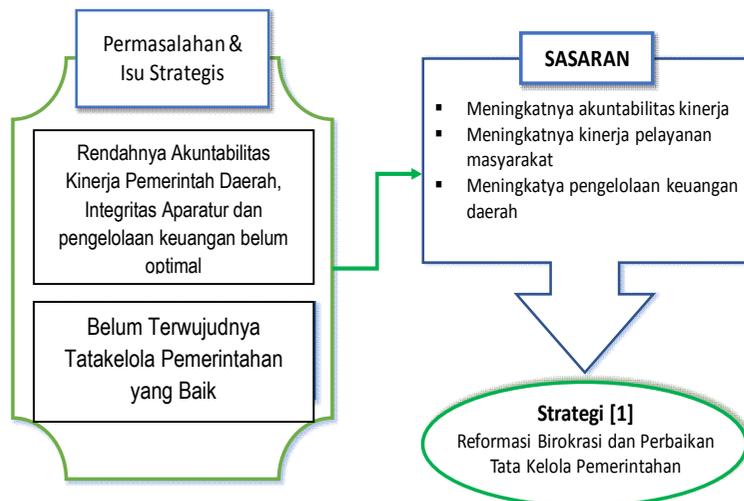
Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	S.1	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintah
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik		
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	S.2	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah
4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan Ke Kabupaten Kapuas Hulu		
5.	Menurunnya angka kemiskinan		
6.	Menurunnya penangguran		
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S.3	Peningkatan kualitas Pembangunan SDM Masyarakat Kapuas Hulu
8.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan		
9.	Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat		
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	S.4	Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik untuk mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penjelasan masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut:



1. Strategi 1: Reformasi Birokrasi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan



pengelolaan aset daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan

yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal

Reformasi birokrasi, pada prinsipnya meliputi lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan. Hingga saat ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

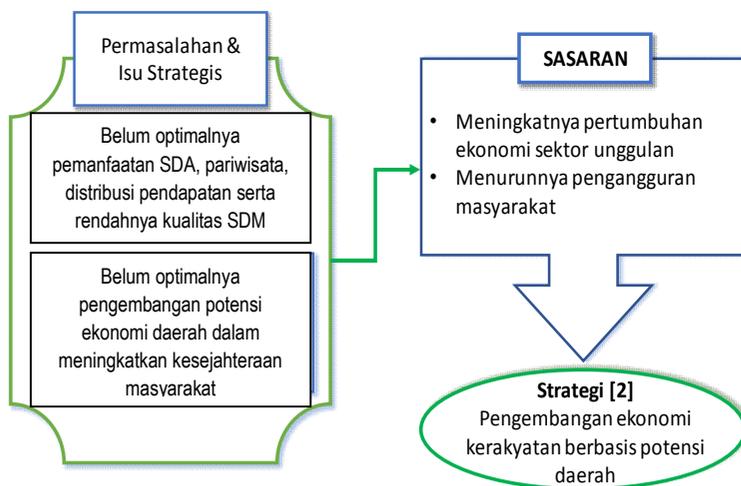
Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.



2. Strategi 2: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi masyarakat sektor-sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam kendali pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis masyarakat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah.



Salah satu upaya dalam menyalisasi strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan ekonomi lokal daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertanggung perekonomian daerah

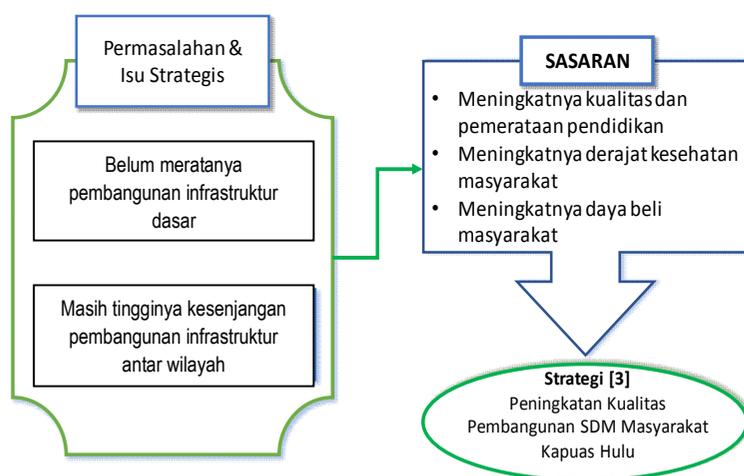
Pada hakekatnya pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menumbuhkan/meningkatkan kegiatan perekonomian pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Melalui peran pemerintah daerah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian rakyat kecil dapat terangkat dan otomatis meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan pada sektor ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, tetapi juga pada wilayah pelosok sampai ke perdesaan hingga ke perbatasan sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah dapat terwujud. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu dapat dengan mantap mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu secara adil dan merata.



3. Strategi 3: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM Masyarakat Kapuas Hulu

hakekat pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas



penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harapan lama sekolah dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbaskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat sehingga

kualitas SDM secara otomatis akan membaik. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah akan mendorong peningkatan IPM Kabupaten Kapuas Hulu.

Kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya akan menentukan pembangunan dibidang kesehatan secara mendasar.

Pembangunan manusia selain dari aspek pendidikan dan kesehatan, juga memperhatikan aspek ekonomi khususnya pendapatan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan riil per kapita masyarakat.



Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerja yang dilakukan selama satu periode.

Masalah pendapatan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dilihat dari jumlah dan distribusi pendapatan yang diterima. Pendapatan per kapita diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

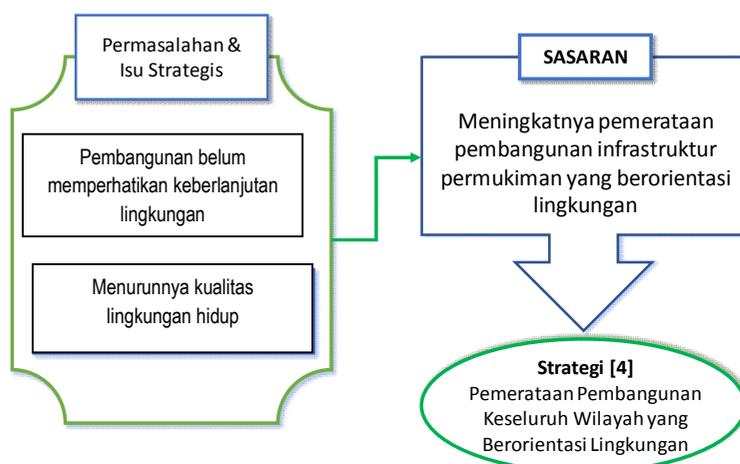
Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu daerah mencerminkan rendahnya pertumbuhan GNP (*Gross national Product*). Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, menggalakkan program kerja berencana dan transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

4. Strategi 4: Pemerataan Pembangunan Keseluruh Wilayah yang Berorientasi Lingkungan

Pemerataan pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah mengingat

infrastruktur merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Upaya pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur menuju pusat-pusat



layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah perdesaan dan perbatasan. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan *prototype* kawasan berkembang sekitarnya. Seperti kita ketahui, infrastruktur dasar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sudah seyogianya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab membangun infrastruktur yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang



dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan terjaganya komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia.

Tabel 6.1.
“Keterkaitan Visi Misi Bupati dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi”

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI I: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih		
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Keuangan daerah 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan
MISI II: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 2. Meningkatnya kunjungan wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah
Tujuan 2 : Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Menurunnya angka Pengangguran 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan 5. Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM Masyarakat Kapuas Hulu



MISI III: Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Terwujudnya Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berorientasi lingkungan	1. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Permukiman	1. Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan
Tujuan 2 : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	

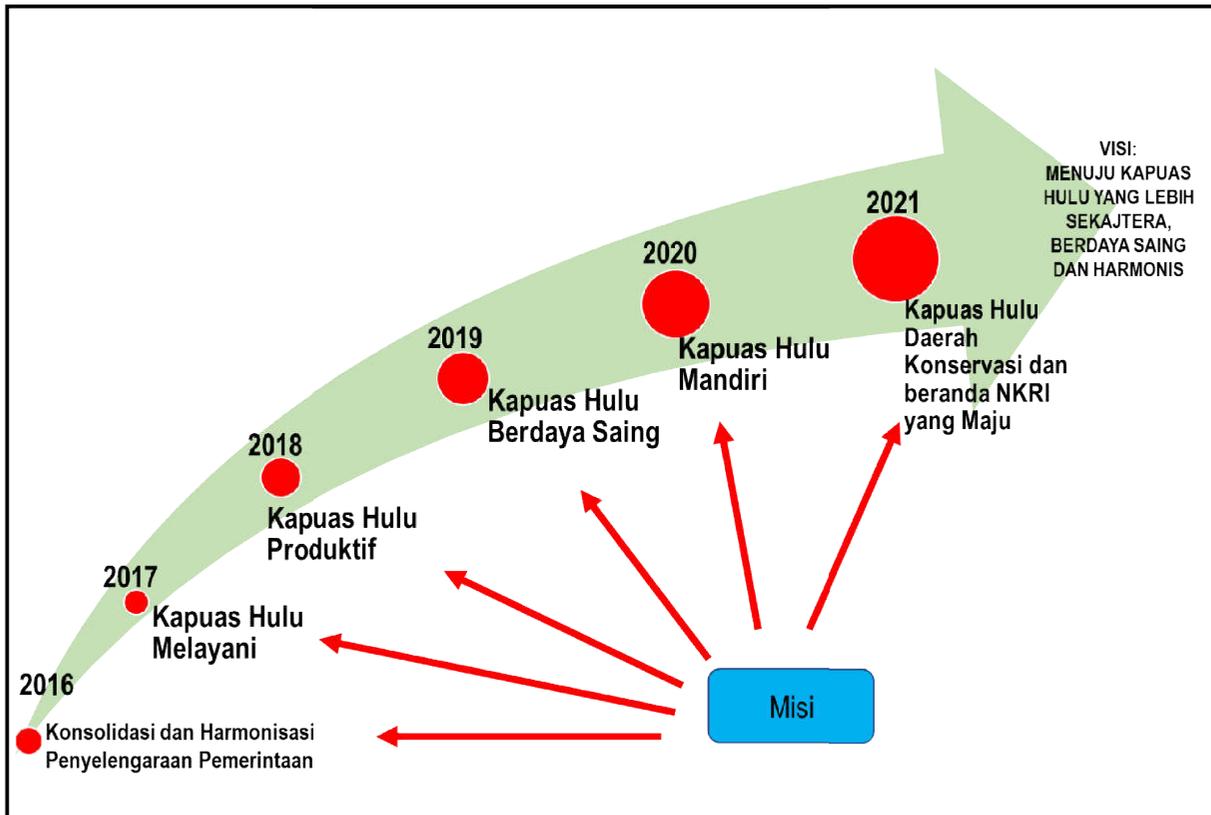
6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran RPJMD serta jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6.2.
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016-2021



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu ini untuk tahun pertama (2016) dan kedua (2017) berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dokumen RKPD tahun 2016 dan 2017. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2016)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2016 merupakan periode transisi perpindahan jabatan dari Bupati periode sebelumnya dengan bupati yang baru terpilih hasil pemilukada serentak bulan desember 2015. Walaupun Bupati terpilih merupakan *incumbent* tetapi tahun 2016 merupakan tahap konolidasi penyelenggaraan



pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut makatema pembangunan pada tahun 2016 adalah **“KONSOLIDASI DAN HARMONISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**.

Konsolidasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan menitikberatkan pada konsolidasi berkelanjutan dan pembenahan internal pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa upaya seperti peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan terpadu, perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penanggaran terpadu, serta perbaikan kuitas layanan publik kepada masyarakat. Di harapkan setelah manajemen organisasi internal Kabupaten Kapuas Hulu berjalan optimal dan profesional di harapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2017)

Arah kebijakan pada tahun 2017, pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2016. Jika pada tahun 2016 pembangunan yang masih di titikberatkan pada pemenahan internal pemerintahan maka pada tahun 2017 pembangunan Kabupaten Kapubaten Kapuas Hulu mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulupada tahun 2017 adalah **“KAPUAS HULU MELAYANI”**.

Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan. Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu, berbagai upaya dilakukan antara lain dengan peningkatan pembagunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.

Selain infrastruktur, pelayanan publik yang prima merupakan salah satu prioritas pembangunan di tahun 2017. Pelayanan publik yang di selenggarakan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mencakup pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang di berikan kepada mereka. Upaya yang di lakukan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima yang di dukung dengan penggunaan teknologi informasi, pemberian pelayanan publik yang terjangkau sampai ke pelosok. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya pembenahan pengelolaan keuangan daerah yang lebih di titikberatkan pada lebih besarnya belanja langsung dan pengelolaan keuangan daerah akuntabel sehingga APBD Kabupaten Kapuas Hulu bisa tepat sasaran.



Pemberian pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu fokus pembangunan pada periode ini. Beberapa berpaikan kualitas pendidikan dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi prioritas pada tahun ini. Peningkatan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau menjadi prioritas pembangunan bidang kesehatan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, arah kebijakan pada tahun 2017 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun 2016 yang belum tercapai untuk dilanjutkan pada tahun 2017.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2018)

Arah kebijakan pada tahun 2018, pembangunan Kabupaten Kapuas Huluberdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada ekonomi masyarakat dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Di diharapkan dengan peningkatan produktivitas ini masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat mandiri dan bersaing dengan daerah-daerah sekitarnya bahkan dengan negara tetangga Malaysia. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018 adalah **“KAPUAS HULU PRODUKTIF”**.

Masyarakat yang produktif akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Produktivitas ekonomi daerah ini bertujuan untuk menuju keseimbangan yang merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat (pendapatan per kapita) meningkat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menuju Kapuas Hulu produktif secara keseluruhan dan berkelanjutan, diperlukan beberapa upaya kebijakan seperti pengembangan industri ekonomi pertanian, pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah, pemberdayaan masyarakat desa, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Dengan upaya-upaya tersebut di diharapkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu bisa produktif sehingga pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dapat meningkat secara nyata. Selain itu, arah kebijakan pada tahun 2018 ini juga melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tercapai.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2019)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada investasi yang maju dan peningkatan



kesempatan kerja kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah **“KAPUAS HULU BERDAYA SAING”**

Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu di dorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi. Dengan pertumbuhan investasi yang tinggi akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu di harapkan dapat penciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi penangguran yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja.

Menjadi daerah yang berdaya saing Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki fundamentasi kokoh yang didukung melalui ekonomi kerakyatan merupakan langkah awal bagaimana agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, memiliki fokus garapan yang jelas dan memiliki pengaruh yang signifikan. Pengokohan fundamental ekonomi kerakyatan ditempuh melalui upaya-upaya menciptakan sentra-sentra ekonomi rakyat dan identifikasi komoditas unggulan daerah didalamnya. Pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan di harapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha bagi UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Pengembangan UMKM maupun IKM juga memperhatikan keterlibatan pemuda dengan memperbanyak jumlah wirausahawan pemuda pemula di Kabupaten Kapuas Hulu, serta juga tidak kalah penting adalah peningkatan pertumbuhan dan semangat kewirausahaan bagi pemuda di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun ini sektor pariwisata perlu di genjot dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan dan pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran. peningkatan pariwisata tersebut secara tidak langsung akan menggerakkan UMKM terutama yang fokus pada pembuatan souvenir atau produk khas Kabupaten Kapuas Hulu. Menjadi Kapuas Hulu berdaya saing selain itu juga perlu memperhatikan keindahan Kota dengan melakukan penataan kawasan kumuh di Perkotaan, sehingga juga menarik wisatawan untuk dapat tinggal lebih lama di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum tercapai

e. Arah Kebijakan Tahun kelima (2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi daerah kerakyatan. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah **“KAPUAS HULU MANDIRI”**



Menjadi Kapuas hulu yang mandiri perlu adanya penguatan ekonomi daerah sehingga Kabupaten Kapuas Hulu dapat bersaing dengan kabupaten/kota sekitarnya bahkan dengan negara tetangga dengan melihat lokasi Kabupaten Kapuas Hulu yang bersebelahan dengan Negara Malaysia. Penguatan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan wirausaha di masyarakat.

Menjadi daerah yang mandiri, Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki fundamntasi ekonomi yang kokoh. Pengokohan fundamental ekonomi ditempuh melalui pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada tahun ini pembagunan sektor pariwisata sudah menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata. Pembangunan pariwisata di harapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten kapuas Hulu, semakin tingginya orang-orang yang datang ke Kapuas Hulu secara langsung dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberbanyak kesempatan kerja. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan investasi juga perlu di dorong agar memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kabupas Hulu. Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum tercapai.

f. Arah Kebijakan Tahun Keenam (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati periode 2016-2021, pada tahun 2021 ini di harapkan semua prioritas Bupati dapat di selesaikan pada tahun ini. Pada tahun 2021 inipembangunan Kabupaten Kapuas Hulu menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna **“Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing dan Harmonis”**. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada akhir periode ini adalah **“KAPUAS HULU DAERAH KONSERVASI DAN BERANDA NEGARA YANG MAJU”**

Pembangunan daerah konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kapuas Hulu memiliki Taman Nasional Betung Kerihun yang letaknya berbatasan dengan Serawak (*Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary*) merupakan kawasan konservasi lintas batas (*transboundary reserve*) pertama di Asia. Hal ini merupakan potensi sekaligus peluang dalam bentuk kerjasama pengembangan wilayah berbasis konservasi alam di wilayah perbatasan, misalnya pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik pada tingkat spesies maupun ekosistem, serta memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ekosistem hutan di Kabupaten Kapuas Hulu



dapat dikatakan mewakili berbagai tipe ekosistem hutan Kalimantan yang memiliki keanekaragaman cukup tinggi. Upaya pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap menjadi daerah konservasi memerlukan kebijakan seperti perbaikan tata kelola perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, dan peningkatan kualitas udara, perairan dan lingkungan hidup perkotaan. keterjagaan lingkungan hidup salah satunya dapat meningkatkan sektor pariwisata, karena Kabupaten Kapuas Hulu salah satu potensi pariwisatanya berbasis alam dengan banyaknya keanekaragaman hayati yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara

Beranda negara yang maju sebagai wujud spirit untuk berjuang agar Kapuas Hulu menjadi daerah yang aman, nyaman, produktif dan berdaya saing yang tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi. Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi masyarakat Kapuas Hulu memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik melalui peningkatan investasi dan kesempatan kerja. Selain itu, kemandirian dan daya saing ekonomi di Kabupaten kapuas Hulu mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh semakin banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat yang merata yang tidak terpusat hanya di Putussibau saja.

Pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Kapuas Hulu meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; penataan kawasan perkotaan yang indah dengan berkurangnya kawasan kumuh; pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berikut ini di sajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021.



**Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021**

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Konsolidasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kapas Hulu Melayani	Kapas Hulu Produktif	Kapas Hulu Berdaya Saing	Kapas Hulu Mandiri	Kapas Hulu Daerah konservasi dan Beranda Negara Yang Maju
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Keuangan daerah	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Perbaikan kualitas layanan publik						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian						
Meningkatnya kunjungan wisatawan		Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata						
		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan						
		Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran						
Menurunnya pengangguran masyarakat		Pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah						
		Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja						
Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat		Pemberdayaan masyarakat desa						
		Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah						
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Peningkatan kualitas Pembangunan SDM masyarakat Kapuas Hulu	Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan						
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau						
Menurunnya angka kemiskinan		Peningkatan pendapatan masyarakat						



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Konsolidasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kapuas Hulu Melayani	Kapuas Hulu Produktif	Kapuas Hulu Berdaya Saing	Kapuas Hulu Mandiri	Kapuas Hulu Daerah konservasi dan Beranda Negara Yang Maju
meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup								
		Peningkatan penataan penanganan kawasan kumuh						
		Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan						
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar						



6.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

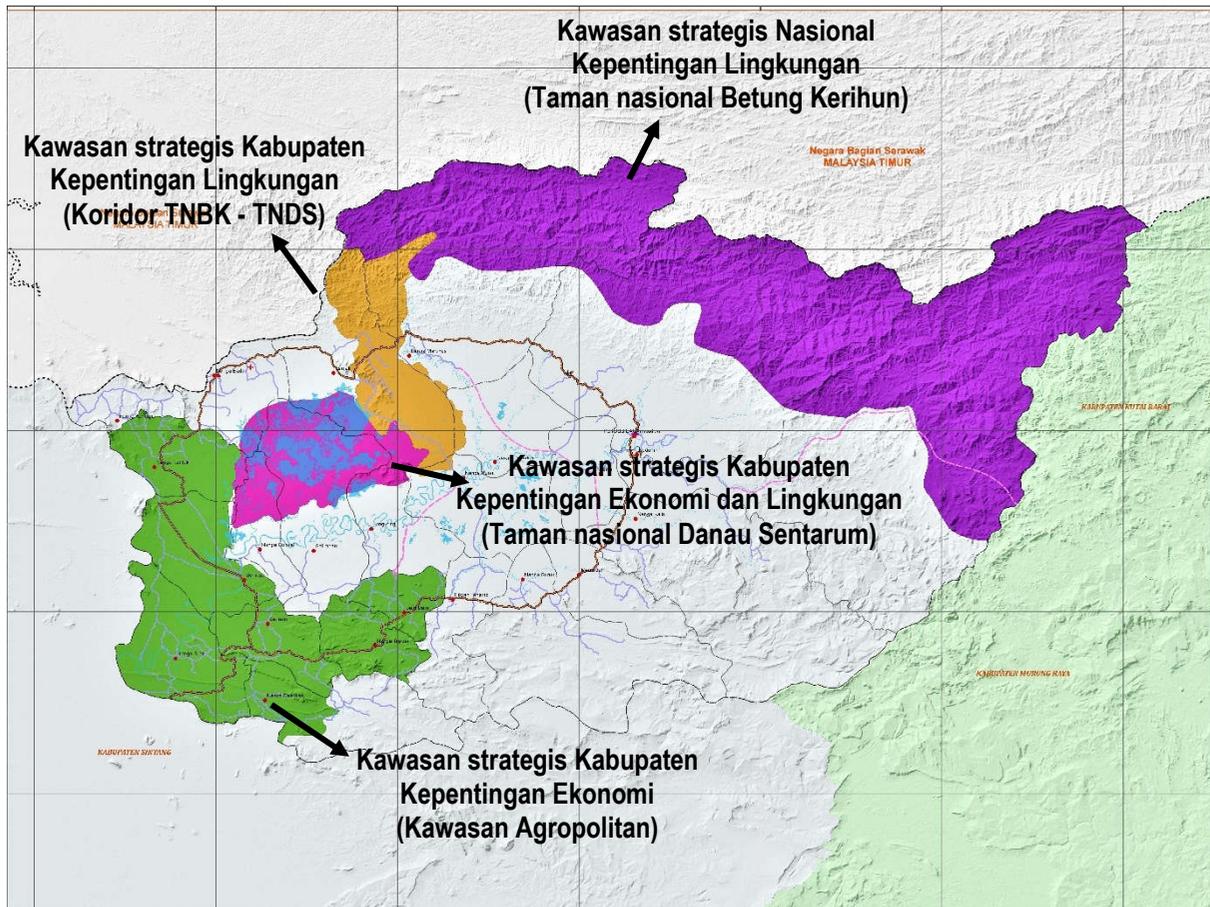
Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demisebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memerhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. Kawasan strategis Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

- a. Kawasan strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasa Strategis Kabupaten.

Gambar 6.3.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Perda No. 1 tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

Kawasan Strategis Nasional terdapat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan;
- Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan daya dukung lingkungan.

Kawasan Strategis Provinsi terdapat di daerah Kabupaten kapuas Hulu terdiri atas:



- a. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan; dan
- b. Kawasan Agropolitan Bunut Hulu dan Kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

- a. Kawasan Agro Politan Silat Hilir dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Ekowisata Taman nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang kepentingan lingkungan dan ekonomi; dan
- c. Kawasan Koridor Taman nasional Danau Sentarum dengan Taman nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan.

6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.



Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian perlu adanya penajaman terhadap arah kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan Arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2016-2021.

Merujuk pernyataan di atas, arah kebijakan dan program prioritas merupakan ujung dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Mengingat RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2.
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Keuangan daerah	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/PD yang menyelenggarakan Urusan Perencanaan
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
			Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Badan Keuangan Daerah



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik		Perbaikan kualitas layanan publik	Program Penuaan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab	
			pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu		Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Menurunnya angka kemiskinan		Pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
Menurunnya pengangguran masyarakat			Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		Pemberdayaan masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan		Peningkatan kualitas Pembangunan SDM masyarakat Kapuas Hulu	Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	Kependidikan	
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Ibu, Balita dan Keluarga	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Program Standarisasi / Mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Peningkatan penataan penanganan kawasan kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Relokasi Program Pemerintah	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kapuas Hulu berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan pada program pada tahun 2016 dan 2017 yang terlampir pada lampiran 7.1.



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan visi misi Bupati dan wakil Bupati. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masamendatang. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Predikat Sakip	C	CC	B	BB	BB	BB
2	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Nilai LPPD	2700	2800	3000	3100	3200	3300
4	IKM	70%	70%	70,5%	71%	71,5%	72%
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian	5,91%	6,09%	6,27%	6,45%	6,63%	6,81%
6	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	3,11%	4,66%	5,01%	5,36%	5,71%	6,06%
7	Jumlah Kunjungan Wisatawan	11.101 Org	11.878 Org	13.252 Org	13.620 Org	14.596 Org	15.650 Org
8	Angka kemiskinan	9,14%	8,86%	8,36%	7,86%	7,36%	7%
9	Tingkat pengangguran terbuka	2%	1,75%	1,50%	1,25%	1%	0,75%
10	Angka Harapan Hidup	71,95 Tahun	71,96 Tahun	71,97 Tahun	71,98 Tahun	71,99 Tahun	72 Tahun
11	Angka rata-rata lama sekolah	6,70 Tahun	6,71 Tahun	6,72 Tahun	6,73 Tahun	6,74 Tahun	6,75 Tahun
12	Angka harapan lama sekolah	6,32 Tahun	6,66 Tahun	7 Tahun	7,5 Tahun	8 Tahun	8,5 Tahun
13	Angka kelulusan pendidikan dasar/ rata-rata nilai un	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
14	Jumlah Desa Menurut Status Desa: <ul style="list-style-type: none"> • Mandiri • Maju • Berkembang • Tertinggal • Sangat Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 0 Desa • Maju 1 Desa • Berkembang 8 Desa • Tertinggal 98 Desa • Sangat Tertinggal 171 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 0 Desa • Maju 1 Desa • Berkembang 9 Desa • Tertinggal 99 Desa • Sangat Tertinggal 169 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 0 Desa • Maju 4 Desa • Berkembang 22 Desa • Tertinggal 129 Desa • Sangat Tertinggal 123 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 1 Desa • Maju 8 Desa • Berkembang 36 Desa • Tertinggal 142 Desa • Sangat Tertinggal 92 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 3 Desa • Maju 20 Desa • Berkembang 89 Desa • Tertinggal 116 Desa • Sangat Tertinggal 50 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri 4 Desa • Maju 26 Desa • Berkembang 124 Desa • Tertinggal 114 Desa • Sangat Tertinggal 10 Desa
15	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	48,69%	50%	55%	60%	67%	73,54%
16	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	11,23%	10%	8%	6%	4%	3,21%
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50%	55%	60%	70%	73%	75%

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah;serta



4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 merupakan capaian pembangunan dan tahun 2017-2021 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,39	5,50	5,61	5,72	5,83	5,83
2	PDRB per Kapita (ribu)	28.620.	28.848	31.156	33.649	36.341	39.248	39.248
3	Laju Inflasi	5,9	5,55	5,56	5,5	5,5	5,5	5,5
4	Tingkat Kemiskinan	9,5	9	8,7	8,5	8	8	8
5	Angka Pengangguran	2,02	2,01	2,01	2	1,95	1,92	1,92
6	Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI	96,1	96,25	96,5	96,75	97	97,25	97,25
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	58,15	60,15	63,45	67,8	70,13	70,15	70,15
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	90,44	120	120	120	120	120	120
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	89,74	91,25	93,6	94,15	95,32	95,32	95,32
5	Angka Harapan Hidup	71,95	71,96	71,97	71,98	71,99	72	72
6	Angka partisipasi angkatan kerja	51,07	55,06	59,03	65,03	73,05	80,05	80,05
ASPEK LAYANAN UMUM								
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
A. BIDANG PENDIDIKAN								
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16
3	Rata - Rata Nilai UN dan UAS SD/MI	61,75	62,5	64	65	67,5	67,5	67,5
4	Rata - Rata Nilai UN dan UAS SMP/MTs	48,88	50,55	50,95	60	65,05	65,05	65,05
5	Persentase guru sesuai kualifikasi SD/MI	64,26	66,26	67,26	69,26	70	70	70
6	Persentase guru sesuai kualifikasi SMP/MTs	90,13	89,5	90	95	96	96	96
7	Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6	6	6	6	6	6



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
8	Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	15	15	15	15	15	15	15
9	Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa SD/MI	13,3	13	12,5	12	12	12	12
10	Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa SMP/MTs	4,15	4,11	4,04	4,05	4	4	4
11	Rasio guru / murid SD/MI	6,3	8,4	10	12,5	15	15	15
12	Rasio guru / murid SMP/MTs	41,1	45	50,5	60	70	70	70
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,85	99,9	100	100	100	100	100
15	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58	58,5	59	59,5	60	60,5	60,5
B. BIDANG KESEHATAN								
1	Cakupan Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal sesuai standar	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
2	Cakupan Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Cakupan bayi baru lahir yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	86%	89%	92%	95%	98%	100%	100%
4	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60	65	70	75	80	85	85
5	Cakupan komplikasi bidan yang ditangani	75	80	85	90	95	100	100
6	Cakupan kunjungan bayi	85	88	91	94	97	100	100
7	Cakupan Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7	11	20	35	50	65	65
8	Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13	20	26	35	50	65	65
9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGI) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Penderita Tuberculosis (TB) mendapatkan Pelayanan TB sesuai standar	55	58	62	65	68	68	68
11	Cakupan Orang Beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil,Pasien TB,Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS),waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	0	25	28	31	35	38	38
12	Cakupan Penduduk yang mengikuti kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan	60	62	64	66	68	70	70
13	Cakupan Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	26	40	60	80	100	100	100
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70	75	80	85	90	95	95
15	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60	64	67	70	78	80	80



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	52	55,1	58,4	61,7	65	68	68
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,45	0,43	0,4	0,38	0,35	0,29	0,29
19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
21	Jumlah tenaga medis dan para medis							
	-Dokter spesialis	11	12	12	13	15	16	16
	-Dokter umum	10	11	12	12	13	14	14
	-Bidan	40	48	55	65	75	80	80
	-Perawat	161	180	200	220	240	260	260
26	Jumlah penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit :	5.483	6.031	6.634	7.298	8.028	8.830	8.830
27	Bed Occupancy Rate (BOR)	50,15	50,2	50,25	50,3	50,4	50,5	50,5
28	Turnover Interval (TOI)	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5
29	Nett Dead Rate	15	12	10	8	5	3	3
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	35,07	39,11	43,14	47,18	51,21	55,24	55,24
2	Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan	64,85	70,04	75,22	80,41	85,6	90,79	90,79
3	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	29,13	39,91	55,87	79,82	87,8	92	92
4	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (ratus ha)	33	48	61	73	87	97	97
5	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah,dan rawa)	20	33,33	37,33	50,67	66,67	86,67	86,67
6	Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik							
	- Sekunder	3.100	3.800	4.800	5.500	6.653	8.000	8.000
7	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	1,26	1,08	1,35	1,8	1,53	1,35	1,35
8	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	11,23	12,4	13,6	14,9	16,4	18,1	18,1
D.	Perumahan dan Pemukiman							
1	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	59,88	60,87	62,21	63,79	65,41	68,24	68,24
2	Persentase Rumah tangga bersanitasi layak	61,87	62,96	64,71	65,81	67,24	70,05	70,05
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	11,23	9,63	8,02	6,42	4,81	3,21	3,21
4	Rasio Rumahber IMB	1,26	1,08	1,35	1,8	1,53	1,35	1,35
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Rasio personil Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk	4,85	5,07	4,97	5,11	5,24	5,37	5,37
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
3	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	1	3	2	3	3	2	2
5	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100
F	SOSIAL							
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	0	0	0	0	0	1	1
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	19,93	21,93	24,12	26,53	29,18	32,1	32,1
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	48,07	50,47	52,99	55,64	58,42	61,35	61,35
4	Jumlah hari besar yang dirayakan	3	3	3	3	3	3	3
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
A.	TENAGA KERJA							
1	Angka partisipasi angkatan kerja	51,07	55,06	59,03	65,03	73,05	80,05	80,05
2	Tingkat Pengangguran terbuka	55,07	57,06	59,03	65,03	73,05	75,05	75,05
3	Pencari kerja yang ditempatkan	55	75	100	100	100	100	100
4	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	55	65	75	80	100	150	150
5	Jumlah pelatihan kerja	3	5	7	9	15	20	20
6	Jumlah sertifikasi pekerja	2	3	5	7	10	150	150
B.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,2	9,3	9,4	9,7	10	11	11
2	Rasio KDRT	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	2,03	2,04	2,1	2,22	2,3	2,5	2,5
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	18,75	15,63	19,44	15,79	17,94	19,05	19,05
C.	PANGAN							
1	Ketersediaan pangan utama	13.087,37	13.077,34	13.206,82	13.337,58	13.469,64	13.603,00	13.603,00
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	2.000,00	2.010,00	2.022,06	2.046,32	2.083,16	2.122,74	2.122,74
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	43.042	45.200	47.450	49.820	52.311	54.927	54.927
4	Penanganan daerah rawan pangan	145,6	147,78	159,85	151,88	153,77	155,31	155,31
D.	PERTANAHAN							
1	Luas lahan bersertifikat	85,74	100	100	100	100	100	100
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	35	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
E.	Lingkungan Hidup							
1	Persentase penanganan sampah	63,1	73,56	82,43	90,69	92,89	94,21	94,21
2	Persentase penegakan hukum lingkungan	20	20	20	20	20	20	20
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,18	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,27
4	Cakupan pengawasan terhadap	20	20	20	20	20	20	20



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
	pelaksanaan AMDAL							
5	Prosentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL	10	20	20	30	30	30	30
6	Pencemaran status baku mutu air	50	50	60	60	75	75	75
7	Prosentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	65	74	87	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	0,002	0,004	0,006	0,009	0,011	0,013	0,013
9	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	75	75	75	75	75	75	75
10	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan kebakaran	83	83	83	83	83	83	83
F.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Kepemilikan KTP	87,15	90,36	93,57	96,78	99,98	100	100
2	Rasio Pasangan berAkta Nikah	72,36	70,89	72,07	73,67	75,7	78,77	78,77
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	26,34	41,07	55,81	70,54	85,27	100	100
4	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100	100
G.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase jumlah lembaga masyarakat desa yang mendapat pelatihan TTG	1,8	30	50	78	100	100	100
2	Prosentase desa yg administrasi pengelolaan keuangan Desa tertib	53,96	64,75	75,54	86,33	100	100	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	71,94	80,94	89,93	93,53	100	100	100
4	PKK Aktif	79,14	83,45	92,81	98,92	100	100	100
5	Posyandu Aktif	81,17	86,04%	87,66	90,26	100	100	100
H.	PEENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							
1	Rasio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	76,9	77,21	77,49	78,4	78,93	79,05	79,05
2	Rasio akseptor KB Baru	20,99	21,05	21,51	22,48	23,91	25,45	25,45
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	95,39	93,78	92,18	90,57	88,96	87,36	87,36
4	Prevalensi KB Aktif	76,9	77,21	77,49	78,4	78,93	79	79
5	Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	12,76	12,06	17,37	30,14	51,41	55,6	55,6
6	Persentase PKK Aktif	79,14	83,45	92,81	98,92	100	100	100
7	Persentase Posyandu Aktif	81,17	86,04	87,66	90,26	100	100	100
I.	PERHUBUNGAN							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	151.754	166.929	183.622	201.985	222.183	244.401	244.401
2	Kepemilikan KIR angkutan umum	1.092	1.201	1.321	1.453	1.598	1.757	1.757
3	Prosentase Pemasangan Rambu-rambu	35	55	70	85	95	100	100
4	Persentase jumlah dermaga penyeberangan	40	60	80	90	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
5	Persentase ketersediaan angkutan darat	0,049	0,051	0,054	0,056	0,059	0,062	0,062
J.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Intensitas upgrade website Pemkab Kapuas Hulu per minggu	144	144	144	144	144	144	144
2	Rata-ratapublikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten	144	144	144	144	144	144	144
K.	KOPERASI DAN UKM							
1	Prosentase Koperasi aktif	18,61	20,07	22,81	32,84	36,49	38,32	38,32
2	Persentase Usaha Mikro Kecil	99,44	99,22	98,04	97,7	97,61	95,41	95,41
3	Persentase Usaha menengah	0,56	0,58	0,62	0,68	1,46	1,76	1,76
L.	PENANAMAN MODAL							
1	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	41,12	11,54	10,34	9,38	8,57	7,89	7,89
2	PTSP Kondisi mantap	tidak	tidak	tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	SPIPISE	SPIPISE	SPIPSE dan SIMYANDU				
4	Rata-rata lama proses perijinan	3	3	3	3	3	3	3
5	Jumlah pelimpahan kewenangan perijinan pada PTSP	15	16	17	18	19	20	20
M.	PEMUDA DAN OLAHRAGA							
1	Jumlah pemuda berprestasi	4	10	15	18	20	25	25
2	Jumlah cabang olah raga berprestasi	5	7	8	9	9	10	10
3	Gelanggan / balai remaja (selain milik swasta)	23	25	30	35	40	46	46
4	Prosentase ketersediaan Lapangan olahraga	1,06	1,09	1,11	1,14	1,17	1,2	1,2
N.	KEBUDAYAAN							
1	Penyelenggaraan even seni dan budaya daerah	5	5	5	5	5	5	5
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	16	18	20	22	24	24
O.	PERPUSTAKAAN							
1	Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan	45,6	45,08	45,92	46,62	48,93	51,26	51,26
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	73,043 1	73,0482	72,5673	72,2946	74,6661	75,6622	75,6622
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	6.862	7.748	8.523	9.375	10.312	11.343	11.343
P.	KEARSIPAN							
1	Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku	48,15%	55,56%	61,18%	64,81%	74,07%	81,82%	81,82%
2	Persentase peningkatan SDM pengelola arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN							
A.	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Produksi perikanan:							
	-Hasil perikanan budidaya	17.960	18.220	19.080	20.120	22.920	23.960	23.960



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
	-Hasil perikanan tangkapan	18.020	17.900	17.600	17.005	16.100	16.000	16.000
	-Konsumsi ikan	37	37,5	38	38,5	39	39,5	39,5
2	Cakupan bina kelompok nelayan	40	43	46	48	50	50	50
B	PARIWISATA							
1	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan							
	a) Wisatawan Domestik	6.217	6.839	7.523	8.275	9.102	10.013	10.013
	b) Wisatawan Asing	555	611	672	739	813	894	894
C.	PERTANIAN							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan :							
	padi (kwt/ton)	43.042	52.004	54.604	57.334	60.201	63.211	63.211
	jagung (kwt/ton)	336	350	365	383	402	442	442
	Kedelai (kwt/ton)	2	3	3	4	5	8	8
	Kacang tanah (kwt/ton)	39	41	43	44	45	48	48
	Kacang Hijau	1	2	2	3	4	6	6
	Ubi Kayu	6464	6700	7035	7386	7775	8750	8750
	Ubi Jalar	638	702	772	849	850	935	935
2	Peningkatan produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan:							
	padi (per ha)	25,21	25,84	26,49	27,15	27,83	28,52	28,52
	jagung (per ha)	11,97	12,27	12,58	12,89	13,21	13,54	13,54
	Kedelai(per ha)	10	10,25	10,51	10,77	11,04	11,31	11,31
	Kacang tanah (per ha)	10,28	10,54	10,8	11,07	11,35	11,63	11,63
	Kacang Hijau(per ha)	0,8	0,82	0,84	0,86	0,88	0,91	0,91
	Ubi Kayu(per ha)	190,72	195,49	200,38	205,38	210,52	215,78	215,78
	Ubi Jalar(per ha)	84	86,1	88,25	90,46	92,72	95,04	95,04
3	Cakupan bina kelompok petani	55	66	69,3	72,77	76,4	80,22	80,22
4	Peningkatan produksi peternakan :							
	-Sapi (ratus kilo)	125.725	132.011	138.612	145.543	152.820	160.461	160.461
	-Kambing (ratus kilo)	2.066	2.169	2.278	2.392	2.512	2.637	2.637
	-Babi (ratus kilo)	140.773	147.812	155.203	162.963	171.111	179.667	179.667
5	Peningkatan populasi ternak :							
	Ternak besar dan kecil							
	-Sapi (ekor)	9.001	9.441	9.878	10.315	10.752	11.845	11.845
	-Kambing (ekor)	5.519	5.787	6.762	7.030	7.298	7.181	7.181
	-Babi (ekor)	20.081	21.056	22.031	23.005	23.980	26.126	26.126
	-Ayam Ras (ekor)	263.719	276.521	289.323	302.125	314.927	343.115	343.115
	-Ayam Pedaging (ekor)	587.303	615.813	644.323	672.833	701.342	764.811	764.811
	-Itik (ekor)	5.058	5.304	5.549	5.795	6.040	6.581	6.581
6	Produksi perkebunan :							
	Kelapa Sawit	63.874	70.261	77.287	85.015	93.516	102.867	102.867
	Karet	17.074	17.415	17.763	18.118	18.842	19.218	19.218



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Kakao	247	248	249	251	253	256	256
	Kelapa	42	42,84	43,27	43,73	44,65	45,54	45,54
	Lada	11,05	11,16	11,28	11,4	11,62	12,21	12,21
7	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan:							
	Kelapa Sawit	1.313	1.340	1.366	1.394	1.436	1.507	1.507
	Karet	724	760	798	837	863	898	898
	Kakao	524	534	544	554	565	576	576
	Kelapa	408	416	424	436	449	462	462
	Lada	534	544	560	576	604	634	634
	D. PERDAGANGAN							
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,3	1,36	1,45	1,59	1,6	1,73	1,73
2	Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera	30,59	30,65	31,1	31,55	31,65	32,2	32,2
3	Nilai ekspor daerah	198,91	204,88	211,02	217,35	223,87	230,59	230,59
	E. PERINDUSTRIAN							
1	Perkembangan IKM :							
	jumlah unit	812	1.086	1.096	1.110	1.120	1.130	1.130
	tenaga kerja	1.818	2.746	2.846	2.986	3.086	3.186	3.186
	nilai investasi	40.600 jt	54.300 jt	54.800 jt	55.500 jt	56.000 jt	56.500 jt	56.500 jt
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	2,22	2,3	2,74	3,15	3,57	4,42	4,42
	F. TRANSMIGRASI							
1	Persentase Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi	3 MoU (Jateng, Lampung, NTT)	2 MoU (Jateng & Jabar)	3 MoU (Jateng, Jabar & Lampung)	2 MoU (Jateng & Jabar)	3 MoU (Jateng, Jabar & Jatim)	2 MoU (Jateng & Jabar)	2 MoU (Jateng & Jabar)
2	Transmigrasi swakarsa	0	0	0	0	0	0	0
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN							
	A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
1	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Indikator Kinerja RPJMD yang mencapai target	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik daerah :							
	-Kapas Hulu Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	-Dokumen datapokok Kapuas Hulu	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	-Dokumen PDRB	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	B. KEUANGAN							
1	Persentase peningkatan PAD	11	15	17	19	21	25	25
2	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	34	36	38	40	42	45	45
3	Persentase PAD terhadap total pendapatan	3,84	4	4,17	4,34	4,52	4,71	4,71



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perenc naan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
4	Persentase belanja modal terhadap total belanja	26	28	31	34	36	39	39
5	Persentase ketergantungan dana transfer terhadap APBD Kab Kapuas Hulu	84,03	85	87	89	91	93	93
C.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan/latihan struktural, teknis dan fungsional							
	- Struktural	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Teknis	65%	72%	76%	80%	85%	90%	90%
	- Fungsional	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
2	Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
3	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	2.257	2.297	2.347	2.397	2.447	2.487	2.487
D.	FUNGSI LAIN							
1	Prosentase jumlah SKPD yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	47	47	47	49	49	49	49
2	Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik :							
	-Standar Pelayanan Publik (SPP)	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	40	45	50	60	65	70	70
3	Persentase Tindaklanjut Peraturan Bupati	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tindak lanjut keputusan Bupati	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase temuan hasil pengawasanyang ditindak lanjuti							
	- BPK	85	87	89	91	93	95	95
	- Inspektorat	50	65	70	75	80	85	85
9	Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani	60	65	70	75	80	90	90
10	Prosentase PKPT yang dilaksanakan.	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi perda	5	3	3	3	3	3	3
12	Persentase Keputusan DPRD yangditindaklanjuti .	5	4	4	4	4	4	4
13	Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Opini Laporan keuangan pemerintah daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
15	Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B)	47,48	50	60	70	75	80	80
16	Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda	5	5	4	4	3	3	3
17	Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
ASPEK DAYA SAING DAERAH								



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
A	FOKUS KEMEMAMPUAN EKONOMI DAERAH							
1	PDRB per Kapita (ribu)	28.620	28.848	31.156	33.649	36.341	39.248	
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR							
1	Kondisi jalan mantap kabupaten	46,69%	52,06%	57,43%	62,80%	68,17%	73,54%	
2	Peningkatan pelabuhan Sungai/Dermaga	71	75	80	85	90	100	
3	Persentase Kawasan pemukiman kumuh perkotaan	0,09	0,08	0,075	0,065	0,055	0,05	
C	FOKUS IKLIM BERINVESTASI							
1	PTSP Kondisi mantap	tidak	tidak	tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	SPIPISE	SPIPISE	SPIPSE dan SIMYANDU				
3	Rata-rata lama proses perijinan	3	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah pelimpahan kewenangan perijinan pada PTSP	15	16	17	18	19	20	20
D	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65	65,5	70	70,5	71	71,5	71,5
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,95	71,96	71,97	71,98	71,99	72	72
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	6,66	6,67	6,68	6,69	6,7	6,75	6,75
4	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	89,05	92	93	94	95	96	96



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, RPJMD ini juga merupakan arahan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran selama periode tahun 2016-2021.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat mewujudkan visi Bupati “ **MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS** ”, perlu didukung oleh : **(1)** Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; **(2)** Tata Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); **(3)** Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu; **(4)** Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poorpolicy*); **(5)** Partisipasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha; serta **(6)** Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan akan membawa masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih.



No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp									
	DINAS KESEHATAN				33.486.096.953		146.814.401.368		273.352.576.114		137.670.416.002		144.897.553.805	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.433.019.839	100%	12.262.042.001	100%	12.196.792.001	100%	17.760.973.430	100%	19.590.070.773	DINAS KESEHATAN
14	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 tahun	100%	100%	-	100%	184.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	DINAS KESEHATAN
15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK	50%	50%	35.000.000	60%	4.641.144.000	70%	4.641.144.000	80%	3.926.058.400	90%	4.318.664.240	DINAS KESEHATAN
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar	50%	0%	-	55%	1.557.423.000	60%	1.445.823.000	65%	1.296.080.500	70%	1.425.688.550	DINAS KESEHATAN
17	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELUANGAN	Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Sesuai standar	100%	100%	40.555.000	100%	846.040.000	100%	521.040.000	100%	573.144.000	100%	630.458.400	DINAS KESEHATAN
18	PROGRAM KESELAMATAN IBU, BALITA DAN KELUARGA	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%	100%	1.737.535.000	100%	4.250.071.000	100%	4.205.071.000	100%	5.050.000.000	100%	5.085.000.000	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		DINAS KESEHATAN
		Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
		Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	100%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		DINAS KESEHATAN
		Cakupan penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Underweight Balita	23%	23%	1.944.524.500	26%	591.060.500	22%	591.060.500	26%	2.013.348.400	26%	2.020.775.240	DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Wasting Pada Balita				10%		10%		10%		10%		DINAS KESEHATAN
20	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat	0	10%	-	20%	889.360.000	40%	891.167.000	60%	928.000.000	80%	988.500.000	DINAS KESEHATAN
		Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	30/1.000	28/1.000		26/1.000		24/1.000		22/1.000		20/1.000		DINAS KESEHATAN
21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN	Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	100%	100%	1.368.797.000	100%	2.160.421.500	100%	2.906.421.500	100%	2.256.434.980	100%	1.574.845.678	DINAS KESEHATAN
		Cakupan penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	100%										DINAS KESEHATAN
22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN	cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	507.992.000	100%	32.920.855.164	100%	32.920.855.164	100%	22.057.811.747	100%	23.647.689.824	DINAS KESEHATAN
		Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96000	96000		120000		150000		180000		204000		DINAS KESEHATAN
		Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
		Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yg terakreditasi	6 Pusk	7 Pusk	3.072.000.000	7 Pusk	2.452.150.000	10 Pusk	2.452.150.000	6 Pusk	5.629.690.000	9 Pusk	4.704.659.000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi	-	0%	-	100%	-	0%	-	100%	-	100%	-	DINAS KESEHATAN
24	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANNYA	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	40%	40%	15.260.300.114	50%	15.949.359.000	60%	16.140.209.000	70%	7.769.099.000	80%	7.060.449.000	DINAS KESEHATAN
25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	30%	30%	-	40%	38.585.080.399	45%	164.710.080.399	50%	40.531.710.890	60%	44.584.881.979	DINAS KESEHATAN
26	PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEHATAN	Net Death Rate RSUD dr A. Diponegoro				<50/1000	24.686.190.804	<45/1000	25.000.000.000	<40/1000	26.000.000.000	<35/1000	27.000.000.000	DINAS KESEHATAN
27	PROGRAM OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN PENGAWASAN MAKANAN	Persentase tersedianya 140 item obat di Kabupaten	100%	90%	3.086.373.500	90%	4.839.204.000	90%	4.530.762.550	90%	1.658.064.655	90%	2.023.871.121	DINAS KESEHATAN
		Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas												DINAS KESEHATAN
		Angka Kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan	≤ 1	≤ 1		≤ 1		≤ 1		≤ 1		≤ 1		DINAS KESEHATAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				172.798.245.750		384.709.786.815		622.839.894.328		658.246.746.390		701.441.151.482	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
28	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	6.880.837.500	100,00%	6.880.837.500	100,00%	6.880.837.500	100,00%	6.880.837.500	100,00%	6.880.837.500	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
29	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "Baik"		100,00%	1.186.080.000	100,00%	1.238.600.000	100,00%	1.238.600.000	100,00%	1.238.600.000	100,00%	1.238.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun		90,00%	132.000.000	92,50%	132.000.000	95,00%	132.000.000	97,50%	132.000.000	97,50%	132.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
31	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,00%	885.701.000	87,00%	885.701.000	90,00%	885.701.000	95,00%	885.701.000	100,00%	885.701.000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
32	Program peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah		B	162.118.000	B	162.118.000	B	162.118.000	B	162.118.000	B	162.118.000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
33	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	539,64	554,17	148.546.692.000	609,58	345.529.954.963	665,00	586.082.950.459	720,41	624.091.245.505	775,83	665.900.370.055	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
34	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jalan dan Jembatan		28,72%	5.253.305.000	32,77%	5.206.979.353	36,81%	5.417.080.969	41,71%	5.418.164.386	90,21%	5.418.164.927	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
35	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	29,13%	35,86%	9.751.512.250	50,00%	20.980.144.000	60,00%	15.335.006.400	68,00%	11.938.080.000	75,00%	13.023.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
36	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong (meter)			-	492	3.693.452.000	1000	6.705.600.000	1500	7.500.000.000	2000	7.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
37	Program Pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa tertib usaha												
		Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikat												
		Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi												
	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA				16.628.020.300		19.470.456.300		90.863.637.153		99.894.262.643		102.766.564.643	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
38	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor		100%	6.657.119.800	100%	5.610.639.700	100%	5.126.377.153	100%	5.126.377.153	100%	5.126.377.153	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
39	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai kepuasan atas layanan internal Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu	NA	NA	1.021.805.000	NA	1.279.125.000	82%	418.575.000		-		-	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
40	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai kepuasan atas layanan internal Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu	100%	100%	-	100%	200.000.000	100%	147.250.000		-	-	-	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai kepuasan atas layanan internal Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu	100%	100%	411.085.000	100%	103.662.600	25 ok	357.533.000		-		-	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
42	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan,Data serta Bahan Evaluasi untuk Pengendalian Pembangunan	45%	45%	-	61%	-	75%	-	75%	434.530.000	75%	434.530.000	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
43	Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah keseluruhan penduduk yang terlayani air bersih	131.586 jiwa	131.586 jiwa	-	190.079 jiwa	-	213.839 jiwa	14.994.439.100	225.719 jiwa	14.994.439.100	225.719 jiwa	14.994.439.100	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
44	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Panjang jalan Desa dalam kondisi mantap	226.056,28 M2	226.056,28 M2	-	328.191,84 M2	-	262,64 km	68.627.847.500	350.825,8 M2	68.627.847.500	362.142,7 M2	68.627.847.500	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
45	Program Perencanaan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RDTR	4,3%	13,04%	-	17,39%	-	17,39%	667.399.000	25%	667.399.000	25%	667.399.000	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
46	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Izin penataan ruang keseluruhan yang difasilitasi			-	NA	-	2%	225.610.500	2,5%	225.610.500	3%	225.610.500	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
47	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian RDTR	NA	NA	-	NA	-	1%	-	1,5%	-	1,7%	-	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
		Persentase Kesesuaian RTBL	NA	NA	-	NA	-	1%	-	1,5%	-	1,7%	-	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
48	Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota	Persentase taman dalam kondisi baik	12,2%	15,0%	931.800.000	17%	1.853.159.000	20%	298.605.900	22%	2.242.322.390	23%	2.242.322.390	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
49	Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	Persentase Bangunan Pemerintah Layak Fungsi	NA	NA	7.606.210.500	NA	10.423.870.000	NA	-	0,5%	7.575.737.000	1%	10.448.039.000	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.645.504.350		12.099.848.800		13.309.833.680		13.323.143.514		13.336.466.657	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			981.193.000		1.550.055.000		1.705.060.500		1.706.765.561		1.708.472.326	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			181.020.000		402.960.000		443.256.000		443.699.256		444.142.955	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
52	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			-		78.500.000		86.350.000		86.436.350		86.522.786	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
53	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			270.000.000		100.000.000		110.000.000		110.110.000		110.220.110	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			68.428.000		75.424.000		82.966.400		83.049.366		83.132.416	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
55	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase PSU Lingkungan Permukiman Organik dan Lingkungan Perumahan yang direhab		0%	223.651.000		2.866.600.000	21%	3.153.260.000	30%	3.156.413.260	40%	3.159.569.673	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
56	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				-	40%	4.551.000.000	45%	5.006.100.000	55%	5.011.106.100	65%	5.016.117.206	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
57	Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sungai/DAS yang memenuhi syarat untuk Status Baku Mutu Air	30,77%	38,46%	1.346.138.200	46,51%	1.136.357.000	61,54%	1.249.992.700	69,23%	1.251.242.693	76,92%	1.252.493.935	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
58	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0%	0%	532.686.800	0%	196.103.800	10%	215.714.180	12%	215.929.894	18%	216.145.824	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
59	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rasio Titik SDA yang direhabilitasi	0%	0%	-	25%	99.935.000	50%	109.928.500	75%	110.038.429	100%	110.148.467	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
60	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang tertangani	10,64%	11,77%	1.042.387.350	12,57%	1.042.914.000	17,35%	1.147.205.400	18,54%	1.148.352.605	21,44%	1.149.500.958	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	SATPOL PP				5.128.451.000		5.256.515.000		5.775.645.500		6.353.210.050		6.988.531.055	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
61	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran			4.231.393.000		4.063.497.000		4.469.846.700		4.916.831.370		5.408.514.507	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
62	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak pakai			315.750.000		301.540.000		331.694.000		364.863.400		401.349.740	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
63	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak pakai			-		204.245.000		224.669.500		247.136.450		271.850.095	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
64	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti sertifikasi kompetensi Pol PP			301.404.000		401.854.000		442.039.400		486.243.340		534.867.674	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
65	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketramtaman dan Keindahan)			260.404.000		220.169.000		242.185.900		266.404.490		293.044.939	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
66	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Patroli Siaga Ketertaman dan Ketertiban Umum			19.500.000		65.210.000		65.210.000		71.731.000		78.904.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase wilayah rawan bencana												SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase sarana dan prasarana penanganan bencana												SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
67	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
68	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
69	Program Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
71	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		7.686.977.100		7.475.283.200		7.952.104.900		9.674.713.833		10.642.395.416		11.706.634.056	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	Program Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasinya	1.766.281.000	100%	1.771.281.000	100%	1.940.309.100	100%	2.134.340.010	100%	2.347.976.210	100%	2.582.773.731	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	1.395.000.000	100%	1.395.000.000	100%	1.534.500.000	100%	1.687.950.000	100%	1.856.745.000	100%	2.042.419.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
74	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam 1 Tahun	145.000.000	100,0%	145.000.000	100%	159.500.000	100%	175.450.000	100%	192.995.000	100%	212.294.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
75	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	241.000.000	100%	241.000.000	100%	265.100.000	100%	291.610.000	100%	320.771.000	100%	352.848.100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
76	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	80.000.000	11 Dokumen	64.000.000	11 Dokumen	70.400.000	11 Dokumen	77.440.000	11 Dokumen	85.192.000	11 Dokumen	93.710.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
77	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Direhabilitasi	169.329.500	100%	-	100%	169.329.500	100%	820.502.000	100%	902.552.200	100%	992.807.420	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
78	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	2.847.033.100	100%	2.815.668.700	100%	2.712.117.700	100%	279.563.326	100%	307.519.659	100%	338.271.624	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
79	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Pemberdayaan Sosial Aktif	244.532.700	100%	244.532.700	100%	-	100%	335.534.900	100%	369.088.390	100%	405.997.229	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
80	Program Perlindungan Perempuan	a. Persentase Kasus KDRT yang ditangani b. Persentase Penurunan Kasus KDRT	29.522.500	100%	29.522.500	100%	-	100%	360.000.000	100%	396.000.000	100%	435.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
81	Program Perlindungan Khusus Anak	a. Persentase Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tertangani b. Penurunan Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum	103.302.500	100%	103.302.500	100%	416.294.600	100%	480.000.000	100%	528.000.000	100%	580.800.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
82	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan yang bekerja	50.730.800	100%	50.730.800	100%	-	100%	1.753.590.597	100%	1.928.949.657	100%	2.121.844.622	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
83	Program Keluarga Berencana	Jumlah Pencapaian Peserta KB	438.274.000	100%	438.274.000	100%	409.155.000	100%	595.019.000	100%	654.520.900	100%	719.972.990	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
84	Program Keluarga Sejahtera	Cakupan Pengembangan pelayanan informasi dan konseling KRR, BKB, BKR dan BKL	122.924.000	100%	122.924.000	100%	219.316.000	100%	276.156.000	100%	303.771.600	100%	334.148.760	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
85	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerja sama organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	54.047.000	100%	54.047.000	100%	56.083.000	100%	407.558.000	100%	448.313.800	100%	493.145.180	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						92.646.448.667		136.527.345.707		154.793.253.287		148.882.862.123	175.342.343.134
	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI						9.852.509.200		13.404.459.420		15.215.339.569		15.097.650.736	14.787.458.447
86	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.821.263.000	100%	2.003.389.300	100%	2.792.754.779	100%	2.771.153.155	100%	2.714.217.784	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
87	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	173.895.000	100%	791.284.500	100%	266.653.466	100%	264.590.934	100%	259.154.719	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
88	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	94.500.000	87,0%	103.950.000	90,0%	144.907.862	95,0%	143.787.017	100,0%	140.832.807	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
89	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	40.260.000	B	54.285.500	B	61.735.349	B	61.257.834	B	59.999.247	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
90	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	70.000.000	95,0%	107.339.157	97,5%	106.508.901	97,5%	104.320.598	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
91	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja		55,0%	338.858.300	100,0%	672.744.130	100,0%	519.610.917	100,0%	515.591.788	100,0%	504.998.577	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		Cakupan Pelatihan Tenaga Kerja berdasarkan unit kompetensi												DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		Tingkat Produktivitas Daerah												DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan												DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
92	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan jaminan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	55	65,00	712.904.500	75,00	784.194.950	80,00	1.093.179.540	100,00	1.084.723.927	150,00	1.062.437.480	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp										
		Persentase Perusahaan yang menerapkan K3													DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
93	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi		50,0%	228.991.000	55,0%	251.890.100	60,0%	351.138.583	65,0%	348.422.568	70,0%	341.263.972		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
94	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil menjadi industri menengah	812	1.086	601.155.400	1.096	661.270.940	1.110	921.821.624	1.120	914.691.444	1.130	895.898.438		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Industri Menengah Menjadi Industri Besar													DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		Inovasi masyarakat kreatif													DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
95	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Luas cadangan lahan yang siap di bangun		50,0%	5.545.008.000	55,0%	686.208.600	60,0%	8.502.806.894	65,0%	8.437.038.699	70,0%	8.263.693.561		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
96	Program Transmigrasi Lokal	persentase transmigran yang ditempatkan		100,0%	295.674.000	100,0%	7.325.241.400	100,0%	453.391.397	100,0%	449.884.469	100,0%	440.641.263		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		Persentase transmigran yang mendapatkan pelatihan													DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				44.936.815.000		73.324.467.817		69.520.221.276		68.982.490.673		67.565.194.892		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
97	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.101.411.000	100%	2.920.622.000	100%	3.222.338.352	100%	3.197.413.950	100%	3.131.720.739		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
98	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	235.000.000	100%	335.000.000	100%	360.352.883	100%	357.565.597	100%	350.219.150		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
99	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun													DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	229.500.000	87,0%	350.000.000	90,0%	351.919.092	95,0%	349.197.040	100,0%	342.022.531		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
101	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	292.429.000	B	587.365.000	B	448.415.461	B	444.947.021	B	435.805.258		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
102	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2000	2010,00	40.204.317.743	2022,06	38.057.962.817	2046,32	61.649.965.172	2083,16	61.173.110.059	2122,74	59.916.263.721		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Sasaran Strategis)	78,77	79		80		81		82		83			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	21,11												DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Ketersediaan Cadangan Pangan													DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Ketersediaan pangan Utama /beras (Ton)	29.544,94	30.697,82		31.004,80		31.314,85	306.683.305	31.628,00	304.311.146	31.628,00	298.058.851		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
103	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Jumlah produk olahan unggulan lokal yang dipasarkan		80,0%	434.017.000	85,0%	5.256.000.000	90,0%	665.528.840	95,0%	660.381.054	100,0%	646.813.041		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
104	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi pertanian tanaman pangan utama (kw/ton)			233.090.000		23.776.961.400		357.424.058		354.659.425		347.372.688		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		- Padi	43.042	52.004		54.604		57.334		60.201		63.211			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		- Jagung	336	350		365		383		402		442			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		- Kedelai	2	3		3		4		5		8			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Produksi tanaman perkebunan (kw/ton)		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Kelapa Sawit	63.874	70.261		77.287		85.015		93.516		102.867			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Karet	17.074	17.415		17.763		18.118		18.842		19.218			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Kakao	247	248		249		251		253		256			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Kelapa	42	42,84		43,27		43,73		44,65		45,54			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Lada	11,05	11,16		11,28		11,4		11,62		12,21			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
105	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh yang mendapatkan Pelatihan		70,0%	894.050.257	80,0%	1.404.656.600	85,0%	1.370.951.438	90,0%	1.360.347.292	100,0%	1.332.397.961		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase kelompok yang mendapatkan penyuluhan pertanian													DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
106	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase temuan penyakit ternak yang ditangani		70,0%	313.000.000	80,0%	635.900.000	85,0%	479.959.372	90,0%	476.246.944	100,0%	466.462.102		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
107	Program pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian/perkebunan	Persentase Petani penggunaan bibit unggul						60%	306.683.305	65%	304.311.146	70%	298.058.851		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase penggunaan pupuk													DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase pengembangan alsintan													DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase irigasi tersier dalam kondisi baik													DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase jalan tani kondisi baik												DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Ketersedian lahan sawah												DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.754.646.267		4.380.117.000		7.169.748.300		7.875.983.130		8.675.751.443	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
108	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	1.353.692.100	100%	2.644.926.000	100%	2.909.418.600	100%	3.200.360.460	100%	3.520.396.506	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi " BAIK "	100%	302.491.000	100%	501.500.000	100%	551.650.000	100%	606.815.000	100%	667.496.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
110	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakailan Dinas dan Atributnya			100%	36.600.000	100%	36.400.000	100,0%	29.300.000	100,0%	44.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
111	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	98.580.000	100%	169.720.000	100%	186.692.000	100%	205.361.200	100%	225.897.320	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
112	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	100%	95.433.900	100%	147.277.000	100%	162.004.700	100%	178.205.170	100%	196.025.687	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
113	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk ber-KTP	99%	618.735.770	75,5%	194.466.000	100%	1.048.980.000	100,0%	1.153.878.000	100,0%	1.269.265.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	99,04%	432.323.379	99,51%	82.455.000	100%	260.450.000	100,0%	286.495.000	100,0%	315.144.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95,83%	561.732.500	76,69%	231.024.000	100%	394.500.000	100,0%	433.950.000	100,0%	477.345.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun	92%	278.336.300	25%	25.186.000	100%	394.509.000	100,0%	433.959.900	100,0%	477.355.890	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Pasangan berakta nikah	0%	-	100%	4.250.000	100%	104.666.000	100,0%	115.132.600	100,0%	126.645.860	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Validasi Database Kependudukan	72%	1.013.321.318	69%	317.032.000	100%	1.006.564.000	100,0%	1.107.220.400	100,0%	1.217.942.440	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Pemanfaatan data bagi pengguna layanan	0%	-	100%	25.681.000	100%	113.914.000	100,0%	125.305.400	100,0%	137.835.940	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.232.434.500		6.701.948.990		8.445.186.468		8.379.863.960		8.207.693.519	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
114	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	100%	2.300.542.000	100%	2.821.700.800	100%	3.527.689.117	100%	3.500.402.864	100%	3.428.484.524	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
115	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	100%	61.100.000	100%	464.200.000	100%	93.691.750	100%	92.967.055	100%	91.056.979	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
116	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	87% (241*100/278)	90%	18.550.000	92,5%		95,0%	28.444.877	97,5%	28.224.859	97,5%	27.644.958	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
117	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75% (40*53/100)	85,0%		87,0%	274.997.000	90,0%	421.684.944	95,0%	418.423.261	100,0%	409.826.449	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
118	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	B	39.722.500	B	95.347.800	B	60.911.138	B	60.439.998	B	59.198.214	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
119	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	70% (194*100/278)	75%	736.850.000	85%	742.382.190	90%	1.129.897.966	95%	1.121.158.340	100%	1.098.123.321	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
120	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap jumlah dana anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat beserta pelestarian yang dikurcurkan	30% (83*278/100)	35%	1.372.838.000	40%	1.590.677.160	45%	2.105.132.474	50%	2.088.849.526	55%	2.045.932.583	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
121	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	cakupan desa yang dikembangkan	85% (180*278/100)	70%	612.898.000	75%	712.644.040	80%	939.827.921	85%	932.558.464	90%	913.398.368	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
122	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	cakupan desa yang dibina	85% (180*278/100)	70%	89.934.000	75%		85%	137.906.282	90%	136.839.593	100%	134.028.123	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
123	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase desa yang mampu menyusun data profil desa dan IDM	60%	70%	224.666.500	85%	968.811.300	90%	1.993.574.960	100%	2.192.932.390	100%	2.192.932.390	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS PERHUBUNGAN			8.737.290.000		8.310.250.000		7.898.214.590		3.724.134.590		3.639.664.590	DINAS PERHUBUNGAN	
124	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	0%	1.494.864.600	0%	1.415.122.500	0%	1.800.850.240	0%	1.747.610.240	0%	1.739.490.240	DINAS PERHUBUNGAN
125	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	0	0%	230.435.000	0%	428.000.000	0%	1.308.000.000	0%	278.000.000	0%	278.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
126	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI	0	0,0%	-	0,0%	127.400.000	0,0%	-	0,0%	127.400.000	0,0%	-	DINAS PERHUBUNGAN
127	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PERSENTASE APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN BIMTEK	0	10%	195.500.000	20%	193.940.000	20%	193.940.000	20%	205.000.000	0,2	205.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
128	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	C	CC	56.088.000	B	47.489.850	B	48.131.850	BB	48.131.850	BB	48.131.850	DINAS PERHUBUNGAN
129	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ORANG DAN BARANG	151754	0%	503.646.000	0%	838.297.650	0,0%	3.752.492.500	0,0%	532.992.500	0,0%	566.542.500	DINAS PERHUBUNGAN
130	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	PERSENTASE JUMLAH DERMAGA, HALTE, STEIGHER DAN TAMBATAN PERAHU	0	0	5.571.956.400	0	4.380.000.000	0	-	-	0	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
131	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	PERSENTASE JUMLAH FASILITAS JALAN	0	0	684.800.000	0	880.000.000	0	795.000.000	-	785.000.000	0	802.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK			3.078.068.700		2.566.477.000		11.739.653.900		10.161.183.630		6.477.334.019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	
132	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.366.049.000	100%	1.374.890.000	100%	2.948.466.900	100%	2.616.150.270	100%	2.428.741.047	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
133	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi.	100%	100%	78.000.000	100%	63.000.000	100%	240.000.000	100%	288.000.000	100%	336.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
134	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	100%	-	100%	47.750.000	100%	-	100%	33.750.000	100%	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	197.645.000	100%	393.988.000	100%	6.043.086.800	100%	4.946.395.480	100%	341.035.028	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp									
136	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%					30.000.000		33.000.000		36.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
137	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase meningkatnya akses layanan dan jumlah informasi publik	100%		483.340.700	100%	369.421.000		1.410.202.400	100%	1.037.300.000	100%	1.813.801.456	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
138	Program Pengembangan data dan Informasi	Persentase Kompilasi Ketersediaan Data Statistik Lintas Sektor Kabupaten Kapuas Hulu	100%		147.834.000		174.648.000		542.112.800		596.324.080		655.956.488	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
139	Program Aplikasi dan Informatika	Persentase pemanfaatan Aplikasi Informatika dalam penyelenggaraan Pemerintah	100%		805.200.000		142.780.000		525.785.000		610.263.800		865.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				5.649.997.000		9.705.051.000		9.999.117.256		9.934.714.534		9.768.611.385	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
140	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.541.044.800	100%	2.236.410.500	100%	2.363.063.561	100%	2.344.785.547	100%	2.296.610.211	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
141	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%		70.440.000	100%	203.850.000	100%	108.013.860	100%	107.178.386	100%	104.976.327	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
142	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85,0%		100.676.000	87,0%	158.599.000	90,0%	154.378.242	95,0%	153.184.145	100,0%	150.036.864	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
143	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	56.306.000		73.604.000		86.340.551		85.672.717		83.912.508	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
144	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%			92,5%	25.629.000	95,0%	47.535.912	97,5%	47.168.228	97,5%	46.199.122	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
145	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	1,00		89.106.000	1,00	42.138.000	1,00	136.636.613	1,00	135.579.745	1,00	132.794.160	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pendanaan												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Jumlah kemitraan usaha mikro												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
146	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Produk UKM yang dipromosikan	0%		-	20%	374.076.300	21%	380.000.000	22%	390.000.000	25%	420.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Cakupan pengawasan dan pemeriksaan koperasi												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sehat												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
147	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pelaku distribusi barang yang memiliki izin	198,91	204,88	3.792.424.200	211,02	6.382.058.200	217,35	5.815.365.935	223,87	5.770.384.775	230,59	5.651.827.994	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Persentase Pasar Daerah dalam kondisi baik												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		stabilisasi harga barang kebutuhan pokok												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
148	Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Skala Menjadi Usaha Kecil	99,44	99,22		98,04	208.686.000	97,7	907.782.582	97,61	900.760.993	95,41	882.254.198	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				2.000.000.000		5.703.339.480		7.157.349.428		6.361.286.371		7.555.902.339	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
149	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasinya	100%		731.334.500	100%	985.284.950	100%	1.086.989.445	100%	1.188.890.390	100%	1.308.767.391	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
150	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%		39.250.000	100%	987.000.000	100%	1.089.700.000	100%	648.670.000	100%	1.213.537.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
151	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%		-	92,5%	80.000.000	95,0%	88.000.000	97,5%	96.800.000	97,5%	106.480.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
152	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85,0%		225.163.000	87,0%	247.679.300	90,0%	272.447.230	95,0%	299.691.953	100,0%	329.660.517	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
153	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	8.812.500		25.000.000		27.500.000		30.250.000		43.275.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
154	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kenalkan Realisasi PMDN (milyar rupiah)	41,12	11,54	338.534.000	10,34	1.063.392.000	9,38	1.169.731.200	8,57	1.286.704.320	7,89	1.415.374.752	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
155	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Proses perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	0,75		208.300.000	0,80	1.015.362.000	0,84	1.643.398.200	0,88	1.237.738.020	0,90	1.059.011.822	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
156	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM OPD	71,00		448.606.000	72,00	1.299.621.230	73,00	1.779.583.353	74,00	1.572.541.688	75,00	2.079.795.857	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				5.858.691.000		9.921.235.000		14.130.902.000		14.492.884.000		44.403.712.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
157	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan masyarakat atas layanan internal	68,00%	68,00%	1.160.646.000	69,27%	1.432.175.000	70,66%	1.538.649.000	72,07%	1.690.514.000	73,51%	5.821.984.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
158	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik.	60%	60%	83.500.000	65%	120.969.000	65%	213.000.000	70%	239.000.000	70%	656.469.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
159	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur / pegawai yang disiplin dalam kehadiran.	97,56%	97,56%	29.750.000	97,76%	32.300.000	97,95%	38.000.000	98,15%	45.000.000	98,34%	145.050.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
160	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur / pegawai yang mengikuti Diklat.	4 orang	10 orang	129.550.000	4 orang	55.250.000	4 orang	58.000.000	4 orang	60.000.000	4 orang	302.800.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
161	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang tersedia	4 dokumen	4 dokumen	26.425.000	4 dokumen	26.268.000	4 dokumen	29.559.000	4 dokumen	32.559.000	4 dokumen	114.811.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
162	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah even promosi pariwisata yang dilaksanakan	3 even	3 even	797.210.000	3 even	1.199.391.000	2 even	1.247.504.000	3 even	1.405.530.000	3 even	4.649.635.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
163	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikembangkan.	5 ODTW	5 ODTW	437.667.000	6 ODTW	2.879.357.000	7 ODTW	3.453.993.000	8 ODTW	3.661.842.000	8 ODTW	10.432.859.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
164	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kemitraan pariwisata yang dikembangkan.	6,25%	6,25%	175.289.000	7,50%	63.056.000	9,44%	530.000.000	15%	305.000.000	20%	1.073.345.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
165	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kebijakan yang diambil dalam mengembangkan pemuda.			-	1 kegiatan	224.539.000	1 kegiatan	260.000.000	1 kegiatan	360.000.000	1 kegiatan	844.539.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
166	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi		3 orang	946.069.000	2 orang	1.632.546.000	4 orang	2.507.621.000	4 orang	2.664.083.000	4 orang	7.750.319.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
167	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi.		3 organisasi	200.000.000	5 organisasi	530.000.000	2 organisasi	650.000.000	4 organisasi	878.000.000	3 organisasi	2.258.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
168	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah kebijakan yang diambil dalam mengembangkan Olahraga			50.142.000	1 kegiatan	152.524.000	3 kegiatan	303.684.000	2 kegiatan	193.684.000	3 kegiatan	700.034.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
169	Program Pembudayaan Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang mendapat pembinaan.		5 organisasi	396.016.000	7 organisasi	1.088.853.000	8 organisasi	1.460.084.000	9 organisasi	1.369.384.000	9 organisasi	4.314.337.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
170	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet berprestasi		6 orang	1.292.102.000	7 orang	218.007.000	8 orang	593.808.000	10 orang	646.288.000	12 orang	2.750.205.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
171	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga dipelihara atau dibangun.		2 lokasi	134.325.000	2 lokasi	266.000.000	5 lokasi	1.247.000.000	2 lokasi	942.000.000	2 lokasi	2.589.325.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.545.997.000		2.510.000.000		3.517.520.500		3.872.670.500		4.261.020.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
172	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi perkantoran		100%	1.349.695.000	100%	1.446.521.500	100%	1.726.420.500	100%	1.904.170.500	100%	2.073.220.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
173	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	350.237.000	100%	67.000.000	100%	235.000.000	100%	150.000.000	100%	95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
174	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Pegawai		-	100%	32.200.000	100%	40.000.000		-		-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
175	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat		100%	213.000.000	100%	133.000.000	100%	160.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
176	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu		100%	46.181.000	100%	25.070.500	100%	27.100.000	100%	28.500.000	100%	29.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
177	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		60%	229.984.500	65%	308.372.000	68%	180.000.000	70%	230.000.000	75%	280.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
178	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan jumlah unit kearsipan terbit tata lola kearsipan		23 OPD	206.954.000	23 KEC	344.781.000	82 DESA/KEL	430.000.000	100 DESA	490.000.000	100 DESA	520.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
179	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis		-	-	-	65%	230.000.000	68%	300.000.000	70%	380.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
180	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kearsipan Dalam Kondisi Baik		-	-	-	-	-	60%	30.000.000	65%	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
181	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan	Peningkatan jumlah kualitas layanan perpustakaan		-	-	-	6 KEC	310.000.000	8 KEC	350.000.000	10 KEC	415.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
182	Program Pengembangan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Skala (KCKR)	Persentase pengolahan dan pemeliharaan koleksi bahan perpustakaan		60%	8.797.500	63%	5.260.000	65%	29.000.000	67%	30.000.000	70%	33.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
183	Program Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pemberdayaan Perpustakaan	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat		60%	141.148.000	65%	147.795.000	68%	150.000.000	70%	175.000.000	72%	185.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	URUSAN PILIHAN				12.446.548.500		18.676.751.430		20.272.669.869		33.458.780.409		37.485.433.244		
	DINAS PERIKANAN				12.446.548.500		18.676.751.430		20.272.669.869		33.458.780.409		37.485.433.244	DINAS PERIKANAN	
184	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.907.840.600	100%	2.436.232.100	100%	2.925.514.302	100%	2.902.885.798	100%	2.843.243.884	DINAS PERIKANAN	
185	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	85%	90%		92,5%		95,0%	61.336.661	97,5%	60.862.229	97,5%	59.611.770	DINAS PERIKANAN	
186	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	80%	100%	530.100.000	100%	140.500.000	100%	812.864.099	100%	806.576.693	100%	790.004.984	DINAS PERIKANAN	
187	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%	85,0%	70.606.000	87,0%	122.606.000	90,0%	108.268.407	95,0%	107.430.964	100,0%	105.223.716	DINAS PERIKANAN	
188	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	C	C	2.531.592.900	B	3.208.947.800	B	4.531.592.900	BB	5.531.592.900	BB	6.531.592.900	DINAS PERIKANAN	
189	Program Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		17,960	17,960	3.433.491.000	19,080	6.433.491.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2017		2018		2019		2020		2021							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
190	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	31,063	31,063	2.479.918.000	31,516	3.479.918.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN					
191	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Produksi Produk (Lokasi)	1	1	197.000.000	1	204.503.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN					
192	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Luas Areal Kawasan Budidaya yang Dikelola (Ha)	0	0	Rp	-	8,5	1.573.512.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN				
193	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya satu data Perikanan Budidaya, Tangkap, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan (Dok)	0	0	Rp	-	5	139.713.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN				
194	Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan	Persentase Pengembangan SDM Masyarakat Perikanan			Rp	-	5	424.022.450	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN				
195	Program Pemulihan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	Jumlah Lokasi Pemulihan			Rp	-	1	513.305.880	Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN				
196	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluhan Kepada Masyarakat	0	1	536.000.000			Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN					
197	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Sumber Daya Perikanan	Jumlah buku yang dibuat	0		760.000.000			Rp	-	Rp	-	Rp	-	DINAS PERIKANAN					
198	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Angka Produksi Ikan Tangkap (Ton/Tahun)	0	1	Rp	-		Rp	-	41,10	2.100.000.000	41,20	3.100.000.000	41,60	4.200.000.000	DINAS PERIKANAN			
199	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton/Tahun)			Rp	-		Rp	-	25,263	5.024.786.000	26,526	5.276.025.300	27,853	5.527.264.600	DINAS PERIKANAN			
200	Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	Jumlah Produksi Benih (UPR, Pembenih Mandiri dan Pembudidaya) (ekor)			Rp	-		Rp	-	2.207.250	164.420.500	2.255.648	5.033.007.025	2.305.226	5.041.228.050	DINAS PERIKANAN			
		Jumlah dan Ragam Jenis Pakan yang diproduksi UP2R			Rp	-		Rp	-	250		500		1000		DINAS PERIKANAN			
201	Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin	Jumlah Benih Ikan yang diproduksi (ekor)	60,20	120,000	Rp	-	150,000	Rp	-	429,000	1.206.722.000	455,000	5.085.122.100	481,000	5.145.458.200	DINAS PERIKANAN			
		Jumlah Jenis Ikan yang diproduksi	3		Rp	-		Rp	-	11	Rp	-	12	Rp	-	14	Rp	-	DINAS PERIKANAN
		Jumlah Ragam/Jenis Produksi Benih yang Memperoleh Sertifikat	0		Rp	-		Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	DINAS PERIKANAN
		Retribusi Hasil Penjualan Benih (PAD)			Rp	-		Rp	-		150.000.000		165.000.000		190.000.000		DINAS PERIKANAN		
202	Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah	Angka Pasokan Ikan (%)	0		Rp	-		Rp	-	3%	2.169.695.000	4%	2.865.277.400	5%	3.151.805.140		DINAS PERIKANAN		
203	Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Ragam Jenis Produk Olahan Ikan yang dapat diproduksi Unit Pengolah (Jenis)	0 Jenis		Rp	-		Rp	-	3 Jenis	502.470.000	4 Jenis	750.000.000	5 Jenis	850.000.000		DINAS PERIKANAN		
		Persentase Pertumbuhan Penjualan Produk (%) Hasil Perikanan	0%		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		DINAS PERIKANAN		
204	Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)	Mempertahankan Keberagaman Jenis Ikan Endemik pada PUD yang tidak Berkurang dari saat ini			Rp	-		Rp	-	1 Jenis	300.000.000	2 Jenis	1.200.000.000	3 jenis	2.000.000.000		DINAS PERIKANAN		
		Jumlah / Ekosistem Danau / Perairan Umum lainnya Berstatus Baik, Meningkat			Rp	-		Rp	-	2 Danau	215.000.000	4 Danau	575.000.000	6 Danau	1.050.000.000		DINAS PERIKANAN		
	PENUNJANG URUSAN				38.733.667.213			44.346.021.559			49.351.103.789			47.714.243.232		49.051.655.449			
	INSPEKTORAT				4.423.225.500			5.419.451.500			7.358.952.470			7.463.237.706		7.309.900.023		INSPEKTORAT	
205	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.321.626.500		100%	1.646.080.000		100%	2.026.603.914		100%	2.010.928.375		1.969.612.379		INSPEKTORAT	
206	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100	100%	270.159.000		100%	420.000.000		100%	414.266.275		100%	411.061.975		402.616.405		INSPEKTORAT	
207	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	83	85,0%	156.025.000		87,0%	157.000.000		90,0%	239.251.313		95,0%	237.400.733		232.523.161		INSPEKTORAT	
208	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	10.415.000		B	30.000.000		B	15.970.533		B	15.847.003		15.521.415		INSPEKTORAT	
209	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%			92,5%	150.000.000		95,0%	230.012.479		97,5%	228.233.360		223.544.138		INSPEKTORAT	
		Persentase Kesesuaian Atribut Pegawai																	
210	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rasio temuan BPK RI yang di tindaklanjuti sesuai rekomendasi	85	87,00	2.500.000.000		89,00	2.814.871.500		91,00	4.153.907.990		93,00	4.282.983.862		95,00	4.194.986.822		INSPEKTORAT
		Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APP	85	83,00			80,00			75,00			70,00			60,00			

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp										
		Persentase Pejabat yang melaporkan LHKPN													
211	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang telah mengikuti Diklat penjenjangan Auditor/P2UPD	70	75,0%	150.000.000	75,0%	176.500.000	75,0%	270.648.017	75,0%	268.554.586	75,0%	263.036.936	INSPEKTORAT	
212	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase laporan yang ditindaklanjuti	100	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	8.291.950	100%	8.227.813	100%	8.058.766	INSPEKTORAT	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9.474.598.000		11.513.598.000		14.036.000.000		12.851.050.000		13.463.602.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
213	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	61%	67%	2.158.400.000	69%	2.357.400.000	71%	3.468.000.000	73%	3.641.400.000	75%	3.823.470.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
214	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	100%	375.000.000	100%	1.065.000.000	100%	1.065.000.000		-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
215	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur pada apel pagi dan apel sore	100%	100%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000		-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
216	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	50%	55%	220.000.000	60%	220.000.000	60%	220.000.000		-		-		
217	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Nilai AKIP BAPPEDA	47%	55%	182.500.000	60%	162.500.000	70%	193.000.000	70%	307.650.000	75%	323.032.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
218	Program perencanaan pembangunan daerah	1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD	44,56%	50%	1.965.000.000	63%	1.825.000.000	75%	1.770.000.000	80%	1.858.500.000	85%	1.951.425.000		
		2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	3,26%	5%		5%		10%		10%		15%			
219	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	57,23%	60%	1.083.698.000	80%	1.253.698.000	100%	1.640.000.000	100%	1.722.000.000	100%	1.808.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	73,41%	80%		90%		100%		100%		100%			
220		3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)	34,97%	40%	60.000.000	45%	60.000.000	50%	150.000.000	60%	157.500.000	70%	165.375.000		
221	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	46,83%	60%	1.115.000.000	80%	1.125.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.102.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	68,71%	80%		90%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
222		3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	36,07%	40%	65.000.000	45%	65.000.000	50%	150.000.000	60%	157.500.000	70%	165.375.000		
223	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	57,85%	60%	920.000.000	80%	1.065.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.155.000.000	100%	1.212.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	73,10%	80%		90%		100%		100%		100%			
		3. Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)	35,37%	40%	70.000.000	45%	70.000.000	50%	200.000.000	60%	210.000.000	70%	220.500.000		
224	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	-	50%	660.000.000	60%	1.130.000.000	70%	1.600.000.000	75%	1.120.000.000	80%	1.176.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
225	Program Penelitian dan Pengembangan	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	-	2 dok	600.000.000	2 dok	1.065.000.000	2 dok	1.430.000.000	2 dok	1.471.500.000	2 dok	1.515.075.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan	-	2 OPD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	BADAN KEUANGAN DAERAH				17.118.569.900		18.917.396.890		15.163.947.925		16.628.079.619		17.459.483.600	BADAN KEUANGAN DAERAH	
226	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	persentase terpenuhinya kebutuhan perkantoran			6.076.702.300		6.684.372.530		5.699.163.975		5.984.122.174		6.283.328.282	BADAN KEUANGAN DAERAH	
227	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase terpenuhinya kebutuhan aparatur			551.000.000		606.100.000		34.650.000		1.057.312.988		1.110.178.637	BADAN KEUANGAN DAERAH	
228	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kinerja aparatur			749.052.000		823.957.200		387.000.000		406.350.000		426.667.500	BADAN KEUANGAN DAERAH	
229	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Opini BPK			1.898.149.300		2.087.964.230		1.877.320.325		1.885.232.901		1.979.494.546	BADAN KEUANGAN DAERAH	
230	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun													
231	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Peningkatan PAD			6.657.767.000		7.410.513.700		6.406.092.100		6.514.092.100		6.839.796.705	BADAN KEUANGAN DAERAH	
232	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN /KOTA	Opini BPK			1.185.899.300		1.304.489.230		759.721.525		780.969.456		820.017.929	BADAN KEUANGAN DAERAH	

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				7.717.273.813		8.495.575.169			12.792.203.394		10.771.875.907		10.818.669.327	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
233	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian capaian-capaian kinerja BKPSDM	100%	100%	54.028.500	100%	54.028.500	100%	54.028.500	100%	54.028.500	100%	54.028.500	100%	54.028.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
234	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.599.280.000	100%	1.587.477.900	100%	1.769.065.650	100%	1.853.358.930	100%	1.953.406.258	100%	1.953.406.258	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
235	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi "BAIK"	100%	100%	247.465.000	100%	225.560.000	100%	654.651.000	100%	254.651.000	100%	262.661.000	100%	262.661.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
236	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS BKPSDM	100%	100%	20.900.000	100%	18.800.000	100%	105.000.000	100%	15.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
237	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	97%	97%	4.157.415.313	97%	4.784.797.769	97%	5.059.843.244	97%	4.758.622.477	97%	4.857.708.569	97%	4.857.708.569	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Penyelesaian kasus-kasus disiplin	97,0%	97,0%		97%		97%		97%		97%		97%		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi jabatan	97,0%	97%		97%		97%		97%		97%		97%		
		Persentase penyusunan dan penilaian kinerja PNS														
238	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	97%	97%	1.638.185.000	97%	1.824.911.000	97%	5.149.615.000	97%	3.836.215.000	97%	3.600.865.000	97%	3.600.865.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PENDUKUNG				88.837.535.660		84.873.787.744		93.294.574.992		102.796.909.979		111.250.264.868		111.250.264.868	
	SEKRETARIAT DAERAH				58.898.055.660		54.836.307.744		59.225.104.010		63.838.783.643		72.179.059.408		72.179.059.408	SEKRETARIAT DAERAH
239	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			14.788.187.060		16.909.922.000		18.655.708.750		20.332.962.725		21.767.308.998		21.767.308.998	SEKRETARIAT DAERAH
240	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			10.696.499.000		7.563.930.800		8.319.784.700		9.149.923.990		10.060.877.209		10.060.877.209	SEKRETARIAT DAERAH
241	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun			364.000.000		199.500.000		213.450.000		228.795.000		245.674.500		245.674.500	SEKRETARIAT DAERAH
242	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			3.543.628.000		1.106.433.000		1.119.333.500		1.207.895.850		1.909.314.335		1.909.314.335	SEKRETARIAT DAERAH
243	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			3.337.014.750		3.678.584.250		2.497.510.000		2.668.473.825		5.600.019.033		5.600.019.033	SEKRETARIAT DAERAH
244	Program penataan organisasi dan reformasi birokrasi	Jumlah SKPD yang mendapat predikat "B" atas Laporan Kinerja IP			1.690.000.000		1.632.218.000		1.408.291.000		1.564.910.000		2.324.565.000		2.324.565.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah SKPD yang mendapat predikat baik atas evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik			-		-		-		-		-		-	SEKRETARIAT DAERAH
		Skor PMPRB			-		-		-		-		-		-	SEKRETARIAT DAERAH
245	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan				1.950.000.000		2.150.000.000		1.725.000.000		1.750.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
246	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (%)			539.049.000		491.515.000		826.586.644		820.193.095		803.341.627		803.341.627	SEKRETARIAT DAERAH
247	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	persentase kegiatan yang difasilitasi ULP			520.000.000		516.000.000		798.000.000		803.000.000		559.000.000		559.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
248	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan penyelenggaraan pemda yang disusun tepat waktu			1.165.727.000		1.509.563.100		1.670.000.000		1.790.000.000		2.345.000.000		2.345.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
249	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi pengendalian inflasi			313.416.000		674.169.500		391.450.400		615.731.490		638.654.984		638.654.984	SEKRETARIAT DAERAH
250	Program Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik	Persentase LSM Ormas dan Organisasi sosial politik yang dibina			690.000.000		311.000.000		366.000.000		417.000.000		778.200.000		778.200.000	SEKRETARIAT DAERAH
251	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu			290.000.000		268.000.000		281.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
252	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat				105.000.000		110.000.000		125.000.000		125.000.000		120.000.000		120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
253	Program Pencegahan tindak kriminal	Persentase fasilitasi KOMINDA			1.037.635.890		245.000.000		875.000.000		925.000.000		268.000.000		268.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
254	Program Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial	Rapat koordinasi bidang sosial yang diitndaktlanjuti			1.562.049.560		1.710.671.634		1.916.339.068		1.923.710.626		2.160.865.571		2.160.865.571	SEKRETARIAT DAERAH
255	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi			3.193.066.200		3.477.972.060		3.651.870.663		3.651.870.663		3.834.464.196		3.834.464.196	SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
256	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat yang dibina		1.678.516.200		1.274.000.000		1.523.387.800		1.677.000.000		1.427.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
257	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kebutuhan lahan untuk pembangunan yang terfasilitasi		2.379.221.500		2.648.176.500		2.916.852.050		3.188.537.255		3.487.390.980	SEKRETARIAT DAERAH	
258	Program Penyelesaian konflik -konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan milik pemda yang ditangani		1.825.260.000		1.262.448.000		1.388.692.800		1.527.562.080		1.680.318.288	SEKRETARIAT DAERAH	
259	Program Kerjasama informasi dan media massa	Persentase kegiatan pemerintah yang dipublikasikan		1.098.169.000		1.127.541.000		1.375.000.000		1.635.000.000		1.710.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
260	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase LHP yang harus ditindaklanjuti dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan		2.706.815.500		2.735.522.900		3.118.721.490		3.254.777.939		3.515.873.233	SEKRETARIAT DAERAH	
261	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Kerjasama Daerah		49.022.000		60.000.000		75.171.145		74.589.705		73.057.205	SEKRETARIAT DAERAH	
262	Pendidikan Politik Masyarakat			600.000.000		100.000.000		500.000.000		500.000.000		700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
263	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kajian Peraturan Daerah		2.775.779.000		3.074.140.000		3.486.954.000		3.711.849.400		4.175.134.250	SEKRETARIAT DAERAH	
264	Program Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah						2.226.327.500		3.750.000.000		3.750.000.000		
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
265	Pelayanan Administrasi Perkantoran												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
266	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
267	Program Peningkatan Disiplin Aparatur												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
268	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
269	Pengembangan Kawasan Perbatasan												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
270	Pengelolaan Kawasan Perbatasan												BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	SEKRETARIAT DPRD			29.939.480.000		30.037.480.000		34.069.470.982		38.958.126.335		39.071.205.460	SEKRETARIAT DPRD	
271	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	16.982.596.607	100%	17.791.934.460	100%	19.256.742.964	100%	20.828.861.816	100%	22.426.859.161	SEKRETARIAT DPRD	
272	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	90%	2.457.873.880	95%	2.884.237.880	100%	2.808.115.483	100%	4.816.124.300	100%	3.018.624.300	SEKRETARIAT DPRD	
273	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	179.477.000	95%	365.343.760	95%	265.200.000	95%	444.500.000	97,5%	265.200.000	SEKRETARIAT DPRD	
274	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85%	1.491.979.000	87%	1.377.379.000	90%	1.446.247.950	95,0%	1.518.560.348	100,0%	1.594.488.365	SEKRETARIAT DPRD	
275	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100%	115.720.000	100%	129.529.800	100%	156.431.025	100%	158.768.641	100%	166.524.745	SEKRETARIAT DPRD	
276	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rapat-Rapat dewan yang di laksanakan	100%	8.711.833.513	100%	7.489.055.100	100%	10.136.733.560	100%	11.191.311.231	100%	11.599.508.889	SEKRETARIAT DPRD	
		Persentase POKIR yang terakomodir	100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase keputusan DPRD yang di publikasikan	80%		85%		90%		95%		100%			
		Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan	60%		70%		80%		90%		95%			
	KEWILAYAHAN			12.461.457.500		14.549.396.000		19.613.398.448		19.560.693.138		19.185.835.486		
	KECAMATAN			12.461.457.500		14.549.396.000		19.613.398.448		19.560.693.138		19.185.835.486		
	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA			1.489.987.000		1.692.000.000		2.284.770.687		2.267.098.258		2.220.519.065	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
277	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	427.087.000	100%	486.000.000	100%	654.902.263	100%	649.836.672	100%	636.485.302	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
278	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	17.000.000	100%	19.000.000	100%	26.068.081	100%	25.866.447	100%	25.335.002	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
279	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	32.200.000	92,5%	36.000.000	95,0%	49.376.012	97,5%	48.994.095	97,5%	47.987.475	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
280	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85,0%	34.500.000	87,0%	39.000.000	90,0%	52.902.870	95,0%	52.493.673	100,0%	51.415.152	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
281	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah												
	KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA kecamatan putu utara			340.800.000		388.000.000		522.588.351		518.546.193		507.892.282	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
282	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya	100%	333.600.000	100%	380.000.000	100%	511.547.752	100%	507.590.992	100%	497.162.163	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
283	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	7.200.000	92,5%	8.000.000	95,0%	11.040.599	97,5%	10.955.201	97,5%	10.730.119	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
284	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"													
285	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan													
286	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah													
	KELURAHAN HILIR KANTOR kecamatan putu utara			319.200.000		362.000.000		489.466.555		485.680.589		475.701.926		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
287	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	283.800.000	100%	323.000.000	100%	435.183.610	100%	431.817.516	100%	422.945.509		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
288	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	19.934.415	100%	19.780.224	100%	19.373.825		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
289	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan													
290	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	12.350.000	92,5%	14.000.000	95,0%	18.937.694	97,5%	18.791.213	97,5%	18.405.134		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
291	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	10.050.000	B	11.000.000	B	15.410.836	B	15.291.635	B	14.977.457		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN			1.487.273.000		1.688.000.000		2.280.608.994		2.262.968.756		2.216.474.406		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
292	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	435.228.000	100%	496.000.000	100%	667.385.807	100%	662.223.658	100%	648.617.788		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
293	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	33.587.000	100%	38.000.000	100%	51.502.861	100%	51.104.492	100%	50.054.513		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
294	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	14.950.000	92,5%	17.000.000	95,0%	22.924.577	97,5%	22.747.258	97,5%	22.279.899		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
295	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85,0%	25.942.000	87,0%	29.000.000	90,0%	39.779.891	95,0%	39.472.199	100,0%	38.661.214		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
296	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	6.566.000	B	7.000.000	B	10.068.413	B	9.990.535	B	9.785.272		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
	KELURAHAN KEDAMIN HILIR kecamatan putu selatan			347.000.000		393.000.000		532.095.534		527.979.839		517.132.106		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
297	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	328.850.000	100%	374.000.000	100%	504.264.024	100%	500.363.602	100%	490.083.265		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
298	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	5.900.000	100%	6.000.000	100%	9.047.157	100%	8.977.179	100%	8.792.736		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
299	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	12.250.000	92,5%	13.000.000	95,0%	18.784.352	97,5%	18.639.058	97,5%	18.256.105		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
300	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan													
301	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah													
	KELURAHAN KEDAMIN HILIR kecamatan putu selatan			312.000.000		354.000.000		478.425.956		474.725.388		464.971.807		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
302	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	304.240.000	100%	346.000.000	100%	466.526.643	100%	462.918.115	100%	453.407.124		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
303	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	7.260.000	100%	8.000.000	100%	11.132.604	100%	11.046.495	100%	10.819.536		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
304	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun													
305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan													
306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	500.000	B	-	B	766.708	B	760.778	B	745.147		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	
	KECAMATAN BIKA			427.017.000		520.000.000		708.464.502		702.984.614		688.541.280		KECAMATAN BIKA	
307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	360.467.000	100%	410.000.000	100%	552.746.054	100%	548.470.630	100%	537.201.899		KECAMATAN BIKA	
308	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299		KECAMATAN BIKA	
309	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	50.950.000	100%	58.000.000	100%	78.127.572	100%	77.523.264	100%	75.930.492		KECAMATAN BIKA	
310	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	13.600.000	92,5%	15.000.000	95,0%	20.854.465	97,5%	20.693.158	97,5%	20.268.002		KECAMATAN BIKA	
311	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	2.000.000	B	2.000.000	B	3.066.833	B	3.043.111	B	2.980.589		KECAMATAN BIKA	
	KECAMATAN KALIS			478.396.000		473.396.000		520.735.000		615.709.160		630.090.076		KECAMATAN KALIS	
312	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	435.146.000	100%	425.096.000	100%	467.605.000	100%	514.366.160	100%	565.802.776		KECAMATAN KALIS	
313	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	14.750.000	100%	10.800.000	100%	11.880.000	100%	13.068.000	100%	14.374.800		KECAMATAN KALIS	
314	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	90%	-	92,50%	-	-	-	-	42.900.000	100%	-		KECAMATAN KALIS	
315	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85%	25.500.000	87%	34.500.000	90%	37.950.000	95%	41.745.000	100%	45.919.500		KECAMATAN KALIS	
316	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	3.000.000	B	3.000.000	B	3.300.000	B	3.630.000	B	3.993.000		KECAMATAN KALIS	
	KECAMATAN EMBALOH HILIR			418.980.000		511.000.000		696.140.434		690.755.871		676.563.785		KECAMATAN EMBALOH HILIR	
317	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	369.760.000	100%	421.000.000	100%	566.996.094	100%	562.610.447	100%	551.051.203		KECAMATAN EMBALOH HILIR	

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
318	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	30.000.000	100%	34.000.000	100%	46.002.496	100%	45.646.672	100%	44.708.828	KECAMATAN EMBALOH HILIR
319	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN EMBALOH HILIR
320	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	16.800.000	92,5%	19.000.000	95,0%	25.761.398	97,5%	25.562.136	97,5%	25.036.943	KECAMATAN EMBALOH HILIR
321	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	2.420.000	B	2.000.000	B	3.710.868	B	3.682.165	B	3.606.512	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	KECAMATAN EMBALOH HULU				448.771.000		509.000.000		688.152.867		682.830.087		668.800.843	KECAMATAN EMBALOH HULU
322	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	348.746.000	100%	397.000.000	100%	534.772.879	100%	530.636.475	100%	519.734.160	KECAMATAN EMBALOH HULU
323	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	43.000.000	100%	49.000.000	100%	65.936.911	100%	65.426.896	100%	64.082.653	KECAMATAN EMBALOH HULU
324	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	14.025.000	92,5%	15.000.000	95,0%	21.506.167	97,5%	21.339.819	97,5%	20.901.377	KECAMATAN EMBALOH HULU
325	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	36.000.000	87,0%	41.000.000	90,0%	55.202.995	95,0%	54.776.006	100,0%	53.650.593	KECAMATAN EMBALOH HULU
326	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	7.000.000	B	7.000.000	B	10.733.916	B	10.650.890	B	10.432.060	KECAMATAN EMBALOH HULU
	KECAMATAN BUNUT HILIR				470.382.000		584.000.000		797.962.358		791.790.214		775.522.305	KECAMATAN BUNUT HILIR
327	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	352.298.000	100%	401.000.000	100%	540.219.575	100%	536.041.041	100%	525.027.685	KECAMATAN BUNUT HILIR
328	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	104.144.000	100%	118.000.000	100%	159.696.130	100%	158.460.900	100%	155.205.205	KECAMATAN BUNUT HILIR
329	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN BUNUT HILIR
330	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN BUNUT HILIR
331	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	13.940.000	B	15.000.000	B	21.375.826	B	21.210.487	B	20.774.702	KECAMATAN BUNUT HILIR
	KECAMATAN BOYAN TANJUNG				499.198.000		566.000.000		765.478.462		759.557.578		743.951.911	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
332	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	419.540.000	100%	478.000.000	100%	643.329.569	100%	638.353.491	100%	625.238.051	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
333	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	30.668.330	100%	30.431.115	100%	29.805.885	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
334	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	10.000.000	92,5%	11.000.000	95,0%	15.334.165	97,5%	15.215.557	97,5%	14.902.943	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
335	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	32.200.000	87,0%	36.000.000	90,0%	49.376.012	95,0%	48.994.095	100,0%	47.987.475	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
336	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	17.458.000	B	19.000.000	B	26.770.386	B	26.563.320	B	26.017.557	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
	KECAMATAN BUNUT HULU				471.325.000		570.000.000		776.407.122		770.401.705		754.573.238	KECAMATAN BUNUT HULU
337	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	402.928.800	100%	459.000.000	100%	617.857.680	100%	613.078.625	100%	600.482.475	KECAMATAN BUNUT HULU
338	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN BUNUT HULU
339	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	59.536.200	100%	67.000.000	100%	91.293.793	100%	90.587.646	100%	88.726.457	KECAMATAN BUNUT HULU
340	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	7.000.000	92,5%	7.000.000	95,0%	10.733.916	97,5%	10.650.890	97,5%	10.432.060	KECAMATAN BUNUT HULU
341	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	1.860.000	B	2.000.000	B	2.852.155	B	2.830.094	B	2.771.947	KECAMATAN BUNUT HULU
	KECAMATAN MENTEBAH				418.787.000		511.000.000		695.844.484		690.462.210		676.276.159	KECAMATAN MENTEBAH
342	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja		100%	393.497.000	100%	448.000.000	100%	603.394.802	100%	598.727.615	100%	586.426.318	KECAMATAN MENTEBAH
343	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	9.040.000	100%	10.000.000	100%	13.862.085	100%	13.754.864	100%	13.472.260	KECAMATAN MENTEBAH
344	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	14.250.000	92,5%	16.000.000	95,0%	21.851.185	97,5%	21.682.169	97,5%	21.236.693	KECAMATAN MENTEBAH
345	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN MENTEBAH
346	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	2.000.000	B	2.000.000	B	3.066.833	B	3.043.111	B	2.980.589	KECAMATAN MENTEBAH
	KECAMATAN JONGKONG				598.151.000		699.000.000		944.816.125		937.508.085		918.246.295	KECAMATAN JONGKONG
347	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	497.401.000	100%	567.000.000	100%	762.722.913	100%	756.823.342	100%	741.273.852	KECAMATAN JONGKONG
348	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	54.750.000	100%	62.000.000	100%	83.954.555	100%	83.305.176	100%	81.593.610	KECAMATAN JONGKONG
349	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN JONGKONG
350	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B	3.000.000	B	4.600.250	B	4.564.667	B	4.470.883	KECAMATAN JONGKONG
351	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	46.000.000	87,0%	52.000.000	90,0%	70.537.160	95,0%	69.991.564	100,0%	68.553.536	KECAMATAN JONGKONG

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN PENGKADAN				517.296.000		603.000.000		816.231.482		809.918.029		793.277.670	KECAMATAN PENGKADAN
352	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	466.516.000	100%	531.000.000	100%	715.363.343	100%	709.830.093	100%	695.246.114	KECAMATAN PENGKADAN
353	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	7.200.000	100%	8.000.000	100%	11.040.599	100%	10.955.201	100%	10.730.119	KECAMATAN PENGKADAN
354	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN PENGKADAN
355	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	39.000.000	87,0%	44.000.000	90,0%	59.803.244	95,0%	59.340.673	100,0%	58.121.476	KECAMATAN PENGKADAN
356	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	4.580.000	B	5.000.000	B	7.023.048	B	6.968.725	B	6.825.548	KECAMATAN PENGKADAN
	KECAMATAN HULU GURUNG				520.364.000		606.000.000		820.936.004		814.586.162		797.849.893	KECAMATAN HULU GURUNG
357	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	439.929.000	100%	501.000.000	100%	674.594.398	100%	669.376.491	100%	655.623.661	KECAMATAN HULU GURUNG
358	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	32.940.000	100%	37.000.000	100%	50.510.740	100%	50.120.046	100%	49.090.293	KECAMATAN HULU GURUNG
359	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN HULU GURUNG
360	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	28.500.000	87,0%	32.000.000	90,0%	43.702.371	95,0%	43.364.338	100,0%	42.473.386	KECAMATAN HULU GURUNG
361	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	18.995.000	B	21.000.000	B	29.127.247	B	28.901.951	B	28.308.139	KECAMATAN HULU GURUNG
	KECAMATAN SELIMBAU				478.631.000		597.000.000		815.211.760		808.906.195		792.286.625	KECAMATAN SELIMBAU
362	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	431.431.000	100%	491.000.000	100%	661.563.424	100%	656.446.310	100%	642.959.140	KECAMATAN SELIMBAU
363	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN SELIMBAU
364	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B	3.000.000	B	4.600.250	B	4.564.667	B	4.470.883	KECAMATAN SELIMBAU
365	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN SELIMBAU
366	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	47.200.000	100%	53.000.000	100%	72.377.260	100%	71.817.430	100%	70.341.889	KECAMATAN SELIMBAU
	KECAMATAN BADAU				468.525.500		548.000.000		741.445.992		735.710.995		720.595.274	KECAMATAN BADAU
367	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	370.235.500	100%	422.000.000	100%	567.725.234	100%	563.333.947	100%	551.759.838	KECAMATAN BADAU
368	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	54.000.000	100%	61.000.000	100%	82.804.492	100%	82.164.009	100%	80.475.890	KECAMATAN BADAU
369	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN BADAU
370	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	39.000.000	87,0%	44.000.000	90,0%	59.803.244	95,0%	59.340.673	100,0%	58.121.476	KECAMATAN BADAU
371	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	5.290.000	B	6.000.000	B	8.111.773	B	8.049.030	B	7.883.657	KECAMATAN BADAU
	KECAMATAN BATANG LUPAR				426.114.000		502.000.000		681.011.746		675.744.202		661.860.542	KECAMATAN BATANG LUPAR
372	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	366.589.000	100%	417.000.000	100%	562.133.630	100%	557.785.594	100%	546.325.480	KECAMATAN BATANG LUPAR
373	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	27.725.000	100%	31.000.000	100%	42.513.973	100%	42.185.133	100%	41.318.408	KECAMATAN BATANG LUPAR
374	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN BATANG LUPAR
375	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B	3.000.000	B	4.600.250	B	4.564.667	B	4.470.883	KECAMATAN BATANG LUPAR
376	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	31.800.000	87,0%	36.000.000	90,0%	48.762.645	95,0%	48.385.472	100,0%	47.391.357	KECAMATAN BATANG LUPAR
	KECAMATAN EMPANANG				411.707.000		507.000.000		689.588.145		684.254.263		670.195.758	KECAMATAN EMPANANG
377	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	366.707.000	100%	418.000.000	100%	562.314.573	100%	557.965.137	100%	546.501.335	KECAMATAN EMPANANG
378	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	36.000.000	100%	41.000.000	100%	55.202.995	100%	54.776.006	100%	53.650.593	KECAMATAN EMPANANG
379	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN EMPANANG
380	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B	3.000.000	B	4.600.250	B	4.564.667	B	4.470.883	KECAMATAN EMPANANG
381	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	9.000.000	92,5%	10.000.000	95,0%	13.800.749	97,5%	13.694.002	97,5%	13.412.648	KECAMATAN EMPANANG
	KECAMATAN PURING KENCANA				475.867.000		540.000.000		729.702.321		724.058.161		709.181.856	KECAMATAN PURING KENCANA
382	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	344.973.000	100%	393.000.000	100%	528.987.299	100%	524.895.645	100%	514.111.280	KECAMATAN PURING KENCANA
383	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	34.960.000	100%	39.000.000	100%	53.608.242	100%	53.193.588	100%	52.100.687	KECAMATAN PURING KENCANA
384	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	35.200.000	92,5%	40.000.000	95,0%	53.976.262	97,5%	53.558.762	97,5%	52.458.358	KECAMATAN PURING KENCANA
385	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	58.521.000	87,0%	66.000.000	90,0%	89.737.068	95,0%	89.042.963	100,0%	87.213.510	KECAMATAN PURING KENCANA

No	Uraian Belanja, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Perencanaan	Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
386	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	2.213.000	B	2.000.000	B	3.393.451	B	3.367.203	B	3.298.021	KECAMATAN PURING KENCANA
	KECAMATAN SEMITAU				476.484.000		541.000.000		730.648.439		724.996.961		710.101.367	KECAMATAN SEMITAU
387	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	394.558.500	100%	449.000.000	100%	605.022.524	100%	600.342.747	100%	588.008.265	KECAMATAN SEMITAU
388	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	18.400.998	100%	18.258.669	100%	17.883.531	KECAMATAN SEMITAU
389	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	21.250.000	92,5%	24.000.000	95,0%	32.585.101	97,5%	32.333.059	97,5%	31.668.753	KECAMATAN SEMITAU
390	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	45.000.000	87,0%	51.000.000	90,0%	69.003.744	95,0%	68.470.008	100,0%	67.063.241	KECAMATAN SEMITAU
391	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	3.675.500	B	4.000.000	B	5.636.072	B	5.592.478	B	5.477.577	KECAMATAN SEMITAU
	KECAMATAN SUHAID				417.240.000		488.000.000		662.803.958		657.677.249		644.164.788	KECAMATAN SUHAID
392	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	370.739.000	100%	422.000.000	100%	568.497.309	100%	564.100.050	100%	552.510.201	KECAMATAN SUHAID
393	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	7.366.000	100%	8.000.000	100%	11.295.146	100%	11.207.780	100%	10.977.507	KECAMATAN SUHAID
394	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN SUHAID
395	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	35.000.000	87,0%	39.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN SUHAID
396	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	4.135.000	B	4.000.000	B	6.340.677	B	6.291.633	B	6.162.367	KECAMATAN SUHAID
	KECAMATAN SEBERUANG				217.456.000		245.000.000		333.450.624		330.871.423		324.073.427	KECAMATAN SEBERUANG
397	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	148.096.000	100%	168.000.000	100%	227.092.854	100%	225.336.317	100%	220.706.618	KECAMATAN SEBERUANG
398	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	20.690.000	100%	23.000.000	100%	31.726.388	100%	31.480.988	100%	30.834.188	KECAMATAN SEBERUANG
399	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	14.400.000	92,5%	16.000.000	95,0%	22.081.198	97,5%	21.910.403	97,5%	21.460.237	KECAMATAN SEBERUANG
400	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%	31.500.000	87,0%	35.000.000	90,0%	48.302.621	95,0%	47.929.006	100,0%	46.944.269	KECAMATAN SEBERUANG
401	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B	2.770.000	B	3.000.000	B	4.247.564	B	4.214.709	B	4.128.115	KECAMATAN SEBERUANG
	KECAMATAN SILAT HILIR				422.724.000		518.000.000		706.481.795		701.017.242		686.614.330	KECAMATAN SILAT HILIR
402	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	364.744.000	100%	415.000.000	100%	559.304.477	100%	554.978.323	100%	543.575.887	KECAMATAN SILAT HILIR
403	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B	3.000.000	B	4.600.250	B	4.564.667	B	4.470.883	KECAMATAN SILAT HILIR
404	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN SILAT HILIR
405	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	48.080.000	100%	54.000.000	100%	73.726.666	100%	73.156.400	100%	71.653.348	KECAMATAN SILAT HILIR
406	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%	9.900.000	92,5%	11.000.000	95,0%	15.180.824	97,5%	15.063.402	97,5%	14.753.913	KECAMATAN SILAT HILIR
	KECAMATAN SILAT HULU				420.782.000		531.000.000		726.505.148		720.885.717		706.074.592	KECAMATAN SILAT HULU
407	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	394.512.000	100%	449.000.000	100%	604.951.220	100%	600.271.994	100%	587.938.967	KECAMATAN SILAT HULU
408	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,0%		87,0%	35.000.000	90,0%	53.669.578	95,0%	53.254.451	100,0%	52.160.299	KECAMATAN SILAT HULU
409	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		90%		92,5%	15.000.000	95,0%	23.001.248	97,5%	22.823.336	97,5%	22.354.414	KECAMATAN SILAT HULU
410	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		B		B	3.000.000	B	4.600.250	B	4.564.667	B	4.470.883	KECAMATAN SILAT HULU
411	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	26.270.000	100%	29.000.000	100%	40.282.852	100%	39.971.269	100%	39.150.030	KECAMATAN SILAT HULU
	TOTAL				549.920.775.058		955.455.915.723		1.450.921.804.039		1.377.219.193.132		1.471.903.125.170	